

# Laporan Hasil Penelitian

## EFEKTIVITAS DAN EVALUASI PROGRAM DA'I PERBATASAN DI ACEH



*Kerjasama:*

**DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**

*dengan*

**PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT (PKPM) ACEH**

**TAHUN 2015**

# **EFEKTIVITAS DAN EVALUASI PROGRAM DA'I PERBATASAN DI ACEH**

## **Oleh Tim Peneliti PKPM:**

Dr. Mujiburrahman, M.Ag

Abidin Nurdin, M.Th.I

Muji Mulia, M.Ag

Sayuthi, S.Ag

Drs. Muslim Zainuddin, M.Si

Hasnul Arifin Melayu, MA

M. Nazir, S.Ag

M. Ridha, S.HI

Dr. Salman A. Muthalib, M.Ag

Dr. Lukman Hakim

Dr. Jasafat, MA

Khairizzaman, M.Ag

Dedy Sumardi, M.Ag

Ahmad Zaky, S.Pd.I

Sabirin, M.Si

Muhajir al-Fairusy, M.Hum

## **Pengantar**

### **Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh**

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah swt. Tuhan yang telah menurunkan Syariat Islam untuk kemaslahatan Umat manusia. Salawat dan salam kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad saw. yang telah datang dengan risalah yang benar dan mengangkat hak-hak manusia yang sesungguhnya.

Program da'i perbatasan sejak dicanangkan pada tahun 2002 yang lalu sampai saat ini belum pernah dievaluasi secara eksternal. Meskipun setiap tahun pihak DSI Aceh selalu melakukan evaluasi secara internal. Oleh karena itu, kami sangat memberikan apresiasi kepada Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) sebagai lembaga riset yang berpengalaman dalam bidang kajian sosial keagamaan di Aceh untuk melakukan riset evaluasi tersebut.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa program da'i perbatasan ini cukup penting artinya disebabkan daerah perbatasan perlu mendapat perhatian khusus karena. *Pertama*, daerah perbatasan sering termarginalkan dalam proses pembangunan termasuk pembangunan bidang keagamaan, baik aspek jarak dari pusat pemerintah maupun kebijakan pemerintah yang tidak mengacu pada peningkatan kemampuan masyarakat

perbatasan. *Kedua*, sumber daya manusia di daerah perbatasan, khususnya tentang pengetahuan agama dianggap masih rendah. *Ketiga*, kabupaten perbatasan Aceh merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran dan para misionaris.

Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab DSI Aceh kami berharap; *Pertama*, program ini tidak boleh berhenti, apalagi secara yuridis itu amanah UUPA, bahwa pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota bertanggungjawab untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh.

*Kedua*, secara filosofis pentingnya dai perbatasan, karena pembinaan akidah, praktik ibadah, pembinaan moral, adalah ajaran pokok dari agama yang harus dimiliki oleh setiap pribadi Muslim.

*Ketiga*, terkait aspek sosiologis, tantangan Muslim ke depan itu semakin berat, termasuk di perbatasan. Bisa datang dari dalam (intern) masyarakat Muslim sendiri, pun dari luar masyarakat Muslim. Karena itu, pemahaman agama yang baik, damai dan toleran itu harus menjadi entitas masyarakat Muslim di era modern. Muslim harus memahami dirinya, dan ajaran agamanya untuk meningkatkan kemampuan interaksi di era modern.

Jadi, harapan saya ke depan, Pemerintah Aceh dan kita semua, harus memberikan perhatian serius untuk program da'i perbatasan, yang juga program andalan DSI, guna menjaga

harkat dan martabat orang Aceh. Hal ini terkait tiga amanah penting ajaran syariah, amanah UU, dan ini juga amanah dari kultur Aceh sendiri. Jadi, siapapun yang akan memimpin Aceh ke depan, harus terus memelihara tiga amanah penting ini. Kalau tidak, kita akan terus mundur ke belakang. Karena itu, kita akan terus mendukung, apalagi masyarakat itu hanya ada di wilayah kabupaten, bukan di provinsi. Kumpul kabupaten/kota jadi provinsi, dan ini juga kerja untuk masyarakat kita di setiap kabupaten/kota sebenarnya.

*Last but not least, “tak ada gading yang tak retak”,* kami berharap semoga penelitian ini bermanfaat adanya, dan mampu menjadi bahan ilmiah untuk kebijakan terkait dengan format Da’i perbatasan pada khususnya dan Syariat Islam pada umumnya di masa yang datang. Karena setiap kebijakan harus berbasis riset, sekecil apapun riset tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak kepada PKPM yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Sekian semoga hasil kerja ini bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin.[]

Banda Aceh, 28 Oktober 2015

Kepala DSI Aceh

**Prof. Dr. Syahrizal Abbas,**

**MA**

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas dan evaluasi program Da'i perbatasan di Aceh dengan pertanyaan utama yang ingin dikaji yaitu; bagaimana eksistensi, efektivitas dan format da'i perbatasan dalam mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data; observasi, studi dokumen, wawancara mendalam dan angket. Adapun teknik analisis data untuk data kuantitatif dengan menggunakan SPSS sedangkan tiga teknik lainnya dengan memakai triangulasi analisis kualitatif. Lokasi penelitian ada tiga Kabupaten; Tamiang, Singkil dan Aceh Tenggara di antara enam kabupaten. Da'i Perbatasan berperan untuk mengadakan pengajian, baik terkait dengan al-Quran maupun ilmu-ilmu keislaman lainnya; fiqih, tauhid, membina masyarakat, menghidupkan masjid dan *meunasah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Da'I Perbatasan cukup efektif dan memberi dampak pada masyarakat yaitu; penguatan aqidah dalam mengkal Kristenisasi dan aliran sesat; menjaga kerukunan antar umat beragama; menambah pemahaman keagamaan, membina Majelis Taklim, remaja Mesjid dan TPA, memakmurkan masjid dan meunasah, menghidupkan hari-hari besar Islam dan Syi'ar Islam serta agen perubahan sosial ekonomi. Mengenai masalah tantangan dan kendala yaitu; perbedaan pemahaman keagamaan; perbedaan etnis dan budaya; kondisi geografis; fasilitas da'i; gerakan Kristenisasi; kehadiran da'i di tempat. Mengenai masalah kehadiran da'i ditempat menjadi masalah di Singkil dan Aceh Tenggara, yang harus dilakukan adalah memaksimalkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh DSI Aceh dan Kabupaten untuk memastikan da'i perbatasan untuk hadir dan melaksanakan peran dan tugasnya. Sedangkan sebagai rekomendasi perlu dilakukan perubahan para pola rekrutmen, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta menjadi Da'i Perbatasan sebagai program unggulan Dinas Syari'at Islam Aceh.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Evaluasi, Da'i Perbatasan dan Aceh*



## DAFTAR ISI

**Pengantar Kepala Dinas Syari’at Islam Aceh\_\_\_\_\_ii**

**Abstrak\_\_\_\_\_iv**

**Daftar Isi\_\_\_\_\_v**

### **BAB I PENDAHULUAN\_\_\_\_\_1**

A. Latar Belakang\_\_\_\_\_1

B. Rumusan Masalah\_\_\_\_\_7

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan\_\_\_\_\_8

### **BAB II KAJIAN TEORITIS\_\_\_\_\_9**

A. Tinjauan Pustaka\_\_\_\_\_9

B. Kerangka Teoritis\_\_\_\_\_12

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN\_\_\_\_\_21**

A. Pendekatan Penelitian\_\_\_\_\_21

B. Populasi dan Sampel\_\_\_\_\_22

C. Teknik Pengumpulan Data \_\_\_\_\_24

D. Teknik Analisis Data\_\_\_\_\_28

### **BAB IV HASIL PENELITIAN\_\_\_\_\_32**

A. Eksistensi Da’i Perbatasan dalam Mendukung Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh\_\_\_\_\_32

1. Latar Belakang Munculnya Program Da’i Perbatasan\_\_\_\_\_32

2. Profil Da’i Perbatasan\_\_\_\_\_36

3. Pengembangan Kapasitas Da’i Perbatasan\_\_\_\_\_44

4. Peran dan Tugas Da’i Perbatasan\_\_\_\_\_47



B. Efektivitas Program Da'i Perbatasan dalam Menjalankan Tugas, Peran dan Fungsinya\_\_\_\_\_54

1. Respon Masyarakat terhadap Tugas, Peran dan Fungsinya\_\_\_\_\_54
2. Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan Da'i Perbatasan\_\_\_\_\_62
3. Tantangan dan Kendala Da'i Perbatasan\_\_\_\_\_69
4. Upaya Menghadapi Tantangan dan Kendala\_\_\_\_\_79
5. Efektivitas dan Dampak Program Da'i Perbatasan\_\_\_\_\_82

C. Format Pengembangan Program Da'i Perbatasan Ke Depan\_\_\_\_\_97

1. Sistem Rekrutmen Da'i Perbatasan\_\_\_\_\_97
2. Pola Penempatan Da'i Perbatasan\_\_\_\_\_103
3. Pola Pembayaran dan Fasilitas Pendukung\_\_\_\_\_110
4. *Reward* (penghargaan) *Punishment* (sanksi) \_\_\_\_\_115
5. Peningkatan Kapasitas Kemampuan SDM\_\_\_\_\_120
6. Mekanisme Pelaporan\_\_\_\_\_125
7. Pola Koordinasi Lintas Sektoral\_\_\_\_\_129
8. Sistem Monitoring dan Evaluasi\_\_\_\_\_136
9. Format Ideal Peran dan Fungsi Da'i Perbatasan ke depan\_\_\_\_\_151

**BAB V PENUTUP\_\_\_\_\_159**

- A. Kesimpulan\_\_\_\_\_159
- B. Rekomendasi\_\_\_\_\_160

**Daftar Pustaka\_\_\_\_\_164**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama dakwah yang mengajak manusia pada jalan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran (*amar makruf nahi mungkar*).<sup>1</sup> Dakwah dapat diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan dengan cara mengajak orang untuk beriman atau memeluk agama Islam.<sup>2</sup> Seorang Muslim memiliki kewajiban untuk tidak hanya mengajak tetapi juga menuntun, menyeru dan mengajarkan ajaran Islam,<sup>3</sup> kepada siapa pun termasuk kepada non Muslim. Ajakan tersebut dengan jalan yang baik, *bil hikmah, mauizhah* dan dengan yang komunikasi efektif.

Problema penerapan syari'at Islam tidak hanya pada implementasi dan sosialisasi qanun, akan tetapi daerah-daerah perbatasan yang memiliki jumlah penduduk non Muslim yang cukup signifikan. Misalnya, Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Simeulu, Aceh Selatan menjadi salah satu masalah yang cukup serius terutama terkait dengan isu pendangkalan akidah dan Kristenisasi. Karena dalam

---

<sup>1</sup>Jasafat dkk., *Dakwah Media Aktuliasasi Syari'at Islam*,(Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), h. 1.

<sup>2</sup>Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: PLP2M, 1983), h. 2.

<sup>3</sup>Abdullah, *Wawasan Dakwah: Kajian Epistemologi, Konsepsi, dan Aplikasi Dakwah*,(Medan: IAIN Press, 2002), h. 12.

metodologi ilmu dakwah maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kajian ini yaitu; materi dakwah, obyek dakwah, metode dakwah, efek dakwah dan wilayah dakwah.<sup>4</sup> Untuk mencapai kesuksesan dalam dakwah di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan tantangan global dan kontemporer.

Isu utama dalam konteks ini yaitu pendangkalan akidah dan kristenisasi, respon yang dilakukan oleh pemerintah Aceh adalah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) Provinsi Sumatera Utara pada 3 Nopember 2011. MoU ini untuk memupuk dakwah di daerah perbatasan kedua provinsi tersebut. Pelaksana tugas (Plt.) Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho mengatakan, pembinaan dakwah di perbatasan tersebut sangat penting. Sebab, selain memberikan pemahaman agama dan perbaikan moral yang terlihat mulai menurun di perbatasan. Ini juga penting untuk mempererat kedua provinsi tersebut sebagai satu kesatuan.<sup>5</sup>

Program da'i perbatasan yang diluncurkan Dinas Syari'at Islam terus diimplementasikan secara komprehensif meskipun menuai berbagai tantangan. Tugas utama da'i perbatasan menurut Kepala Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i Dinas Syari'at Islam, Nasruddin Ibrahim, M.Ag adalah mencegah upaya pendangkalan akidah. Da'i perbatasan juga bertugas untuk mengadakan pengajian, baik terkait dengan al-Quran maupun ilmu-ilmu keislaman lainnya; fiqih, tauhid dan sebagainya; demikian pula ceramah agama.

---

<sup>4</sup>Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 32-42.

<sup>5</sup>Sumut-Aceh Bina Dakwah Diperbatasan, (Waspada, 4 Nopember 2011).

Masalah pendangkalan akidah ini menjadi problem serius, karena sudah beberapa kasus terjadi, misalnya; kasus di Aceh Tenggara sebagaimana diungkapkan oleh Ketua MPU Tgk. Hasanuddin Mendabe, terjadi penyebaran buku yang berjudul, “Kehidupan Yang Memuaskan Bagaimana Memperolehnya”. Buku tersebut ayat-ayat al-Kitab non-Muslim menjadi bukti kuat adanya upaya pendangkalan akidah.<sup>6</sup>

Selain di Aceh Tenggara, di Singkil sebagaimana dikemukakan oleh Salihin Mizal bahwa upaya Kristenisasi cukup masih. Hal ini dapat dilihat dengan cara menawarkan bantuan sosial berupa makanan, indomei, gula, obat-obatan, pakaian bekas, alat pertanian (bibit, pupuk, obat serangga). Sesuah umat Islam merasa berhutang budi, kemudian mereka diajak untuk dibaptis. Realitas ini terjadi di Kecamatan Danau Paris dan Simpang Kanan.<sup>7</sup>

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga sampai saat ini, sudah banyak para *muallaf* yang dihasilkan dari kinerja para da'i perbatasan tersebut dan jumlahnya sudah mencapai ratusan bahkan hampir ribuan, jumlah ini hanya baru di wilayah Kota Subulussalam dan Aceh Singkil saja. Da'i perbatasan ini memang jarang terdengar, bahkan di telinga rakyat Aceh sendiri, karena mereka bertugas hanya di daerah yang berbatasan langsung dengan Sumtera Utara. Jadi, mereka hanya lebih dikenal oleh orang yang tinggal di perbatasan Aceh saja. Daerah yang berbatasan langsung dengan propinsi Sumatra Utara tersebut yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam,

---

<sup>6</sup>Da'i Perbatasan Harus Cegah Pendangkalan Akidah, (*Serambi Indonesia*, 30 Nopember 2014).

<sup>7</sup>Salihin Mizal, *Dakwah di Perbatasan Singkil-Sumut: Studi terhadap Proses Kristenisasi di Kab. Aceh Singkil*, (Banda Aceh: Tesis Pascasarjana, 2014) h. 76-77.

Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang. Empat kabupaten kota inilah para da'i tersebut ditugaskan dan mereka biasanya mendapat kontrak dua tahun. Setelah masa kontrak selesai, maka bisa mengajukan tes ulang bila ingin melanjutkan kinerja sebagai da'i untuk tahun berikutnya.<sup>8</sup>

Sejak diaplikasikan da'i perbatasan telah melakukan tugas dakwah meski berjalan lambat tapi dapat disebut sukses. Buktinya, menurut beberapa da'i perbatasan, banyak Mesjid yang dahulu “mati”, kini menjadi lebih hidup. TPA-TPA pun banyak bermunculan dan yang paling menonjol adalah banyaknya warga sekitar yang ingin menjadi Muslim (*Muallaf*). Misalnya, Aceh Singkil dan Subulussalam, meski perkembangan dakwahnya sangat pesat, tapi sesungguhnya pemerintah Aceh masih berjalan lambat. Kita harus sadar bahwa saat ini beberapa wilayah tersebut telah didominasi oleh warga Kristen pribumi maupun yang berasal dari Sumatera Utara dan telah menjadi warga menetap di situ. Beberapa desa disana menurut salah seorang da'i, Tgk. Jamaluddin jumlah umat Islamnya hanya tinggal sekitar 20 persen saja dan desa-desa seperti ini sudah lumayan banyak.

Karena itu Pemerintah Aceh bersama dengan Kementerian Agama maupun ormas-ormas Islam lainnya tidak hanya mengirim da'i dan penyuluh saja ke daerah perbatasan untuk mempertahankan Aceh yang dikental dengan agama Islamnya yang kuat. Di samping itu juga menampung warga disana yang telah menjadi *Muallaf*

---

<sup>8</sup> <http://samanui.wordpress.com/2009/04/13/da%E2%80%99i-perbatasan-dan-pengaruhnya-terhadap-masyarakat-di-aceh/> diakses, 20/12/2014.

dalam sebuah lembaga pendidikan. Mereka yang *Muallaf* dapat dibina di pesantren khusus mengingat pengetahuan Islam bagi mereka harus diberikan dari dasar, atau juga dengan mengirim mereka ke pesantren-pesantren yang sudah ada, tapi anggarannya ditanggung oleh Pemerintah Aceh, Kemenag maupun oleh Baitul Mal. Pemerintah harus serius mengurusnya jika memang merasa bertanggung jawab dengan keberislaman warganya. Sebab, tidak mustahil kabupaten-kabupaten di Aceh yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara suatu saat akan menjadi *markaz* besar umat non Islam. Kita sesungguhnya bukan takut atau resisten dengan umat non Islam, karena sebagai bangsa, kita telah membuktikan bahwa Aceh adalah sebuah bangsa yang toleran dan bisa hidup harmonis dengan umat non Islam.<sup>9</sup>

Kendati demikian, ditengah beratnya tantangan dakwah di daerah perbatasan, sebagai contoh salah seorang da'i perbatasan di Singkil, Tgk. Jamaluddin melihat prospek yang sangat cerah dakwah di daerah perbatasan. Ia mengatakan, semenjak mulai berdakwah kepada umat Islam, sudah sangat banyak umat non Muslim yang kemudian menyatakan ketertarikan mereka pada kepindahan agama Islam. Tgk Jamaluddin pun tidak jarang berperan langsung mensyhadatkan mereka bersama warga setempat. Bahkan, tidak jarang warga datang kepadanya membawa serta keluarga mereka meminta agar disekolahkan. Ia pun kemudian mencari jalan dengan menghubungi pimpinan-pimpinan dayah di Aceh Besar dan Aceh Utara yang siap menampung para *muallaf* usia sekolah.

---

<sup>9</sup><http://www.fimadani.com/menyelamatkan-islam-di-perbatasan-aceh-sumatera-utara> diakses, 20/12/2014.

Di Singkil sudah mulai terjadi perkembangan terkait dengan dakwah. Banyak anak-anak muslim yang sekarang sudah pandai membaca Al-Quran dan menjalankan ibadah. Sementara warga non Muslim disana, menurut Tgk. Jamaluddin juga sangat respek pada ajaran Islam. Namun pembinaan kepada mereka yang masih kurang dan serius. Setelah mereka masuk Islam, pemerintah tidak menyediakan program khusus untuk pembinaan *muallaf* dari perbatasan. Padahal mereka seharusnya dapat dipersiapkan sebagai persiapan perbendaharaan da'i yang akan memperkuat dakwah di perbatasan di masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Sejalan dengan itu, menurut Abdul Rani bahwa da'i perbatasan telah berperan dalam membina masyarakat melalui pemberdayaan fungsi Masjid dan Meunasah sebagai pusat kegiatan keagamaan umat. Membentuk remaja mesjid, membentuk majelis taklim, membentuk kelompok pelaksanaan fardhu kifayah, mengaktifkan TPA, menetralsir konflik rumah tangga dan pembinaan *muallaf*.<sup>11</sup>

Untuk memperkuat program da'i perbatasan maka pada Agustus 2014 Dinas Syari'at Islam provinsi Aceh menempatkan 150 orang da'i di enam daerah terpencil dan daerah perbatasan Aceh. Ke enam daerah itu masing-masing kabupaten Singkil 38 orang, Kota Subulusalam 15 orang, Kabupaten Aceh Tenggara 40 orang, Kabupaten Aceh Tamiang 30 orang, Kabupaten Simeulu 17 orang dan Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 10 orang. Khusus untuk 20 da'i perbatasan di Simeulue, akan

---

<sup>10</sup>Zulkhairi, Cerita Da'i Perbatasan di Pelosok Aceh Singkil, Prospek Dakwah Sangat Cerah dalam [www.kemenag.aceh.go.id](http://www.kemenag.aceh.go.id). Diakses, 20/12/2014.

<sup>11</sup> Abdul Rani, *Problematika Da'i Perbatasan Aceh dalam Pembinaan Masyarakat* (Banda Aceh: Pascasarjana, 2013), h. 123.

datang tim dari DSI Aceh untuk meningkatkan pembinaan di DSI Simeulue. Memang diakui bahwa kendala dihadapi para da'i di perbatasan selama ini, antara lain sarana dan prasarana ibadah terbatas, pemahaman agama masyarakat masih rendah, dan tidak semua yang disampaikan dapat diterima warga.<sup>12</sup>

Karena itu, ia meminta para da'i ini proaktif tidak hanya mengajarkan pendidikan agama, namun juga membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, semisal peternakan, perikanan, dan perkebunan. Da'i juga harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, di samping tujuan utama mereka berdakwah. Sebelum mereka dikirim ke daerah terlebih dahulu dilatih dengan berbagai keterampilan. Misalnya da'i diajarkan cara membuat proposal untuk usaha mikro agar kehidupan masyarakat di gampong lebih baik. Saat kembali lagi ke daerah masing-masing, para da'i ini juga diharapkan dapat memetakan potensi masyarakat yang dapat didorong untuk membentuk kelompok-kelompok pertanian, dan menyusun strategi dakwah yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, para da'i perbatasan ini lebih peka untuk mencegah aliran-aliran sesat.<sup>13</sup>

Terkait dengan latar belakang tersebut diatas, program da'i perbatasan merupakan masalah yang cukup penting apalagi mereka berada di garda depan menyangga daerah perbatasan Aceh dari upaya pendangkalan akidah, Kristenisasi

---

<sup>12</sup>Dinas Syari'at Islam Tingkatkan Kualitas 150 Da'i Perbatasan Aceh, (*Serambi Indonesia*, 13 Agustus 2014).

<sup>13</sup>Dinas Syari'at Islam Tingkatkan Kualitas 150 Da'i Perbatasan Aceh, (*Serambi Indonesia*, 13 Agustus 2014).



maupun maksud-maksud lain yang melemahkan syari'at Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan kajian sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah dibawah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana eksistensi dai perbatasan dalam mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh?
2. Bagaimana efektivitas program da'i perbatasan dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya?
3. Bagaimana format pengembangan program da'i perbatasan ke depan dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan tentang eksistensi dai perbatasan dalam mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh;
2. Menemukan dan menjelaskan efektivitas program da'i perbatasan dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya;
3. Mencari format pengembangan program da'i perbatasan ke depan dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.



## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Salah satu faktor yang sangat penting diperhatikan dan menentukan keberhasilan sebuah penelitian adalah kajian pustaka. Kegiatan ini melibatkan keaktifan peneliti dalam mendapatkan berbagai informasi awal dan juga aspek-aspek apa saja yang sudah pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya dalam kaitannya dengan topik yang dibahas. Kajian kepustakaan ini dilaksanakan setidaknya untuk menunjukkan dua hal. *Pertama*, untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan didukung oleh rujukan yang memadai dan; *kedua*, menunjukkan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang persis sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Sejalan dengan penelitian ini, terdapat beberapa tulisan dan penelitian terdahulu yang berhubungan dakwah dan penerapan syari'at Islam umumnya dan tentang da'i perbatasan khususnya.

M. Jakfar Puteh dan Saifullah (ed.) yang berjudul *Dakwah Tekstual dan Kontekstual*, 2001.<sup>1</sup>Kedua penulis menjelaskan beberapa landasan konseptual dan gerakan dakwah. Secara panjang lebar, buku yang terdiri dari beberapa artikel yang

---

<sup>1</sup>M. Jakfar Puteh dan Saifullah (ed), *Dakwah Tekstual dan Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

bertemakan dakwah ini telah menyinggung banyak hal mengenai dakwah meliputi etika, metode, strategi dan peran dakwah sebagai sebuah media dalam menuntun ummat kearah terwujudnya transformasi sosial dimana ajaran Islam menjadi acuan utamanya. Menarik buku ini juga sempat mengupas tentang legalitas dan kredibilitas da'i sebagai agent utama kegiatan dakwah. Sekali lagi meskipun buku ini telah menuliskan aspek-aspek urgen dalam dunia dakwah, namun secara khusus buku ini tidak menyinggung tentang da'i perbatasan.

Berikutnya buku Zaki Fuad Khalil dkk, yang berjudul *Melihat Syari'at Islam dari Berbagai Dimensi*, 2007.<sup>2</sup> Pada bagian awalnya, juga telah membahas tentang peran dakwah dalam upaya implementasi syari'at Islam dalam masyarakat. Buku ini telah menggambarkan beberapa derivasi terpenting mengenai hubungan syari'at Islam dan dakwah yang meliputi gerakan, metode dan sistem dakwah Islam. Dalam bagian lain dari buku ini juga telah menguraikan bahwa implemetasi Syari'at Islam pada hakikatnya adalah proses dakwah. Secara umum buku ini telah sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa antara penerapan syari'at Islam dan dakwah merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Meskipun buku ini telah membahas aspek kolerasi dakwah dan syari'at Islam namun buku ini tidak menyinggung secara langsung mengenai program da'i perbatasan.

---

<sup>2</sup>Zaki Fuad Khalil dkk, *Melihat Syari'at Islam dari Berbagai Dimensi*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007).

Jasafat dkk, dalam buku *Dakwah Media Aktualisas Syari'at Islam*, 2011.<sup>3</sup> Secara spesifik membahas tentang peranan dakwah sebagai sebuah media dalam mengsosialisasikan dan mengaktualisasikan syari'at Islam di Aceh. Dalam buku ini secara cermat telah memetakan tentang dinamika pelaksanaan dakwah di Aceh dalam kaitanya dengan pemberlakuan syari'at Islam berikut tantangan-tantangan yang dihadapi. Menyambung tentang beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Syari'at Islam ini, Abidin Nurdin dkk, dalam bukunya *Syari'at Islam dan Isu-isu Kontemporer*, 2011,<sup>4</sup> telah membentangkan beberapa persoalan besar tantangan yang sering dihubungkan dengan penerapan syari'at Islam seperti, Syari'at Islam dan isu liberalisme, isu Hak Asasi Manusia, isu minoritas dan kesetaraan gender. Meskipun kedua buku di atas telah membahas tentang peran dakwah dalam aktualisasi syari'at Islam, namun secara khusus belum pernah menyentuh tentang keberadaan program da'i perbatasan.

Khusus mengenai dakwah diperbatasan, Salihin Mizal dalam tesisnya yang berjudul, *Dakwah Di Perbatasan Singkil-Sumut (Studi Terhadap Proses Kristenisasi Di Kabupaten Singkil)*, 2014.<sup>5</sup> Penelitian ini mengkaji keberadaan Dakwah di perbatasan Singkit-Sumut berhadapan dengan tantangan Kristenisasi di sana. Buku

---

<sup>3</sup>Jasafat dkk, *Dakwah Media Aktualisas Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011).

<sup>4</sup>Abidin Nurdin dkk, *Syari'at Islam dan Isu-isu Kontemporer*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011).

<sup>5</sup>Salihin Mizal, "Dakwah Di Perbatasan Singkil-Sumut (Studi Terhadap Proses Kristenisasi Di Kabupaten Singkil)", *Tesis* (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2014).

ini telah menggambarkan sebuah fenomena tantangan Syari'at Islam di perbatasan Aceh Singkil, namun karena lebih terfokuskan pada kegiatan kristenisasi maka tidak menggambarkan secara keseluruhan tantangan dan dinamika tentang da'i perbatasan secawa konfrehensif.

Dari kajian kepustakaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kajian yang secara khusus membahas tentang efektivitas dan evaluasi program da'i perbatasan di Aceh belum pernah dilakukan. Dari kenyataan ini maka sebuah kajian yang meneliti tentang efektifitas dan evaluasi program da'i perbatasan merupakan kajian yang menarik dan penting dilakukan. Kajian ini dapat dimaknai sebagai sebuah evaluasi keberhasilan penerapan syari'at Islam secara kafah secara umum dan keberhasilan program da'i perbatasan secara khusus. Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi dasar penentuan kebijakan dari perbatasan untuk masa-masa selanjutnya.

## **B. Kerangka Teoritis**

Pada awal pelaksanaan Syari'at Islam secara formal di Aceh, Pemerintah Aceh mencanangkan "Program Da'i Perbatasan" yang ditempatkan di beberapa daerah perbatasan yang cukup riskan. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah memperkuat aqidah umat di tengah-tengah isu misionaris dan pemurtadan yang marak terjadi di Aceh yaitu di daerah perbatasan Sumatera Utara. Beberapa tahun terakhir ini, isu tersebut menjadi kenyataan bahkan di jantung kota Provinsi Aceh

sekalipun. Tidak sedikit putra putri Aceh yang terjebak dalam pemurtadan dan aliran-aliran sesat yang sangat meresahkan orang tuanya. Pada akhirnya, mereka harus disyahadatkan kembali oleh MPU Provinsi Aceh.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Aceh melihat ada upaya misionaris yang berusaha mempengaruhi aqidah sebagian warga masyarakat yang mempunyai pengetahuan keagamaan lemah, terutama sekali di wilayah dan daerah-daerah perbatasan Aceh. Mengantisipasi hal ini, Pemerintah Aceh menempatkan sejumlah da'i di daerah-daerah tersebut. Tugas utama da'i perbatasan ini adalah mengajak orang-orang kepada jalan yang benar, mengadakan pengajian bagi kaum bapak dan kaum ibu serta para anak muda. Para da'i ini juga harus menguasai berbagai persoalan dan pendekatan apalagi jika harus berhadapan dengan warga di luar Islam, sudah tentu di butuhkan kebijakan dan strategi yang mumpuni sehingga para non-muslim yang tinggal di perbatasan ini tertarik kepada ajaran Islam dengan hati yang ikhlas.

Program da'i perbatasan yang sudah berlangsung sejak pasca tsunami dalam konteks kebijakan tidak hanya dipahami dari peningkatan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat setempat, tetapi lebih luas lagi mampu membentuk perilaku dan karakter sesuai dengan nilai agama dan budaya masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi falsafah kehidupan ajaran agamanya. Hal ini tentunya tidak lepas dari misi awal program ini untuk membebaskan anak-anak Aceh dari isu-isu pemurtadan dan pendangkalan aqidah. Kemudian juga untuk menanamkan nilai-nilai akhlak, dan tatacara beribadah yang benar. Karenanya, pelaksanaan program ini terutama sekali

diperuntukkan bagi masyarakat yang rentan terhadap isu pemurtadan dimaksud. Realitas di lapangan memang memperlihatkan tidak sedikit warga masyarakat yang tergiur dengan misi misionaris yang mempunyai target tertentu di Aceh. Karenanya, tidak dapat dipungkiri bahwa program ini sangat bermanfaat dan perlu ada upaya peningkatan da'i baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan generasi Aceh masa depan yang mempunyai landasan iman yang kuat dan memahami nilai-nilai Islam secara sempurna.

Mencermati kebijakan tersebut, konsep efektivitas program da'i perbatasan menjadi pintu masuk untuk dapat memahami lebih jauh lagi tata kebijakan program da'i perbatasan yang telah berjalan sekarang ini. Kedua bangunan konsep ini menjadi pijakan awal untuk dapat menerjemahkan secara efektif dan efisien pelaksanaan program da'i perbatasan di tengah pelaksanaan syari'at Islam itu sendiri. Kata Efektivitas merupakan kata sifat dari kata efektif yang bermakna ada efeknya (pengaruh, akibat, kesan) yang dapat membawa hasil, berhasil guna. Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan efektif berarti dapat membawa hasil guna atau tepat guna.<sup>6</sup> Dalam kamus Inggris-Indonesia karangan Echols dan Shadily, *Efektivitas* berasal dari kata "*Effective*", yang artinya "*Berhasil*" atau "*Ditaati*".<sup>7</sup> Selanjutnya Dunn, dalam konteks evaluasi analisis kebijakan, memberikan kriteria tentang hasil-

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 961.

<sup>7</sup> John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia 2003), h. 207.



hasil pelaksanaan kebijakan, yaitu: Efektivitas, sejauh mana hasil yang diinginkan dapat dicapai efisiensi, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.<sup>8</sup> Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok tertentu. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan, benar-benar berguna atau bernilai.

Pada sisi lain efektif sering juga diartikan sebagai unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Cambel J.P<sup>9</sup> menyebutkan model pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *input* dan *output*

---

<sup>8</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h. 640.

<sup>9</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).

## 5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Berpijak pada beberapa pandangan di atas, efektivitas merupakan salah satu kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan tujuan atau sasaran sebagaimana yang diharapkan. Sesuatu dapat dikatakan efektif jika dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (telah direncanakan) sebelum melakukan berbagai program yang terkait dengan aspek tersebut. Dengan mengacu kepada pandangan ini, program da'i perbatasan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Aceh memiliki berbagai tujuan pokok, diantaranya memperkecil ruang gerak misionaris yang mempunyai target tertentu di Aceh, memperkuat keimanan, memperbaiki moral serta mengajarkan cara-cara beribadah kepada Allah Swt.

Tercapainya program ini tidak dapat dilepaskan dari konsistensi para da'i yang melaksanakan kegiatan yang mulia ini walaupun dengan tantangan yang tidak ringan. Faktanya ada da'i yang mengundurkan diri di tengah jalan karena tugas yang diemban sangat berat tidak sebanding dengan honor yang mereka terima setiap bulannya. Pemerintah Aceh berharap, pelaksanaan program da'i perbatasan ini dapat berjalan dengan efektif dan tepat guna bagi masyarakat setempat. Tetapi efektifitas itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal, eksternal dan juga pola pendekatan dari para da'i itu sendiri. Faktor internal berupa kondisi fisik dan jasmani dari para da'i itu sendiri (kultur). Faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh aspek lingkungan di luar para da'i itu sendiri (struktur). Sedangkan pendekatan lebih terfokus untuk melihat strategi yang digunakan para da'i dalam proses

pelaksanaannya di lapangan yang berlangsung selama ini. Dengan demikian ke semua faktor tersebut merupakan instrumen akademik untuk dapat mensinergikan keefektifan program da'i perbatasan di tengah penguatan syari'at Islam di masyarakat Aceh.

Selain memahami konsep keefektifan kebijakan program da'i perbatasan, studi ini juga didukung oleh teori pembentukan karakter SDM. Pendekatan ini nantinya akan dapat menggambarkan secara lebih komprehensif dari tujuan pelaksanaan program da'i perbatasan. Karakter dapat diartikan sebagai bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, prilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen dan watak seseorang. Karakter dalam pengertian ini menandai dan memfokuskan pengaplikasian nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Orang-orang yang tidak mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan tentu saja berkarakter jelek, sedang yang mengaplikasikannya berkarakter mulia. Kriteria manusia, warga masyarakat dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum didasarkan pada nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya itu sendiri. Oleh karena itu, hakekat dari pembentukan pendidikan karakter mengarah pada pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya sendiri serta nilai-nilai dari ajaran agama, dalam rangka membina generasi muda.

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut

didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang yakni meningkatnya kenakalan para remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal dan informal dan program-program pemerintah sebagai wadah yang diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter. Pembinaan karakter masyarakat lewat program pembangunan seperti da'i perbatasan yang telah dicanangkan pemerintah Aceh merupakan salah satu tindak lanjut dari konsep pembangunan yang bertujuan menyiapkan SDM dan generasi Aceh yang handal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

SDM merupakan salah satu sumber daya pembangunan bangsa. Bahkan SDM, merupakan salah satu sumber daya terpenting di samping sumber daya alam, iptek dan sumber daya lainnya dalam pembangunan suatu bangsa. Tanpa SDM tidak mungkin dapat dilakukan suatu kegiatan, termasuk pembangunan. Apabila dikaji secara lebih mendalam seyogyanya pembangunan yang dilakukan oleh SDM semata-mata ditujukan untuk kepentingan SDM itu sendiri. Pada hakikatnya, SDM yang dimiliki suatu bangsa sebenarnya merupakan bangsa itu sendiri. Jadi, salah satu syarat utama terlaksananya realisasi pembangunan akan terkait dengan tersedianya SDM yang mencukupi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Aspek Kuantitatif melihat SDA dan SDM dari indikator fisik material, yaitu jumlah kekayaan SDM dan

besarnya SDM dalam suatu wilayah. Artinya, daerah yang memiliki SDA dan SDM dalam jumlah besar dan banyak memiliki potensi besar dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan aspek kualitatif, melihat SDA yang ada adalah memiliki nilai ekonomi tinggi, dan SDM adalah perangkat lunak yang mempengaruhi SDM berupa keahlian dan penguasaan terhadap iptek<sup>10</sup>.

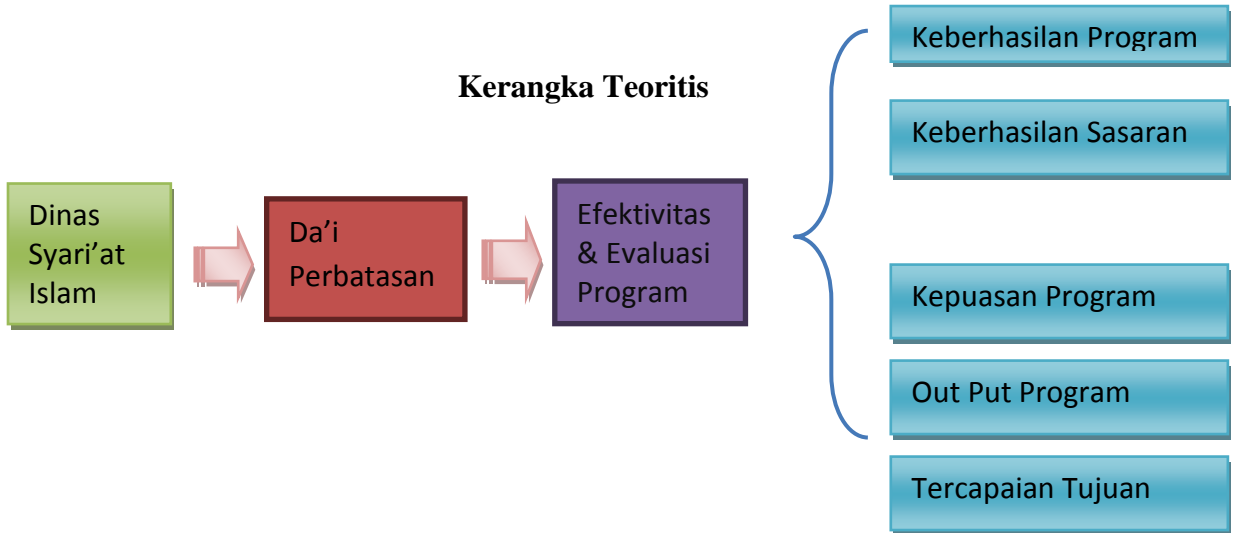
Terkait dengan tugas dan fungsi da'i perbatasan yang telah dibebankan kepada para da'i jelas tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mewujudkannya. Karena antara *dassein* (teori) dan *dassolen* (aplikasi) sering berbalik dan bertentangan seperti bumi dan langit. Namun usaha dan perbaikan untuk menjalankan tugas dan perannya ke arah yang lebih baik terus dilakukan. Karena itu saat ini evaluasi mengenai aplikasi program tersebut menjadi cukup krusial dan memberikan makna yang dalam untuk melihat dan menganalisis eksistensi, efektivitas dan format ideal di masa yang akan datang. Mengenai kerangka teoritis dapat dilihat dari skema tersebut dibawah ini;

---

<sup>10</sup> Suyadi Prawirosentono, *Model Pembangunan Sumber Daya Manusia Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta: BPFE, 1995).

## Skema

### Kerangka Teoritis



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diperoleh dari studi pendahuluan, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup> Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Untuk analisis kualitatif lebih diarahkan mengetahui lebih mendalam bagaimana efektifitas dan dampak dari program Da'i perbatasan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tenggara, Seumelu, Kota Subulussalam, Aceh Tamiang dan Aceh Singkil. Evaluasi program tersebut dilakukan dengan melihat kesesuaian antara tujuan awal program Da'i perbatasan yang direncanakan. Evaluasi meliputi:

---

<sup>1</sup>N K. Denzin & Lincoln, Yvonna S. *Handbook of Qualitative Research (second edition)*, (Thousand Oaks, Sage Publication, Inc. 2009), h.5.

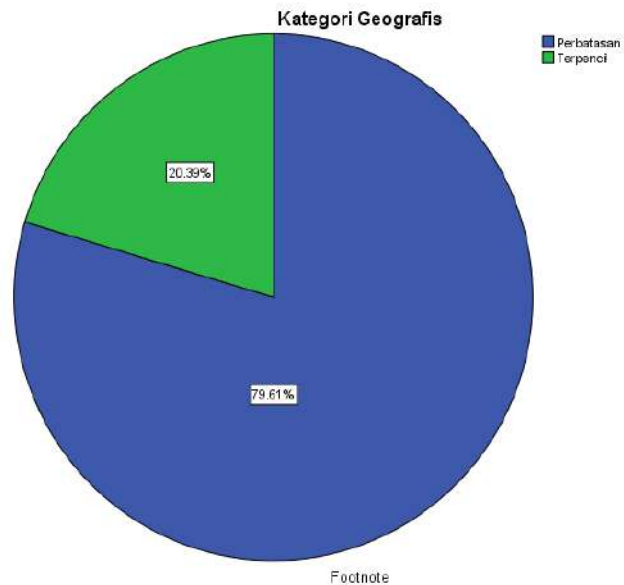
<sup>2</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 7.

- a. Perencanaan program;
- b. Tujuan Program;
- c. Implementasi Program;
- d. Pengukuran hasil yang telah dicapai;
- e. Analisis hasil dan menyesuaikan dengan tujuan awal.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dasar untuk melakukan *needsassessment* kegiatan sebagai kelanjutan program da'i perbatasan wilayah lain dalam Provinsi Aceh.

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi<sup>3</sup> yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh pusat kegiatan Da'i perbatasan di Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Tamiang. Namun mengingat begitu banyaknya populasi tersebut maka dipilih beberapa



<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IX, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 102.



kecamatan yang akan dijadikan sebagai sampel, khususnya kecamatan dan desa yang menjadi *home base* dari da'i perbatasan tersebut.

Untuk *need asesment* dilakukan dengan melakukan observasi dan pengumpulan informasi di tiga Kabupaten tersebut. Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian ini. Pada penelitian ini akan digunakan *judgement sampling*. Metode ini dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa informan adalah pihak yang paling tepat untuk dijadikan objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) Kabupaten yaitu: Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Tamiang. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan:

**Tabel I**  
**Lokasi Penelitian**

<b>No</b>	<b>Lokasi Penelitian</b>	<b>Alasan Pemilihan Lokasi</b>
1	Aceh Tenggara	Kabupaten Aceh Tenggara telah menerapkan program da'i perbatasan karena jumlah penduduk non Muslim di Aceh lebih banyak di daerah tersebut, sehingga da'i yang ditempatkan oleh Dinas Syariat Islam juga

		paling banyak dibandingkan di wilayah lain. Aceh Tenggara berbatasan langsung dengan Wilayah Sumatera Utara.
2	Aceh Singkil	Aceh Singkil, hampir sama dengan Aceh Tenggara dari segi jumlah penduduk non Muslim juga cukup tinggi, terbanyak non Muslim ke dua sesudah Aceh Tenggara. Heterogenitas realitas sosial yang ada memberi pengaruh terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah masyarakat. Aceh Singkil juga berbatasan langsung dengan Wilayah Sumatera Utara.
3.	Aceh Tamiang	Aceh Tamiang merupakan daerah yang sedang berbenah dalam menggalakkan da'i perbatasan di Provinsi Aceh. Dengan geografis yang cukup heterogen terdiri dari etnis Batak, Tionghoa dan Jawa, disamping Melayu sebagai penduduk asli dan Aceh (sebagian kecil pendatang). Aceh Tamiang juga berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sehingga memunculkan kompleksitas dan multikultural dan perbedaan agama.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Pengamatan atau observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait langsung dengan berbagai fenomena terkait dengan dinamika pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pengamatan memungkinkan peneliti memahami lebih jauh berbagai situasi dan kasus tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan dengan teknik komunikasi, karenanya teknik akan sangat bermanfaat menjelajahi berbagai persoalan terkait dengan penerapan syariat Islam di Aceh dengan kaitan pelaksanaan program da'i perbatasan. Untuk itu observasi diarahkan pada praktek pengajian yang ada dalam masyarakat di Kabupaten/Kota sampel penelitian ini.

#### **b. Telaah Dokumen**

Telaah sumber data dimaksudkan adalah semua data yang berkaitan dengan berbagai informasi tertulis terkait dengan bahan-bahan penunjang dari tema penelitian. Data tersebut diperoleh dari buku, artikel, surat kabar dan berbagai putusan hukum lainnya mengenai pelaksanaan syariat Islam yang telah berjalan selama ini. Informasi yang diperoleh dapat berbentuk, SK Gubernur, SK Dinas Syariat Islam dan data-data dari Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh khususnya yang terkait dengan program da'i perbatasan.

### **c. Wawancara Mendalam**

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik ini akan digunakan untuk memperoleh data tentang berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat mengenai pelaksanaan syariat Islam. Wawancara akan dilakukan dengan memilih beberapa orang responden di wilayah lokasi penelitian. Informasi yang di diperoleh akan dikembangkan dengan teknik *snowballing* untuk menjaring lebih banyak lagi informasi yang berkaitan dengan realitas sosial pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

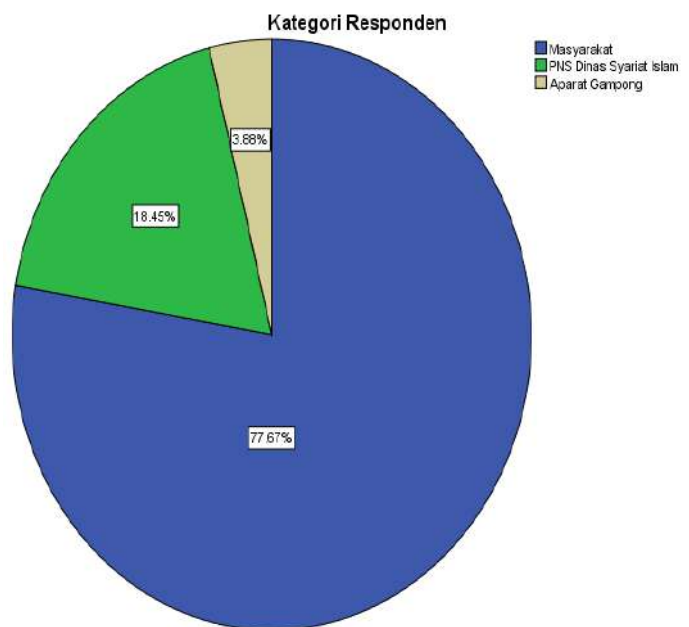
Secara metodologis wawancara mendalam dilakukan melalui kontak atau hubungan pribadi (individu) dalam bentuk tatap muka antara peneliti dengan subjek penelitian (responden yang telah ditentukan/dipilih) baik dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten /Kota, tokoh masyarakat, para ulama dan teungku dayah, hingga pemangku kepentingan yang berhubungan dengan tema penelitian. Wawancara yang dilakukan selalu berpegang pada pedoman wawancara atau (*interviewguide*) kendatipun tentunya akan berkembang seiring dengan konteks masalah yang ditemui di lapangan. Informasi dan data-data yang diperoleh melalui wawancara berupa pandangan, pendapat, tanggapan, perasaan, keyakinan, pemikiran, argumen serta pengetahuan responden dalam kaitannya dengan implementasi program da'i perbatasan.

**Tabel II**  
**Jumlah Responden**

No.	Responden	Jumlah	Lokasi
1.	Kadis SI Aceh, Kepala UPTD Dai DSI Aceh, Akademisi, DDII, FKUB, IKADI, Ormas Islam Bidang Dakwah	5	Provinsi
2.	Kepala DSI/Kabid Kabupaten	3	Daerah
3.	Da'i Perbatasan	17	Daerah
4.	Keuchik/Tuha Peut/ Tuha Lapan/Tokoh Masyarakat	11	Daerah
5.	Imuem Gampong	9	Daerah
6.	Ormas Islam yang bergerak Bidang Dakwah; DDII, Muhammadiyah)	4	Daerah
Jumlah		40	

**d. Angket**

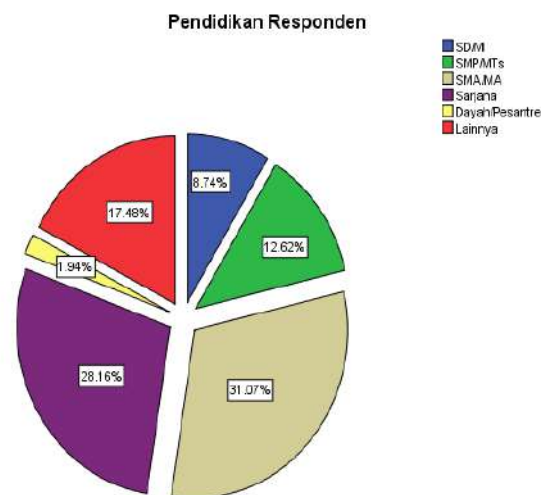
Teknik pengumpulan data ini adalah dengan menyebarkan angket yang memuat sejumlah pertanyaan berdasarkan variabel yang ingin dilihat dalam rumusan masalah.



Pengumpulan data melalui angket adalah pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.<sup>4</sup> Sedangkan jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket berbentuk sejumlah pertanyaan tertutup dengan alternatif jawaban berbentuk *skala likert*. Sugiono mengatakan bahwa *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Contohnya, sangat setuju, setuju, kadang-kadang, tidak setuju dan sangat tidak setuju.<sup>5</sup>

#### 4. Analisis Data

Sedangkan untuk analisis data, dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sementara untuk analisis data kualitatif, mengikuti pandangan Patton<sup>6</sup> dimana data diorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.



<sup>4</sup>Riduwan, *Metodologi Riset dan Data*, (Bandung: Alumi, 2004), h. 71.

<sup>5</sup>Sugiono, *Metode Penelitian...*h. 134.

<sup>6</sup>AZ.B. Marvati, *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*, (Thousand Oaks.Sage Publ. Inc. 2004).

Artinya, pengkategorian data disesuaikan dengan rumusan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian dan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan interpretasi, seleksi, dan penjelasan dalam bentuk deskripsi analisis.

Analisis data kualitatif merupakan model penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai kategori data untuk membangun pemahaman konseptual tentang realitas sosial berdasarkan temuan empirik. Melihat dari tujuan analisis, ada dua hal mendasar yang ingin dicapai dari analisis data kualitatif, yaitu: (1) menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh gambaran yang konkret dari fenomena tersebut. (2) menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses dari suatu fenomena.<sup>7</sup>

Pada tahap analisis ini Miles dan Huberman<sup>8</sup> menyebutkan terdapat tiga komponen pokok yang harus disadari oleh peneliti yaitu *data reduction*, proses reduksi data yang terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari hasil catatan lapangan. Kemudian, *data display*, proses penyajian data yang dimulai dengan penyusunan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Terakhir *conclusion drawing*, proses penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan berlangsung secara bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data,

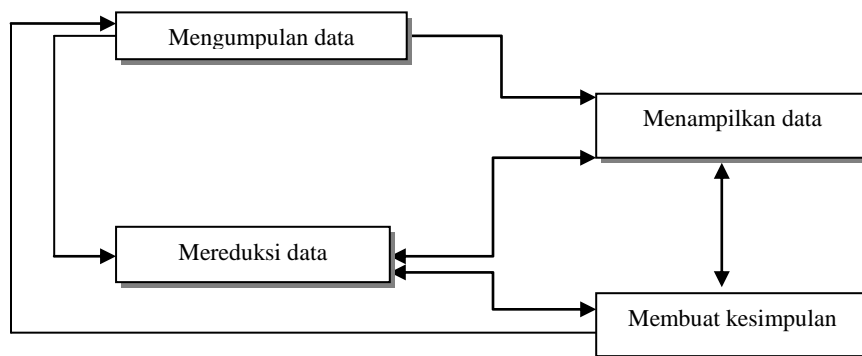
---

<sup>7</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologi Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2003).

<sup>8</sup>Matthew. B Miles, & Huberman, A.Michael. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI Press. 1992).

kemudian lebih spesifik pada tahap penyajian data, dan lebih khusus lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya.

Ketiga komponen tersebut ditambahkan Miles dan Huberman, adalah apa yang disebut dengan model analisis interaktif, dimana ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data dilapangan sebagai proses siklus. Atau dapat juga disebutkan analisis yang dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan data dilapangan sampai pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis ini mencakup beberapa kegiatan, yaitu menelaah data, pengelompokan data, menemukan apa yang penting sesuai dengan fokus penelitian, dan sekaligus mempelajari untuk memutuskan apa yang akan dilaporkan.



Sumber: Miles dan Huberman, 1992.

Setelah keempat proses analisa data tersebut dilakukan, barulah kemudian dikemukakan uraian pembahasan dan analisa secara mendalam sebagai hasil penelitian dan sekaligus menyetengahkan beberapa kesimpulan akhir dan juga beberapa rekomendasi dari penelitian yang bertujuan untuk memberikan masukan secara umum kepada pemangku kepentingan dan lembaga terkait lainnya secara



khusus yang mempunyai wewenang dan kekuasaan berkaitan dengan berbagai isu terkait.

Dalam upaya memperoleh data yang keabsahannya dapat diyakini, kebenaran data diuji dengan triangulasi data. Ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan salah interpretasi. Denzin menyebutkan, triangulasi merupakan proses penggunaan banyak persepsi dalam mengklarifikasikan arti (*meaning*) dan dalam memverifikasikan pengulangan pelaksanaan observasi interpretasi.<sup>9</sup> Dalam studi ini triangulasi dilakukan dengan mengklarifikasi atau membandingkan data dan informasi yang berasal dari sumber informasi dan pengumpulan data yang berbeda.

---

<sup>9</sup>N K. Denzin & Lincoln, Yvonna S. *Handbook of Qualitative Research (second edition)*, (Thousand Oaks, Sage Publication, Inc. 2000).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Eksistensi Da'i Perbatasan dalam Mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

##### 1. Latar Belakang Program Da'I Perbatasan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan kewenangan yang cukup besar bagi Aceh untuk menjalankan identitas keislaman yang dapat diimplementasikan secara nyata di tengah kehidupan masyarakat. Menurut Al Yasa' Abubakar (pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Syari'at Islam [DSI] Aceh), ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari lahir UU Nomor 44 Tahun 1999.<sup>1</sup> *Pertama*, adanya pengakuan dari pemerintah bahwa Aceh memiliki keistimewaan di bidang pendidikan, agama dan adat. Di mana sebelumnya sejak tahun 1959 belum ada aturan pelaksanaannya yang memungkinkan untuk diimplementasikan. Lahirnya UU ini mengatasi persoalan tersebut. *Kedua*, Syari'at Islam telah didefinisikan secara lebih lengkap yaitu mencakup seluruh ajarannya. *Ketiga*, umat Islam diberikan izin menjalankan syari'at Islam di dalam kehidupannya, sebagai pengakuan atas keistimewaan Aceh.

Pada tahap berikutnya, penyempurnaan terhadap UU Nomor 44 Tahun 1999, diterbitkan UU Nomor 18 Tahun 2001 yang memberi wewenang yang lebih

---

<sup>1</sup>Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), h. 43-45. Lihat juga Syahrizal Abbas (ed). *Kontekstualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Ar-Raniry Press, 2003). Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh* (Jakarta: Logos, 2003).

besar bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam. Sehingga kemudian melahirkan berbagai Qanun untuk implementasi syari'at Islam secara kaffah yang pelaksanaannya diberikan wewenang diberikan kepada Mahkamah Syari'yah.

Atas dasar wewenang tersebut, dibentuklah DSI pada tanggal 25 Januari 2002, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 33 tahun 2001, dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002. Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan syari'at Islam. Instansi ini merupakan satu-satu instansi yang hanya terdapat dalam struktur pemerintah Aceh. Tidak ada instansi serupa di daerah lainnya di Indonesia. Tugas utamanya adalah melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan Pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Syari'at Islam.

Fungsi dari DSI dalam Perda Nomor 33 Tahun 2001 disebutkan dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam;
- c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta menyemarakkan Syiar Islam;

- d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam.

Kemudian, untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, lebih jauh DSI diberikan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan program, penelitian dan pengembangan unsur-unsur Syari'at Islam;
- b. Melestarikan nilai-nilai Islam;
- c. Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan Syari'at Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiah, amar makruf nahimungkar, baitalmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris;
- d. Mengawas terhadap pelaksanaan Syari'at Islam;
- e. Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan yang telah diberikan tersebut, salah satu program unggulan DSI adalah mengirimkan para da'i ke wilayah perbatasan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dan daerah terpencil. Program ini kemudian diberi nama dengan "Program Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah

Terpencil yang dimulai sejak pada tahun 2002.”<sup>2</sup> Program ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam proses sosialisasi pelaksanaan syari’at Islam sekaligus sebagai ujung tombak dalam pembinaan masyarakat di daerah perbatasan yang dianggap lebih rawan terhadap proses kristenisasi dan aliran-aliran sesat lainnya.

Penguatan umat di wilayah perbatasan merupakan salah satu program yang cukup strategis dan penting dilihat dari beberapa aspek, yaitu: *pertama*, daerah perbatasan sering termarginalkan dalam proses pembangunan termasuk pembangunan bidang keagamaan, baik aspek jarak dari pusat pemerintah maupun kebijakan pemerintah yang tidak mengacu pada peningkatan kemampuan masyarakat perbatasan. *Kedua*, sumber daya manusia di daerah perbatasan, khususnya tentang pengetahuan agama dianggap masih rendah. *Ketiga*, kabupaten perbatasan Aceh merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran dan para misionaris.<sup>3</sup>

Senada dengan apa yang telah disampaikan di atas, Syahrizal Abbas selaku Kepala DSI Aceh sekarang ini menyatakan bahwa program perbatasan lahir didasari dari keprihatinan pemerintah Aceh terhadap posisi masyarakat perbatasan Aceh, yang jauh dari akses pelayanan publik, termasuk perhatian di bidang agama. Karena itu, keberadaan da’i perbatasan diharapkan akan menjadi elemen dalam penguatan aqidah, nilai-nilai Islam dan moral bagi masyarakat perbatasan yang berpotensi terjadi pendangkalan aqidah oleh kondisi wilayah perbatasan yang heterogen dan ruang yang dapat dimasuki oleh aliran kepercayaan apa pun.

---

<sup>2</sup>Al Yasa’ Abubakar, *Sekilas Syari’at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2008, h. 4.

<sup>3</sup>Abdul Rani, *Problema Da’i Perbatasan Aceh dalam Pembinaan Masyarakat*, Tesis, Banda Aceh: Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2013, h. 54.

Kenyataan lain di daerah perbatasan yang perlu digaris bawahi adalah bahwa orang muslim dan non-muslim memiliki interaksi yang tinggi dalam aktivitas sosial, ini apabila tidak diberikan pemahaman yang cukup tentang keagamaan akan mudah seseorang pindah ke agama lain, ditambah dengan misi kristenisasi yang gencar dilakukan oleh misionaris. Maka, ini menjadi kewajiban pemerintah Aceh untuk membantu dan melindungi masyarakat Muslim perbatasan agar terhindar dari berbagai hal yang dapat merugikan masyarakat Muslim. Secara yuridis, ini juga diperkuat dengan amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) pasal 125, 126, dan 127, bahwa Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan Syari'at Islam, dan di antara misi syari'at tersebut adalah adanya program da'i perbatasan.<sup>4</sup>

Melihat begitu pentingnya program ini, pada tahun 2012, DSI telah menjalin koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Koordinasi ini cukup penting mengingat daerah perbatasan tempat da'i bertugas berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Program ini cukup didukung oleh MUI Sumatera Utara karena daerah perbatasan sangat rawan dari proses Kristenisasi serta daerah perbatasan juga selama ini kurang mendapat perhatian yang cukup dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan kapasitas keagamaan masyarakat.

## **2. Profil Da'i Perbatasan**

Sekarang ini, keberadaan da'i perbatasan semakin mendapat pengakuan dari pemerintah. Hal ini merupakan sebuah angin segar dari perjuangan yang telah

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kadis Syari'at Islam Aceh, Tanggal 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.

dilakukan dalam rangka penegakan syari'at Islam di Aceh. Lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil telah meningkatkan status program ini perlu terus dikembangkan untuk meningkatnya pengalaman keagamaan di daerah perbatasan dan terpencil. Sekaligus mendorong upaya penguatan para da'i, manajemen program dan sistem koordinasi lintas sektoral yang perlu diperkuat untuk terjaminnya program ini mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Selain itu, dalam Pergub tersebut Pasal 8 juga disebutkan syarat yang cukup penting yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen tenaga da'i perbatasan yaitu:

1. Persyaratan Umum Administrasi
  - a. Lulusan S1 dari semua jurusan dan lulusan dayah kelas VII.
  - b. Bukan PNS, BUMN, LSM dan ORSOSPOL.
2. Persyaratan Fisik
  - a. Tidak pernah mengidap penyakit akut.
  - b. Tidak cacat fisik alamiah.
3. Persyaratan Keilmuan
  - a. Fasih membaca Al-Qur'an.
  - b. Mampu dan pernah menjadi Imam shalat berjamaah, khatib shalat Jum'at dan menyampaikan ceramah/pengajian.

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kepala DSI Aceh mengutarakan bahwa posisi da'i harus dipandang bukan sebagai ulama besar, dalam khazanah Aceh mereka serupa sebagai Teungku Meunasah, yang kualifikasinya standarnya mampu memberikan pencerahan kepada umat diwilayah perbatasan. Kemampuan Teungku Meunasah seperti kita ketahui adalah kemampuan baca dan mengajarkan al-Quran, praktik moral, kemampaun memimpin kegiatan-kegiatan umum keagamaan, seperti shalat, khutbah, samadiyah, tahlil dan lainnya. Jadi da'i yang dianggap memiliki kemampuan dasar tersebut, layak ditempatkan dan ditugaskan untuk membina masyarakat perbatasan.<sup>5</sup>

Selain syarat personal bagi seorang da'i untuk memenuhi kualifikasi, wilayah penempatan da'i juga menjadi syarat yang harus disurvei oleh DSI sebelum mereka ditempatkan. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2014, dalam pasal 14 disebutkan persyaratan lokasi penetapan da'i adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan wilayah perbatasan atau daerah terpencil.
- b. Merupakan daerah yang rawan terhadap pendangkalan Aqidah Islam.
- c. Dapat dimonitor oleh Koordinator Lapangan dan Tim Monitoring dari Provinsi Aceh.
- d. Sumber Daya Manusia dalam bidang keagamaan relatif masih sangat rendah, sehingga perlu mendapat bimbingan dan penyuluhan da'i.

Berdasarkan persyaratan lokasi tersebut, terlihat bahwa program ini benar-benar ingin menyentuh suatu daerah yang selama ini sangat terabaikan dalam

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kadis Syari'at Islam Aceh, Tanggal 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.



pembinaan keagamaan, baik karena jauh dari jangkauan sehingga dianggap daerah terisolir, adanya upaya-upaya kristenisasi untuk pelemahan aqidah umat, atau juga karena rendahnya sumberdaya lokal dalam *gampong* tersebut dalam pembinaan agama. Makanya dalam realisasi berdasarkan kabupaten yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil. Lokasi *gampong* sampel yang dikunjungi sudah sesuai syarat yang disebutkan dalam qanun tersebut.

Salah satunya terlihat, penempatan da'i di *gampong* yang pemeluk agama tertentu mayoritas atau seimbang, sumber daya lokal bidang keagamaan yang sangat memprihatinkan dan juga menjadi tempat misionaris mengembangkan ajarannya. Misalnya di salah satu *gampong* pada Kecamatan Danau Paris, 40% Islam, 30% Kristen, 30% lainnya menganut aliran kepercayaan.<sup>6</sup>

Daerah seperti menurut tokoh masyarakat, kondisi *gampong* walaupun dilihat kerukunan beragamanya tenang, tetapi dengan kondisi sekarang ini, di mana keuchiknya dari non-Muslim, benih-benih perpecahan bisa saja timbul karena berbagai persoalan seperti tidak adil dalam memerintah, ada pilih kasih antara melayani orang Kristen dengan orang Islam.<sup>7</sup> Berdasarkan kunjungan yang peneliti lakukan, daerah ini telah ditempatkan da'i, tetapi dalam 2 tahun terakhir, da'i di daerah ini tidak bekerja secara maksimal, karena tidak tinggal di lokasi.

---

<sup>6</sup>Aliran kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan lama kepada nenek moyang seperti menganggap Sisimangaraja sebagai Nabi dan mereka juga memiliki tempat ibadah yang di sebut dengan Kusatin. Karena sebagaimana diketahui bahwa Singkil berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara terutama Phak-Phak Barat yang banyak menganut agama Kristen dan juga menganut aliran kepercayaan.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Wudi Birutu, Tokoh Masyarakat Gampong Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 17 Agustus 2015 di Singkil.

Kondisi harus segera dapat dipantau dan dievaluasi secara maksimal, karena jika da'i tidak berdomisili di lokasi atau gampong di mana ia bertugas dikhawatirkan tugas-tugasnya sebagaimana da'i tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, juga menyalahi prinsip-prinsip dasar penetapan da'i yang telah diatur dalam dalam Peraturan Gubernur Pasal 6, yang berbunyi:

- a. Da'i harus berdomisili ditempat tugas sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh.
- b. Waktu kegiatan dakwah adalah pada setiap selesai shalat 5 (lima) waktu dan waktu-waktu lainnya yang berkaitan dengan tugas da'i.
- c. Da'i tidak dibenarkan merangkap tugas di Lembaga Pemerintahan dan Instansi/lembaga lainnya serta tidak terlibat dalam politik praktis.
- d. Da'i bertugas di gampong sesuai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas syari'at Islam Aceh dan dapat juga bertugas di gampong lainnya yang berdekatan terutama pada gampong yang jumlah KK muslimnya sangat minim.

Terkait dengan jumlah da'i perbatasan, untuk tahun 2015, melihat pentingnya keberadaan da'i perbatasan, pemerintah menambah jumlah da'i yang sebelumnya 150 orang menjadi 170 orang. Syahrizal Abbas, selaku Kepala DSI menyatakan bahwa walaupun penambahan hanya 20 da'i, ini dapat dikatakan sebagai sebuah kemajuan karena jumlah 150 orang tidak pernah bertambah

selama lima tahun terakhir. Penambahan ini belum cukup ideal karena kebutuhan da'i perbatasan diperkirakan mencapai 500.<sup>8</sup>

Berdasarkan jumlah da'i pada tahun 2015 sebanyak 170 ditempatkan pada 6 kabupaten/kota. Masing-masing gampong yang telah dipilih pada kecamatan tertentu dalam kabupaten/kota tersebut ditempatkan 1 orang da'i. Berikut ini lokasi penempatan da'i pada tahun 2015, yaitu:<sup>9</sup>

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Da'i
1	Aceh Tenggara	10 kecamatan	43 orang
2	Aceh Singkil	7 kecamatan	41 orang
3	Subulussalam	5 kecamatan	18 orang
4	Aceh Taming	8 kecamatan	33 orang
5	Simeulue	9 kecamatan	20 orang
6	Aceh Selatan	7 kecamatan	15 orang

Sumber Data: Dokumen DSI Aceh, 2015.

Berdasarkan jumlah tersebut di atas, untuk kategori da'i yang ditempatkan di daerah terpencil pada masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten	Daerah Terpencil
1	Aceh Tenggara	10 Gampong

<sup>8</sup><http://atjehpost.co/articles/read/2030/Bersama-Memperkuat-Aqidah-Umat>. Diakses, Tanggal, 1 Oktober 2015.

<sup>9</sup>Surat Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh tentang Penunjukan/Penugasan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil di Wilayah Provinsi Aceh 2015, Nomor: 451.48/0319/20015, tanggal 25 Juni 2015.

2	Aceh Singkil	12 Gampong
3	Subulussalam	8 Gampong
4	Aceh Taming	14 Gampong
5	Simeulue	20 Gampong
6	Aceh Selatan	15 Gampong

Sumber Data: Dokumen DSI Aceh, 2015.

Dari tabel di atas hanya Simeuleu dan Aceh Selatan yang semua da'i ditempatkan pada lokasi daerah terpencil. Yang dimaksud dengan daerah terpencil adalah wilayah pedalaman yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada akses transportasi umum.

Melihat pentingnya program ini, DSI untuk tahun 2016 sudah mengusulkan penambahan sebanyak 30 orang da'i, namun saat ini masih dalam proses diskusi dengan pihak legislatif terkait penambahan tersebut. Upaya ini dilakukan karena adanya permintaan oleh kabupaten/kota untuk penambahan jumlah da'i. Bahkan sudah muncul inisiatif sendiri dari kabupaten/kota untuk merekrut sendiri para da'i dari anggaran daerah masing-masing, misalnya di Kabupaten Tamiang dan Subulussalam.<sup>10</sup>

Kebutuhan penambahan da'i juga oleh Kepala DSI Aceh Tenggara bahwa dari segi jumlah da'i belum mencukupi berdasarkan kebutuhan jumlah gampong

---

<sup>10</sup>Inisiatif ini juga diikuti oleh Kota Banda Aceh walaupun daerah Banda Aceh ini bukan daerah perbatasan dan terpencil. Tetapi melihat kepada kebutuhan perlunya da'i yang dapat bekerja secara maksimal, Banda Aceh melakukan inisiatif yang baik untuk mendukung implementasi Syari'at Islam. Karena Banda Aceh sebagai ibukota provinsi juga menghadapi berbagai kendala sebagai daerah kosmopolit yang perlu diantisipasi agar keterbukaan tersebut dapat terkontrol dalam bingkai syari'at Islam sesuai dengan visi Banda Aceh sebagai kota madani. Hasil Wawancara dengan Drs. Nasruddin Ibrahim, M.Ag (Kepala UPTD PAI dan Da'i Dinas Syari'at Islam Aceh), Tanggal 25 Agustus 2015 di Banda Aceh.

yang memerlukan da'i perbatasan terutama daerah-daerah terpencil dalam kabupaten Aceh Tenggara.<sup>11</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala DSI Aceh Singkil pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa sekarang ini da'i perbatasan di wilayah Singkil berjumlah 41 orang saja. Masyarakat kita secara beramai-ramai selalu minta kepada DSI Kab. supaya da'i perbatasan itu terus ditambah dari waktu ke waktu. Masyarakat sangat butuh kehadiran mereka dan ini sangat responsif, kita semua memberikan apresiasi dan respek yang luar biasa terhadap program pemerintah ini.<sup>12</sup>

Melihat kondisi keagamaan di wilayah perbatasan, jumlah yang ada sekarang memang diperkirakan belum cukup memadai, karena kondisi keagamaan di daerah perbatasan cukup mengkhawatirkan. Dari hasil kajian, terlihat bahwa aktivitas keagamaan semakin menurun termasuk pengajian anak-anak. Begitu juga dengan kondisi Masjid dan Meunasah yang hanya dipergunakan pada hari Jum'at saja, sedangkan hari lainnya di daerah terpencil Masjid tidak berfungsi sebagai tempat ibadah. Perlu survei yang lebih mendalam untuk melihat kebutuhan riil da'i dengan kondisi keagamaan masyarakat wilayah perbatasan.

Syahrizal Abbas sebagai Kepala DSI Aceh sekarang ini juga mengakui adanya permintaan penambahan da'i dari masyarakat wilayah perbatasan karena masyarakat menilai pentingnya peran da'i dalam pembinaan umat di wilayah perbatasan, sebenarnya penambahan jumlah ini merupakan hal yang mengamponk untuk diwujudkan, namun ada berbagai kendala terutama terkait

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Drs. Hamidin, M.Pd, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Samsul Bahri, SH, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 18 Agustus 2015 di Singkil.

penambahan anggaran. Tetapi DSI berkomitmen terus melakukan upaya agar kuota da'i perbatasan ada penambahan, ditargetkan dapat minimal mencapai 200 da'i, dari kebutuhan 500 da'i.<sup>13</sup> Penambahan jumlah da'i perbatasan yang diupayakan oleh DSI harus mendapat respons positif dari semua pihak, termasuk pihak legislatif agar adanya penambahan anggaran untuk program ini. Proses pemenuhan jumlah da'i ini dapat dilakukan secara bertahap setiap tahunnya sehingga dapat mencapai jumlah maksimal dalam rangka penguatan aqidah dan pemahaman keagamaan masyarakat perbatasan dapat terlaksana secara maksimal.

### **3. Pengembangan Kapasitas Da'i Perbatasan**

Dari sisi kemampuan ataupun kapasitas keilmuan yang dimiliki para da'i perbatasan tersebut telah memiliki kemampuan yang memadai dalam hal keilmuan dakwah tentang Islam. Namun dari sisi pengamalan tugas yang diberikan kepada da'i masih belum baik untuk dijalankan, hal ini terbukti dengan kegiatan yang mereka lakukan tidak fokus untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan, melainkan kegiatan yang mereka lakukan hanya dalam batasan kegiatan yang bersifat seremonial semata, sehingga menyebabkan masyarakat tidak terdidik aqidahnya, tidak terpantau akhlaknya dan tidak dapat diukur ibadah yang dilakukan oleh masyarakat yang dibina tersebut.<sup>14</sup>

Terkait dengan itu, dalam Peraturan Gubernur 2015 disebutkan bahwa pembinaan dan peningkatan kualitas SDM Da'i dilakukan melalui :

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kadis Syari'at Islam Aceh, Tanggal 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Provinsi Aceh, Tanggal 31 Agustus 2015 di Banda Aceh.

1. Temu karya dan loka karya Da'i;
2. Diskusi kelompok Da'i di Kabupaten/Kota;
3. Penyediaan sarana bacaan;
4. Pertemuan berkala dan Focus Group Discussion tentang masalah keagamaan di daerah; dan
5. Pendidikan dan Pelatihan.

Terkait kemampuan da'i perbatasan dalam melaksanakan tugasnya, itu melalui proses tahapan seleksi yang ketat, terutama mereka yang ditempatkan di perbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Standar rekrutmen ditetapkan oleh Dinas Syari'at Islam, jadi mereka yang memenuhi syarat yang dapat melanjutkan program kerja da'i. Seleksi dilakukan dengan muatan materi kompetensi untuk seorang da'i yang dianggap mampu melaksanakan tugasnya, serta dilakukan dengan terbuka dan transparansi (jauh dari kesan nepotisme, dan lainnya). Diantara materi paling mendasar adalah penguatan aqidah, yang akan dimanfaatkan langsung dalam penguatan aqidah masyarakat nantinya di perbatasan. Selanjutnya materi praktik ibadah, seperti shalat, puasa, thaharah, hingga tahjiz mayat, materi nilai akhlak dan moral. Karena itu, posisi da'i harus dipandang bukan sebagai ulama besar, dalam khazanah Aceh mereka serupa sebagai *Teungku Meunasah*, yang kualifikasinya standar untuk dipahami masyarakat awam. Kemampuan *Teungku Meunasah* seperti kita ketahui adalah kemampuan baca dan mengajarkan al-Quran, praktik moral, kemampuan memimpin kegiatan-kegiatan umum keagamaan, seperti shalat, khutbah, samadiyah, tahlil dan lainnya. Jadi da'i yang dianggap memiliki kemampuan

dasar tersebut, layak ditempatkan dan ditugaskan untuk membina masyarakat perbatasan.<sup>15</sup>

Ke depan, proses rekrutmen juga akan di-*upgrade* dan tingkatkan, tidak lagi sebatas ranah kompetensi dasar. Akan ada juga tes psikologis dan kemampuan memahami keragaman, dan juga akan memastikan individu da'i yang memiliki mental *entrepreneurship*. Jadi, ke depan, jika ada penambahan lagi beberapa orang da'i perbatasan, kita akan tes dalam tiga komponen, 1. Komponen kompetensi dasar keagamaan, 2. Komponen psikologis, dan 3. Komponen *entrepreneurship*. Tim penguji nanti akan dicari orang-orang dari ekonomi syariah, atau siapa pun yang dapat melakukan penilaian dan mengukur orang terhadap komponen-komponen tersebut. Pada tes 20 orang yang diajukan penambahan, kita juga belum menggunakan komponen ketiga, yang kita tambah dan hanya kita lakukan yaitu pada komponen psikologis. Jadi ke depan, komponen *entrepreneurship* harus kita masukkan dalam proses rekrutmen. Apalagi, DSI Aceh kadang sering menerima surat dari beberapa da'i, mereka minta dipindahkan lokasi. Tentunya, hal ini harus diantisipasi. Karena itu, tes psikologi dan *entrepreneurship* penting untuk menanggulangi keluhan dalam penempatan da'i nantinya. Psikolog tentu paham jiwa kesiapan individu, atau kenapa da'i minta pindah dari lokasi penempatan. Terkait komponen *entrepreneurship*, kita lakukan pembinaan dan pelatihan saja dulu bagi mereka yang sudah bekerja. Karena nantinya, tes *entrepreneurship* akan dilakukan pada

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, Tanggal, 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.



saat rekrutmen jika ada penambahan kuota lagi, ini ideal untuk format rekrutmen ke depan, agar mereka juga bisa memberdayakan masyarakat.<sup>16</sup>

Namun demikian beberapa da'i juga memiliki kemampuan yang belum dapat memenuhi standar yang diinginkan seperti yang ada di Aceh Tenggara. Kepala DSI Aceh Tenggara mengatakan bahwa sebenarnya masalah kapasitas dan kemampuan da'i ini belum memadai atau masih kurang untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, karena pada umumnya mereka tidak mau membaca lagi, sehingga mencukupkan dengan apa yang diketahui selama ini. Selama ini ada dilakukan pengajian sekali dalam seminggu supaya da'i mau membaca dan menambah wawasannya untuk meningkatkan kemampuan da'i. Hanya saja kekurangannya adalah kewenangan terhadap da'i ini hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, bukan lagi kewenangan provinsi, melalui Dinas Syari'at Islam kabupaten kota.<sup>17</sup>

#### **4. Peran dan Tugas Da'i Perbatasan**

Mengenai masalah peran dan tugas da'i perbatasan dapat dilihat pada Pergub, SK DSI Aceh, kemudian juga akan dikaji beberapa tugasnya yaitu terkait dengan penguatan aqidah, kerukunan antar agama dan kontribusinya dalam menghadang aliran sesat.

Peran dan tugas da'i perbatasan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Kegiatan Da'i

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, Tanggal 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Drs. Hamidin, M.Pd. Kadis Syari'at Islam Aceh Tenggara, 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil mempunyai tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 9, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam secara menyeluruh;
2. Mengaktifkan shalat fardhu berjamaah;
3. Membina dan memperkokoh aqidah umat;
4. Mengajar dan membimbing membaca Al-Qur'an;
5. Membina TKA, TPA dan TQA;
6. Membina umat dan mempererat ukhuwwah;
7. Membimbing pengajian;
8. Pembinaan Remaja Masjid;
9. Mengisi pengajian di Majelis Ta'lim;
10. Berperan aktif dalam pelaksanaan fardhu kifayah;
11. Mengaktifkan kuliah subuh;
12. Memakmurkan Masjid;
13. Memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengamalan agama dan kualitas hidup;

**Jadwal kegiatan Da'i perbatasan desa perkebunan**  
 Nama dai : Ust Rinaldo Sapta Putra(081362257751)

1	2	3	4
Waktu	Jenis Kegiatan	WAKTU KEGIATAN	Keterangan tempat
SENIN	GERAKAN MUGHRIB MINGGU	HARI SENIN MUGHRIB	Majlis Nural Fatmahan Dusun kandi Desa perkebunan Serway
SELASA	PENGALIHAN AL-QURAN MINGGU (MELAKSANAKAN)	HARI SENIN MUGHRIB	Majlis Nural Fatmahan Dusun kandi Desa perkebunan Serway
RABU	PENGALIHAN AL-QURAN MINGGU	HARI SENIN MUGHRIB	Majlis Nural Fatmahan Dusun kandi Desa perkebunan Serway
KAMIS	TALYANIB BERIBADAH	HARI SENIN MUGHRIB	Beribadah dengan orang-orang di Dusun kandi
JUMAT	KUYYAH JUM'AT	SEBELAS SEKALI	Majlis Nural Fatmahan Dusun kandi Desa perkebunan Serway
SABTU	GERAKAN MUGHRIB MINGGU	HARI SENIN MUGHRIB	Majlis Nural Fatmahan Dusun kandi Desa perkebunan Serway

SUMBER: LAPORAN KEGIATAN DA'I PERBATASAN DESA PERKEBUNAN SERWAY

*Salah Satu Kegiatan, Da'i Perbatasan: Pengajian, Zikir, Wirid, selama 1 Minggu di Tamiang*

14. Konsultasi dalam masalah keagamaan;
15. Praktek tajhiz mayit;
16. Membina kegiatan hari-hari besar Islam.

Sedangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam tugas da'i perbatasan Nomor: 451.48/0319/2015 tentang Penunjukan/Penugasan Da'i Wilayah Perbatasan dan daerah Terpencil adalah:

1. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap aqidah, ibadah, mua'malah dan akhlak umat agama Islam
2. Memperdalam pengetahuan umat secara menyeluruh
3. Memberdayakan shalat fardhu berjamaah
4. Membentuk dan membina remaja masjid/meunasah
5. Melatih kader fardhu kifayah
6. Membentuk dan membina lembaga-lembaga pengajian/pendidikan agama dan dakwah
7. Mewujudkan suasana lingkungan masyarakat yang damai, tertib dan amanah
8. Menghidupkan pengajian di gampong
9. Menyuburkan syiar Islam
10. Mendorong kerukunan hidup toleran dan antar umat beragama dan pemerintah
11. Mendorong kegiatan-kegiatan lain yang dapat memajukan dan mensejahterakan umat

12. Hal-hal yang menyangkut dengan tugas dan kewajiban da'i selengkapnya termuat dalam pedoman/petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil

Terkait dengan itu, Tgk. Jamaluddin, S.Pd.I, Da'i Perbatasan di Tamiang mengatakan bahwa peran da'i dalam hal kerukunan umat beragama tidak terlalu mencuat di Tamiang. Tetapi mungkin yang dapat disebutkan disini adalah mengenai masalah pendangkalan aqidah. Jadi yang kami lakukan di kampung yang saya tempati bertugas adalah mengadakan pengajian aqidah atau tauhid yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Karena di gampong saya bertugas (Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang) ada sebuah kelompok masyarakat yang mengadakan pengajian tersendiri yang menyebut namanya sebagai Jama'ah Islamiyah yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Salah satu ajaran dari kelompok ini adalah ketika membaca niat dalam shalat mereka harus membayangkan imamnya. Hal menurut saya menyimpang dari aqidah Islam dan salah satu tantangan dalam menjalankan peran dan tugas saya sebagai da'i disini.<sup>18</sup>

Berbeda dengan hal tersebut menurut Tgk. H. Rasyidudin, S.H, Ketua MPU Aceh Singkil, berpandangan bahwamengenai kerukunan umat beragama, da'i kurang berpartisipasi membangun komunikasi dengan non muslim, padahal kita punya lembaga FKUB, para da'i seharusnya memahami mengapa mereka ditempatkan di daerah perbatasan di mana keberagaman beragama sangat

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, S.Pd.I, Da'i Gampong Bengkelang, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Tamiang, Tanggal 24 Agustus 2015 di Tamiang. Tgk. Jamaluddin S.Pd.I adalah alumni Fakultas Tabiyah STAIN Cot Kala langsa, selesai 2008, sebelumnya pernah belajar di Dayah Darussa'adah Idi Cut, selama 15 tahun. Lahir di Langsa dan berasal dari Langsa.

menonjol, karena itu tugas da'i di perbatasan tidak hanya berdakwah untuk kaum muslim saja, tetapi mereka juga harus membangun komunikasi dengan non muslim. Di tempat ini pernah terjadi masalah, tentang pembangunan gereja di Silulusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, awalnya hanya udung-udung, tapi karena ulah Pendeta. Bangunan itu dibuat menjadi bangunan beton padahal belum mendapatkan izin dan FKUB telah memberikan teguran bahwa pembangunan gereja tersebut tidak sesuai aturan, dan FKUB melapor kepada Pemda. Kemudian Pemda melalui Camat mengeluarkan surat teguran agar tidak meneruskan pembangunan tersebut, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh mereka. Padahal seharusnya mereka non Muslim itu harus menyadari sebagai minoritas, padahal yang mayoritas sudah sangat toleran.

Kemudian masalah aliran sesat tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) telah difatwakan oleh MPU Provinsi adalah aliran sesat, indikasi sesat adalah:

- a) Mereka menganggap orang yang diluar LDII adalah najis
- b) Laki-laki LDII boleh menikahi perempuan yang bukan LDII sedangkan perempuan LDII tidak boleh dinikahi oleh lelaki yang bukan LDII.
- c) Pengikut LDII hanya boleh mendengarkan ajaran agama dari mangkulnya (kalau dalam istilah tasawuf mangkul itu sama dengan mursyid).
- d) Alquran penuh dengan coretan, hal ini di dapati ketika MPU kabupaten mendapatkan laporan dari masyarakat, dan melihat langsung ke lokasi,

namun ketika kami meluruskan/memberi bimbingan kepada mereka, mereka tidak pernah membantah.<sup>19</sup>

Senda dengan itu, Ustaz Supian Husni Salam, Pengurus DDI Aceh Tenggara, mengatakan bahwa secara umum peran dan fungsi da'i itu sudah cukup baik karena kita lihat mereka memang telah bekerja di lapangan, dan kita tidak mendengar adanya da'i yang tidak bekerja di lapangan. Keberadaan da'i perbatasan itu besar sekali pengaruhnya terhadap kerukunan umat beragama, karena pada setiap hari-hari besar agama dan adat mereka selalu diundang dan di situ hadir juga orang Muslim maupun non-Muslim. Sehingga, tokoh muslim maupun non muslim dirangkul oleh mereka, sehingga da'i itu pun merasa dihargai. Mengenai peran da'i dalam hal mengatasi pendangkalan aqidah, besar sekali pengaruh da'i terhadap hal itu, karena mereka dalam berbagai pengajian-pengajian menyampaikan materi-materi yang bertujuan menguatkan aqidah masyarakat. Mereka melakukan ceramah-ceramah dan wirid serta pengajian kaum ibu dan bapak.<sup>20</sup>

Selanjutnya Drs. Maddiyah, M.Pd, Wakil Koordinator Da'i Perbatasan Kabupaten Tamiang juga mengatakan hal yang sama bahwa peran dan tugas da'i perbatasan yang dibebankan oleh Dinas sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari keberhasilan para da'i dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam bentuk pengajian, dalam bidang tauhid, fiqih dan akhlak. Bahkan ada da'i yang berhasil mengajak non-Muslim untuk masuk Islam secara

---

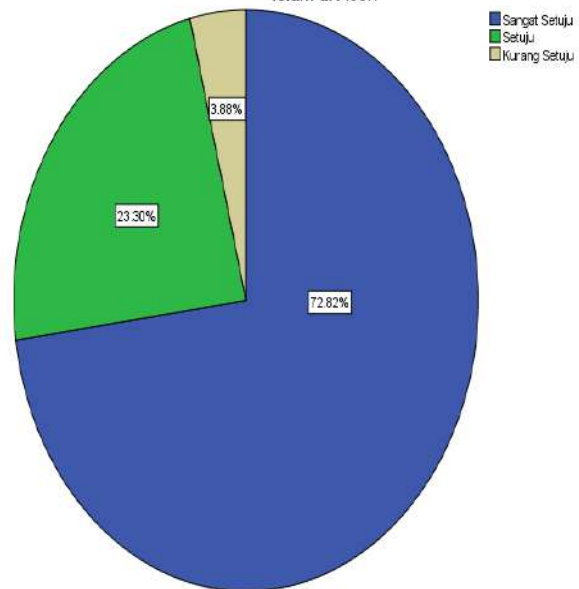
<sup>19</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Rasyidudin, S.H, Ketua MPU Aceh Singkil, Tanggal 18 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Ustaz Supian Husni Salam, M.Ed Pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia, (DDII Aceh Tenggara), Tanggal 20 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

suka rela tanpa paksaan. Sekitar tahun 2012 sebanyak 20-an orang di Kecamatan Tenggulung. Demikian pula peran dalam Taman Pendidikan al-Quran, mendidik anak dalam hal mengaji dan menanamkan nilai-nilai qurani, misalnya partisipasi dalam Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) tingkat kabupaten. Kemudian mengenai masalah gejolak atau konflik antar agama di Taming nyaris tidak ada, demikian pula pendangkalan aqidah. Karena itu, masalah kerukunan agama dan pendangkalan aqidah seperti Kristenisasi atau aliran sesat sampai saat ini tidak ada masalah. Oleh karena itu, da'i perbatasan dalam ini hanya berfungsi menanamkan nilai-nilai tauhid atau aqidah dalam masyarakat, jadi sifatnya preventif (pencegahan) atau memperkuat aqidah sehingga aqidah yang tidak benar tidak masuk.<sup>21</sup>

Pandangan tersebut diatas juga sejalan dengan hasil angket yang disebarkan bahwa kehadiran da'i perbatasan dan terpicil cukup memberi pengaruh dan mendukung pelaksanaan syari'at Islam. Angket menunjukkan 72.82% (sangat setuju), 23.30% (setuju) dan 3.88% (kurang setuju).

Keberadaan da'i perbatasan dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh



<sup>21</sup>Wawancara dengan Drs. Maddiyah, M.Pd. Wakil Koordinator Da'i Kab. Tamiang, Tanggal 25 Agustus 2015 di Tamiang.

Sampai pada batas ini peran da'i perbatasan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pergub dan Surat Keputusan DSI Aceh sudah dilaksanakan di lapangan dan masyarakat mengakui tentang dampak dan pengaruhnya. Misalnya, penguatan aqidah, memperkaya wawasan keislaman, menghidupkan masjid dan sebagainya. Meskipun pada beberapa hal masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki seperti kehadiran da'i di tempat komitmen untuk menjalankan tugas dan perannya.

## **B. Efektivitas Program Da'i Perbatasan dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Fungsinya**

### **1. Respon Masyarakat Terhadap Tugas, Peran dan Fungsi Da'i Perbatasan**

Kebijakan Dinas Syari'at Islam Aceh menempatkan sejumlah da'i di wilayah perbatasan disambut baik oleh masyarakat setempat. Kehadiran para da'i menjadi lampu penerang yang mampu menerangkan serta memperdalam kajian-kajian ke-Islaman bagi masyarakat. Banyak ilmu-ilmu agama yang disampaikan da'i melalui ceramah-ceramah dan pengajian yang diserap dan diamalkan dalam menjalani kehidupan. Acara-acara pengajian itu menjadi pemicu semangat bagi masyarakat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Setidak-tidaknya dengan adanya acara tersebut dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan mengulang kembali yang barangkali terlupakan<sup>22</sup>.

Ada sejumlah indikasi yang memberikan sinyal masyarakat sangat menyukai kebijakan yang dilakukan DSI ini, yaitu:

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Ustaz Kamaludin, S.Sos.I, Da'i Perbatasan Desa Tanoh Meghakhe Kecamatan Badar, Aceh Tenggara, Tanggal, 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.



*Pertama*, kebanyakan dari masyarakat menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh para da'i, seperti mengaji ba'da maghrib, mendengarkan tausiah-tausiyah serta kajian-kajian yang berorientasi pada ilmu-ilmu keagamaan, dan mengaktifkan kembali TPA untuk pengajian anak-anak.

*Kedua*, substansi yang disampaikan oleh da'i berisi tentang ilmu-ilmu ke-Islaman. Jadi, sudah menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam menuntut ilmu-ilmu agama yang diturunkan Allah. Usia yang mulai lanjut tidak menjadi persoalan dalam menuntut ilmu agama, akan tetapi niat dan kemauan masyarakat menjadi motivasi utama dalam mencari ilmu agama.

*Ketiga*, studi yang menjadi objek kajian para da'i tidak hanya terbatas pada aspek hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*), akan tetapi aspek bermuamalah atau hubungan antara manusia dengan manusia (*hablumminannas*) juga menjadi perhatian kajiannya. Kajian mengenai *hablumminallah* mengkaji tentang hubungan manusia dalam mengabdikan diri kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah digarisbawahi dalam ketentuan-ketentuan agama. Terutama menyangkut tata cara beribadah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pelaksanaan ibadah yang tidak sesuai dengan syari'at yang ditetapkan oleh Allah berimplikasi pada tidak sah segala ibadah yang dikerjakan. Oleh karena itu, materi mengenai kajian *hablumminallah* ini menjadi dasar yang harus diamalkan oleh setiap individu dalam mendekati diri kepada Allah SWT.

Aspek sosial yang diajarkan oleh da'i yang diutuskan ke wilayah perbatasan adalah tatacara berinteraksi antara sesama masyarakat dalam membentuk ukhuwah Islamiyah berdasarkan nilai-nilai Syari'at Islam.

Pemahaman di bidang ini penting untuk diketahui dan diaplikasikan oleh masyarakat dalam suatu komunitas masyarakat. Karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya selalu membutuhkan kehadiran oleh lain dalam hidupnya. Hubungan yang baik sesama masyarakat akan terjalin dalam interval waktu lama manakala masyarakat memahami rambu-rambu, tatacara dalam pergaulan masyarakat serta adanya sikap saling menghargai dan mengormati antar sesamanya. Sebaliknya, hubungan interaksi tidak berlangsung dalam jangka waktu lama bila tidak mengetahui aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kepentingan-kepentingan antara satu komunitas masyarakat dengan komunitas lainnya sangatlah berbeda. Akibat dari perbedaan itulah sebagai akar penyebab terjadinya perselisihan dan berbeda pendapat. Melalui pemahaman keagamaan yang disampaikan oleh para da'i yang diutus menjadi tameng dan bekal masyarakat dalam menjalani kehidupannya untuk menghindari terjadinya permusuhan di antara sesamanya<sup>23</sup>.

*Keempat*, materi disampaikan oleh para intelektual Muslim yang sangat memahami dan mendalami kajian-kajian ke-Islaman. Intelektual menjadi panutan masyarakat awam dalam berbagai hal, terutama di bidang ilmu agama. Terdapat nuansa yang berbeda bagi masyarakat Tanoh Meghakhe Kecamatan Badar, Aceh Tenggara terkait penyampaian substansi pembahasan. Selama ini masyarakat mendapatkan pengetahuan ilmu-ilmu agama dari Ustaz-Ustaz yang dianggap alim dan menguasai ilmu agama. Berbeda dengan yang dilakukan oleh para da'i yang

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Ustaz Indra Ansari, Imam Gampong Karo, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

bisa memadukan antara ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum. Para da'i menguasai kedua aspek keilmuan yakni ilmu agama dan ilmu dunia.

Untuk rangka memaksimalkan peran dan fungsinya di tengah masyarakat, para da'i telah melakukan berbagai program, seperti mengembangkan kembali TPA yang vakum, meningkatkan semangat bagi para ibu-ibu dan bapak mengikuti pengajian dan majelis ta'lim, dan lain sebagainya. Kehadiran da'i mulai dirasakan manfaat langsung oleh masyarakat, namun peran dan fungsi tersebut belum berjalan optimal. Bentuk kegiatannya masih berkisar pada pengajian, seperti pengajian kaum Ibu/Bapak, dan pengajian di TPA untuk anak-anak. Berkaitan dengan kegiatan antisipasi pendangkalan aqidah belum tersentuh. Karena sebagian tokoh di sana yang juga sering menjadi khatib selalu menyampaikan terkait adanya usaha-usaha untuk memperkenalkan ajaran baru dalam masyarakat, sehingga muncul kesadaran masyarakat tentang hal tersebut<sup>24</sup>.

Pada saat berlangsungnya penempatan da'i di wilayah perbatasan mengalami perubahan drastis pada perilaku masyarakat dalam beribadah. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan dihidupkan kembali shalat berjamaah selama lima waktu dalam sehari semalam di Masjid, wirid dan ceramah-ceramah keagamaan<sup>25</sup>. Kenyataan tersebut jarang terjadi sebelumnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila banyak masyarakat yang sangat mengapresiasi kehadiran da'i di tengah-tengahnya.

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Muhammad Nasir, Tokoh Masyarakat, Gampong Karo Kec. Baitul Makmur, Kab. Aceh Tenggara, Tanggal 20 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Ustaz Indra Ansari, Gampong Karo, Kec. Baitul Makmur, Kab. Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

Da'i sebagai seorang yang dianggap memiliki pengetahuan agama memiliki peran besar dalam pengembangan ilmu-ilmu bagi masyarakat yang menganut ajaran Islam. Kehadirannya di tengah-tengah masyarakat menjadi nilai plus yang perlu diapresiasi terhadap kebijakan pemerintah khususnya DSI Aceh. Semua masyarakat mendukung keberadaan da'i di wilayahnya, bahkan tidak ada satu pun masyarakat yang menolak kehadirannya.<sup>26</sup>

Sebagian masyarakat mengatakan bahwa keberadaan da'i di tengah masyarakat wilayah perbatasan di samping membawa perubahan dan peningkatan pemahaman keagamaan, juga tidak memiliki perubahan yang berarti. Peningkatan ilmu agama hanya didapatkan oleh sebagian kecil masyarakat, karena hanya mereka yang sering menghadiri program-program yang dilakukan. Seperti para ibu-ibu yang menghadiri pengajian dan anak-anak yang selalu mengaji di TPA. Bagi kaum Bapak masih sangat kurang kesadarannya terhadap ilmu agama. Meskipun di Aceh telah diberlakukan syari'at Islam, namun pelaksanaan di Gampong Karo tidak adanya perubahan signifikan. Shalat Jama'ah di mesjid yang mulai hidup sekarang dikarenakan adanya da'i yang selalu mengajak kepada kebaikan<sup>27</sup>.

Pelaksanaan tugas menyampaikan pesan-pesan al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat di wilayah perbatasan mengalami berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Namun tidak menghambat semangat para da'i untuk menyampaik dakwah dengan tujuan untuk menyadarkan akan pentingnya

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Makmur Manik, Keuchik Tanjung Betik, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Tanggal, 18 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Resnasional, Penghulu Kute (Keuchik), Sabilussalam/Gampong Karo Kec. Babul Makmur Aceh Tenggara, Tanggal, 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara

pemahaman keagamaan bagi setiap insan untuk meraih derajat *insanul kamil* disisi Allah. Motivasi inilah yang ditanamkan dalam diri da'i sehingga tidak putus asa dengan kondisi yang dialaminya. Semangat untuk menyampaikan risalah yang benar dan saling mengingatkan dalam melakukan kebaikan terus menyertainya dalam segala aktifitas.

Wujud antusias masyarakat menyambut kedatangan para da'i di tengah-tengahnya, diberikan fasilitas yang memada'i seperti tinggal supaya dapat menetap di daerahnya. Hal ini bertujuan supaya lebih mudah para da'i menjangkau ke tempat ia mengabdikan.<sup>28</sup> Da'i yang memilih tinggal bersama masyarakat tidak hanya bisa memberikan dakwah di mimbar-mimbar mesjid, akan tetapi di pos-pos jaga, dan rumah-rumah warga dapat dilakukan. Berdakwah di pos-pos jaga dapat dilakukan melalui diskusi-diskusi kecil, meskipun bukan dalam bentuk diskusi formal.

Bentuk respon positif masyarakat terkait kehadiran da'i di wilayah perbatasan ini disampaikan oleh Aidil (salah seorang masyarakat di Tamiang). Menurutnya keberadaan da'i perbatasan sudah terlaksana dengan baik, bahkan jika ada 100 atau 1000 orang da'i mestinya dikirim lagi ke sini, karena da'i di sini sangat dibutuhkan untuk membentengi moral masyarakat dari pengaruh budaya yang tidak baik, narkoba, kenakalan remaja, perempuan yang hamil diluar nikah<sup>29</sup>. Hal yang sama disampaikan Anwar, di mana menurutnya manfaat dari kehadiran da'i sangat besar bagi masyarakat. Namun demikian dalam penyampaian ceramah

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Abdurrahman bin Manaf, Datok Penghulu (Keuchik), Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Tamiang, Tanggal, 24 Agustus 2015.

<sup>29</sup>Wawancara dengan Aidil (Masyarakat), Kampung Tangse Lama, Kecamatan Seruway, Tamiang, 25 Agustus 2015 di Tamiang.

atau pengajiannya nampak masih ada komunikasi yang dipakai kurang etis. Jika ada yang berbeda langsung dikatakan, jadi yang tidak sependapat dengan da'i jelas akan merasa tersinggung karena langsung di depan umum.<sup>30</sup>

Meskipun mayoritas masyarakat merespon secara baik kedatangan da'i, namun sebagian kecil masyarakat memberikan respon kurang baik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan (*khilafiyah*) antara Imeum Gampong dengan pemikiran yang disampaikan da'i. Misalnya, dalam hal membayar zakat fitrah antara beras dan uang dan masalah khilafiyah lainnya. Namun demikian, perbedaan pendapat ini tidak menyebabkan tugas dan peran da'i dalam masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya<sup>31</sup>.

Di samping adanya respon positif, ada juga masyarakat yang menyampaikan respon negatif terhadap keberadaan para da'i di tengah-tengah mereka. Menurut pengamatan masyarakat, peran dan fungsi yang menjadi tanggung jawab da'i belum berjalan maksimal. Masih banyak di antaranya yang mengabaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu, ada juga di antara para da'i yang tidak menetap di Desa setempat. Artinya mereka tinggal di tempat lain dan mengunjungi ke Desa yang ditempatkan berdasarkan SK dari DSI sesuka hatinya.

Salah satu penyebab kurangnya interaksi antara masyarakat dengan da'i adalah kurang memperhatikan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Langkah

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Anwar, (Masyarakat), Kampung Tangse Lama, Kecamatan Seruwai, Tamiang, 25 Agustus 2015 di Tamiang.

<sup>31</sup>Wawancara dengan T. Armansyah, Anggota Majelis Duduk Setikar (MDSK/Tuha Peut], Kampung Tangsi Lama Kecamatan Seruwai, Kabupaten Tamiang, Tanggal, 25 Agustus 2015 di Tamiang.

yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan cara tidak menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi yang sulit dimengerti. Sebagaimana pepatah “*dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*”. Kalau seorang da’i mampu menerapkan nilai-nilai peribahasa tadi, maka tidak ada kendala di lapangan.<sup>32</sup>

Keluhan lain yang terjadi di lapangan terkait penempatan da’i dapat ditelusuri terhadap apa yang terjadi di Desa Cibubukan, Simpang Kanan Aceh Singkil. Praktek yang dilakukan oleh Da’i tidak seperti yang telah dilaksanakannya di lapangan. Da’i tidak lagi tinggal di Gampong dimana ia ditempatkan, padahal sejak tahun 2011 ia ditugaskan di Gampong Cibubukan. Namun dalam laporan bulanan yang disampaikan seolah-olah sesuai dengan yang dilaksanakan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Keuchik Gampong Cibubukan. Sebenarnya Keuchik merasa keberatan terhadap laporan yang disampaikan para Da’i, tapi karena adanya rasa sayang ia menandatangani. Namun ia berjanji tidak akan menandatangani lagi ke depan bila isi laporan tidak sesuai dengan pelaksanaan yang sebenarnya.<sup>33</sup>

Kegagalan da’i lainnya dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh MPU Aceh Singkil. Dalam setiap tahunnya MPU Aceh Singkil menyelenggarakan program *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar*. Untuk menyukseskan acara ini, MPU mengundang satu gampong, jika dalam gampong tersebut terdapat

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Ramlan, Tokoh Masyarakat dan Anggota FKUB Singkil, Tanggal, 16 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>33</sup>Wawancara dengan Asron, Kepala Desa, Cibubukan Kecamatan Simpang kanan, Singkil, Tanggal 20 Agustus 2015. Pada saat kepala desa didampingi Tuha Peut, melaporkan bahwa da’i atas nama Habiby sudah bertugas di Desa Cibubukan sejak tahun 2011.

para da'i turut diundang untuk terlibat di dalamnya. Namun, da'i yang diundang ada yang mengindahkan undangan MPU namun ada pula yang mengabaikannya. Oleh karenanya, peran da'i di Singkil tidak berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan banyak da'i yang bukan berasal dari daerah tersebut. Akibatnya, mereka merasa bosan mengabdikan dalam jangka waktu yang lama<sup>34</sup>.

Keterbatasan da'i tidak mungkin menjangkau ke semua wilayah seperti di kecamatan pulau banyak, wilayahnya luas, da'inya hanya satu orang sehingga si da'i ini tidak mungkin turun ke semua desa. Seyogyanya pemerintah menambah quota personil da'i ke setiap daerah agar peran dan fungsi da'i terutama berkaitan dengan kerukunan dan menghadapi pendangkalan aqidah umat benar-benar maksimal.<sup>35</sup>

Luas wilayah di Singkil memiliki perbedaan antara satu Desa dengan Desa lain. Akibatnya akan berpengaruh pada peran dan fungsi da'i yang diutuskan ke daerah tersebut. Wilayah yang tidak terlalu luas dapat dijangkau oleh da'i yang jumlahnya sangat terbatas. Sebaliknya bagi wilayah yang memiliki teritorial yang luas, sangat sulit untuk dijangkau dengan jumlah da'i yang relatif lebih sedikit.

## **2. Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Da'i Perbatasan**

Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang menjadi program para da'i mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Terutama sekali bagi para ibu-ibu dan anak-anak yang selalu menghadiri setiap pengajian

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Rasyidudin, SH, Ketua MPU Aceh Singkil, Tanggal 18 Agustus 2016 di Singkil.

<sup>35</sup>Wawancara dengan Ramlan, Tokoh Masyarakat dan Anggota FKUB Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.



yang dilaksanakan. Berbeda halnya dengan kaum bapak yang sangat kurang keikutsertaannya dalam Majelis Ta'lim di *gampong*. Meskipun pada kenyataannya hanya sebagian kecil bapak-bapak yang mengikuti pengajian, tapi mereka sangat mendukung keberadaan para da'i. Kurangnya terlibat kaum Bapak dalam acara tersebut dikarenakan mereka kurang mengetahui fungsi dari para da'i yang dikirimkan ke wilayah perbatasan.

Sebagian besar responden menyampaikan sangat memuaskan terhadap kebijakan dari DSI. Baik itu kalangan tokoh masyarakat, ormas Islam, dan MPU, Imam Mesjid, Keuchik menyampaikan hal yang sama. Semua masyarakat sangat mendukung segala program-program yang dilancarkan oleh kelompok da'i. Indikasi dukungan dari masyarakat ini dapat dilihat dari keterlibatan langsung masyarakat pada saat acara berlangsung. Masyarakat sangat antusias menerima da'i karena dengan adanya mereka ini, sangat terbantu dalam meningkatkan kegiatan keagamaan di desa, khususnya dalam hal pembinaan aqidah bagi masyarakat sehingga terhindar dari penangkalan aqidah dan aliran sesat. Di samping mencegah pendangkalan aqidah juga mereka menghidupkan TPA dan juga membuat pengkaderan guru TPA, khusus bagi remaja laki-laki dilakukan pengkaderan untuk menjadi khatib.<sup>36</sup>

Peran yang dilaksanakan da'i dalam menjalankan berbagai program oleh sebagian masyarakat menganggap belum memuaskan. Menurut Budi Birutu, untuk sekarang peran da'i masih kurang khususnya di kampungnya, da'i hanya datang pada hari atau malam jumat saja, dan ia tidak tinggal menetap di kampung

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Muslim Bancin, Ketua Forum Da'i Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 15 Agustus 2015 di Singkil.

ini, terkait dengan pengajian anak-anak juga da'i tidak terlibat, pengajian anak diajarkan dimotori oleh masyarakat sendiri ada seorang guru (masih remaja dan perempuan) atas swadaya masyarakat.

Dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat dapat dilihat dengan dapat dihidupkan kembali shalat berjamaah di mesjid, pengajian untuk para ibu-ibu dan anak-anak. Kenyataan ini jarang sekali terjadi sebelum adanya kebijakan pemerintah terhadap penempatan da'i di daerahnya. Pemahaman keagamaan masyarakat semakin mendalam karena dibekali dengan ilmu-ilmu agama dalam setiap pertemuan.

Kehadiran da'i memiliki manfaat besar bagi setiap lapisan masyarakat. Manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh anak-anak melalui kebijakan ini adalah mereka sudah dapat membaca dan menulis dalam bahasa Arab. Sebelumnya anak-anak tidak bisa mengaji, tapi setelah adanya da'i yang ikhlas mengajarnya menjadi lebih mahir mengaji. Begitu juga dalam tata pergaulan dan tingkah laku serta tata krama dalam kehidupan menjadi lebih baik. Anak-anak tidak menghabiskan waktunya secara sia-sia kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Setelah pulang dari sekolah anak-anak langsung menuju ke lokasi pengajian guna untuk memperdalam kajian-kajian keislaman dan ilmu-ilmu agama<sup>37</sup>.

Kenyataan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan DSI yang berhasil mengubah perilaku masyarakat yang berada di wilayah perbatasan melalui da'i-da'i yang diutuskan. DSI telah menorehkan revolusi besar bagi

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Makmur Manik, Keuchik Tanjung Betik, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Gampong 18 Agustus 2015 di Singkil.

pembangunan dan peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat yang berdomisili di Aceh. Namun perlu dievaluasi kembali terhadap kinerja para da'i yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas kinerja da'i selama ini adalah memperketat proses seleksi da'i-da'i yang akan ditempatkan di wilayah perbatasan. Tindakan ini perlu dilakukan oleh DSI Aceh supaya tidak ada masyarakat yang memandang skeptis terhadap kebijakan-kebijakan yang dicetuskan. Di samping itu, langkah yang perlu dilakukan adalah mengutuskan para supervisor yang memonitoring kinerja para da'i di lapangan dan *check and recheck* pada saat pelaksanaan da'i melakukan tugasnya.

Suatu kebanggaan besar bagi masyarakat perbatasan yang tinggal di wilayah Aceh Tamiang menerima para da'i yang diutuskan oleh Dinas Syari'at Islam Aceh. Para da'i dianggap sebagai aktor pembawa perubahan bagi segenap masyarakat setempat khususnya di bidang pemahaman keagamaan. Aktor di sini berarti orang yang memiliki peran penting yang menyebarluaskan serta berbagi ilmu-ilmu keislaman guna dan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah SWT dan memberikan pemahaman secara mendalam melalui kajian-kajian rutin yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan itu, untuk mengantisipasi penyebaran virus-virus ajaran yang tidak sesuai dengan nash-nash al-Quran dan Sunnah masyarakat sangat antusias mengikuti segala pengajian yang dilakukan para da'i. Mereka merasa yakin terhadap kemampuan da'i dan kualitas da'i terkait pemahaman ajaran agama, karena dikirimkan langsung oleh DSI Aceh, bukan dari lembaga-lembaga

sosial yang memiliki visi misi dan kepentingan berbeda. Oleh karena itu, mereka rutin pengajian-pengajian yang diadakan pada jadwal yang telah ditentukan. Seperti samadiah bersama masyarakat yang dilaksanakan setiap malam jumat.

Masyarakat sangat antusias mengikuti program-program yang diagendakan para da'i. Tapi kadangkala tidak semua masyarakat dapat menghadiri pengajian tersebut. Faktor yang menyebabkan tidak semua masyarakat dapat hadir dalam *majlis ta'lim* dikarenakan status sosial masyarakat berbeda-beda. Sebagian dari mereka yang berprofesi sebagai Satuan Keamanan (Satpam), petugas kebersihan (*cleaning servis*), bagian pabrik dan sebagian yang lain berprofesi sebagai pekebun murni.

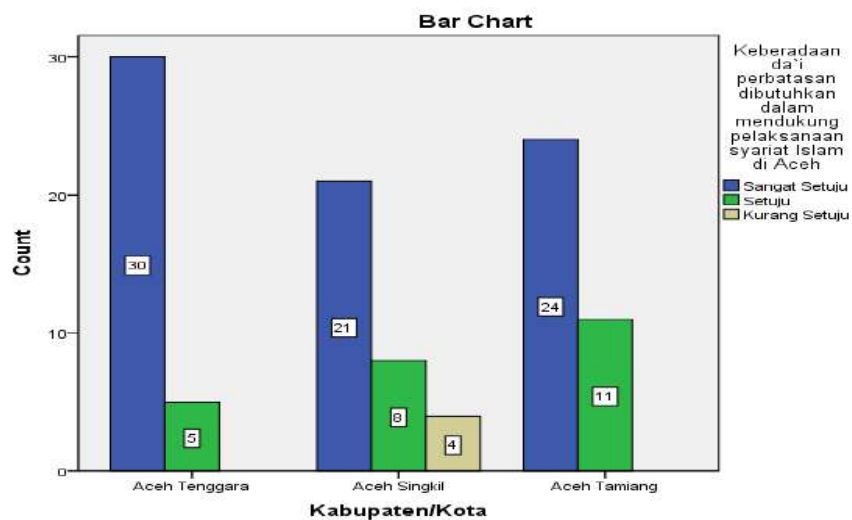
Setiap hari masyarakat disibukkan dengan rutinitasnya masing-masing yang dapat menghalangi program yang dilakukan oleh para da'i. Para pekebun yang tiap harinya menghabiskan waktunya di kebun-untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, begitu juga dengan profesi-profesi lain. Para pekerja yang berprofesi sebagai buruh perusahaan, yang rela mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk mengabdikan diri di perusahaan. Mereka lebih tunduk kepada atasan supaya tidak dilakukan Pemutusan Hukum Kerja (PHK)<sup>38</sup>.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari ketiga wilayah kabupaten Kota yakni Kab. Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Aceh Tamiang mengindikasikan adanya sambutan hangat dari kalangan masyarakat. Antusias masyarakat mengikuti segala program yang dilaksanakan menjadi acuan utama dalam menilai keberhasilan da'i. Program-program yang dilakukan para da'i

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad, Datok Penghulu (Keuchik) Gampong Perkebunan Seruwei, Kec. Seruwai, Aceh Tamiang, 25 Agustus 2015 di Tamiang.

selama berada di wilayah perbatasan menjadi nilai plus dalam penegakan syari'at Islam di Aceh sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Aceh. Data yang diperoleh melalui hasil angket yang diisikan masyarakat menunjukkan angka sebagai berikut:



Mayoritas masyarakat sangat setuju dengan kebijakan Dinas Syari'at Islam menempatkan da'i di wilayah perbatasan mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Aceh Tenggara menempati urutan pertama dari tiga wilayah yang memberikan respon sangat setuju yaitu 30 % , 5 % setuju dan 0 % yang tidak setuju. Untuk wilayah Aceh Singkil 21 % masyarakat memberikan respon sangat setuju, 8 % setuju dan 4 % tidak setuju. Kemudian disusul oleh Aceh Tamiang yang memberikan respon setuju sebanyak 24 %, 11 % setuju dan 0 % tidak setuju.

Melalui data tersebut menjadi acuan pengukuran bahwa salah satu langkah strategis pemberlakuan syari'at Islam secara kaffah di bumi Serambi Mekkah dengan mengutus da'i ke wilayah perbatasan. Hal ini mengandung pembenaran, karena dengan adanya acara program ini, para da'i berperan aktif sebagai

perpanjangan tangan Pemerintah untuk melakukan kebajikan dan menghindari dari pelanggaran. Melalui program ini pula, seorang da'i berperan sebagai orang yang mensosialisasi qanun-qanun syari'at Islam ke wilayah-wilayah perbatasan. Terutama sekali berkaitan dengan pendangkalan aqidah yang selama ini marak terjadi di Aceh, sosialisasi Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Aceh Nomor 14 tentang Khalwat serta Qanun-Qanun lainnya yang memiliki relevansi dengan penegakan syari'at Islam di Aceh.

Perlu tambahan informasi mengenai masalah partisipasi masyarakat di beberapa wilayah seperti di Tamiang, ada yang memberikan tumpangan rumah kepada da'i secara suka rela demikian pula memberikan wakaf tanah untuk pembangunan pesantren. Di Subulussalam, meskipun ini tidak menjadi wilayah penelitian, namun termasuk tempat da'i perbatasan masyarakat memberikan waqaf tanah seluas 5 hektar untuk pembangunan Pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat beberapa tempat cukup baik, meskipun ada juga yang belum maksimal.

Fenomena yang sama terjadi pada ketiga wilayah penempatan da'i perbatasan Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Aceh Tamiang. Fenomena dimaksud adalah respon yang diberikan oleh pihak laki-laki atau kaum bapak-bapak dalam mengikuti acara pengajian sangat minim, jika dibandingkan dengan pihak perempuan atau kaum ibu-ibu. Alasan aktifnya ibu-ibu, karena aktifitas kaum ibu sebagai pelaku mata pencaharian tidak seleluasa kaum laki-laki. Karena

itu, kegiatan dakwah paling banyak dikonsumsi oleh kaum perempuan di wilayah perbatasan.

Faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi bapak-bapak dalam program yang dicetuskan para da'i dikarenakan oleh faktor internalnya yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya ilmu-ilmu keagamaan. Mereka kurang menyadari bahwa ilmu agama menjadi bekal yang bisa dibawa hingga akhirat. Bahkan Nabi bersabda "*Apabila kamu ingin bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu, bila kamu ingin bahagia akhirat, harus dengan ilmu, apabila kamu ingin bahagia dua-duanya, maka harus dengan ilmu*".

### **3. Tantangan dan Kendala Da'i Perbatasan dalam Menjalankan Tugas**

#### **a. Perbedaan Pemahaman Keagamaan**

Da'i perbatasan dalam menjalankan tugasnya mengalami berbagai kendala dan hambatan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi daerah yang mereka alami. Tgk. Muhammad Hamdani, mengatakan bahwa di antara kendala dan hambatan yang dihadapi da'i berkaitan dengan perbedaan mazhab dan perbedaan pemahaman keagamaan yang dipahami oleh da'i dengan beberapa aparat *gampong* terutama teungku imum. Misalnya pemahaman da'i tentang membayar zakat fitrah, tidak boleh dengan uang, karena yang sama pelajari di Dayah yang bermazhab Syafii harus dengan Beras. Teungku Imum berpendapat boleh dengan alasan Majelis Permusyawaratan Ulama saja membolehkan membayar dengan uang. Demikian pula seorang yang berberdiri dibelakang imam pada shaf pertama menurut saya harus yang mampu menjadi imam ketika imam shalat tiba-tiba berhalangan. Masyarakat ada yang menentang pendapat da'i

perbatasan dengan alasan bahwa jika ketat menerapkan syarat-syarat shalat jamaah, maka orang akan semakin sedikit berjamaah di masjid. Namun demikian meskipun ada masalah seperti ini, tugas dan peran da'i tidak berpengaruh terhadap efektivitasnya.<sup>39</sup>

Demikian hal yang dialami oleh Tgk. Jamaluddin ia menegaskan bahwa perbedaan pemahaman keagamaan juga terjadi dalam persoalan batalnya wudhuk antara suami isteri. Menurut masyarakat disini jika bersentuhan antara suami dan istri, maka tidak batal wudhunya. Hal ini boleh jadi sesuai dengan kondisi alam, karena mereka mandi, mencuci di sungai, jika mereka pulang dengan memakai kereta suami isteri bersentuhan kemudian mereka shalat di rumah tanpa berwudhuk ulang. Namun demikian saya jelaskan bahwa, memang ada pendapat Imam Malik bahwa tidak batal wudhuk jika bersentuhan suami dan istri. Akan tetapi menurut Imam Syafii yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Aceh itu batal jika bersentuhan. Persoalan ini tidak terlalu menjadi masalah dalam menjalankan tugas da'i disini.<sup>40</sup>

Tantangan dan kendala da'i perbatasan dalam menjalankan tugas dan perannya, juga disebabkan oleh masalah perbedaan pemahaman dan praktek keagamaan yang disampaikan kepada masyarakat. Sehingga ada beberapa aparat gampong yang melapor tentang masalah tersebut. Perbedaan mazhab Sebenarnya bukanlah menjadipenghambat, tetapi terkadang ada da'i yang memaksa pendapatnya kepada masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan. Kemudian

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hamdani, Da'i Kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Tamiang 25 Agustus 2015 di Tamiang.

<sup>40</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, S.Pd.I, Da'i Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang, Tanggal 24 Agustus 2015 di Bengkelang.



masih ada di antara da'i yang mempertajam perbedaan pemahaman keagamaan masyarakat/khilafiyah sehingga berpotensi memperkeruh keadaan masyarakat.<sup>41</sup>

Sehingga dengan demikian perbedaan mazhab antara da'i dan imam mesjid atau meunasah, berimbas kepada tidak adanya dukungan dari imam mesjid/meunasah sangat kurang hal ini disebabkan berbedanya aliran dan mazhab yang dianut. Adakalanya para imam mesjid dan meunasah tadi memposisikan da'i ini sebagai kelompok Wahabi.<sup>42</sup>

Namun, menurut Ustaz Supian Husni Salam, Pengurus DDII Aceh Tenggara menjelaskan bahwa mengenai kendala berkaitan dengan perbedaan mazhab, akan tetapi kendalanya hanya sebatas informasi. Artinya perbedaan mazhab antara da'i dan masyarakat terutama tokoh agama (Imam) belum sampai pada munculnya gerakan-gerakan atau demonstrasi yang mengarah kepada anarkis. Berdasarkan laporan masyarakat memang ada da'i yang berkontradiksi dengan masyarakat karena mereka berbeda dalam kerangka berpikirnya, sehingga mereka menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang selama ini dipahami masyarakat sehingga hal ini bisa menjadi kendala.<sup>43</sup>

## **b. Perbedaan Etnis dan Budaya**

Kendala dan tantangan lain yang dihadapi da'i dalam menjalankan tugasnya adalah persoalan kultur, etnis dan adat istiadat setempat. Sebagaimana

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Roswin Hakim, Ketua Muhammadiyah Aceh Singkil, Tanggal 18 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>42</sup>Wawancara dengan Nurhasanah, Da'i Kampung Tanjung Betik Aceh Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>43</sup>Wawancara dengan Ustaz Supian Husni Salam, M.Ed, Pengurus DDII Aceh Tenggara, Tanggal 20 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

yang dialami oleh Ustaz Agus Nurjamil di Kampung Karo Aceh Tenggara. Di mana masyarakatnya mayoritas bersuku Karo sangat kental dengan pola adatnya, sehingga jika ada upacara adat, maka kegiatan keagamaan seperti pengajian dan shalatberjama'ah di mesjid tidak ramai yang datang, tetapi jika waktu azan berkumandang mereka menghentikan kegiatannya. Artinya kegiatan adat masih dianggap penting sehingga kegiatan agama dapat diabaikan. Kurangnya partisipasi dalam kegiatan keagamaan di kampung ini dikarenakan kegiatan adat karo lebih mendominasi, sehingga walaupun sudah berkordinasi dengan penghulu dan tokoh masyarakat dan bahkan sampai Imam, khatib dan bilal sampai ke Camat Ruhul Makmur dan Camat Lawesigala sebagai camat perbatasan dan hasilnya sama saja. Menurut mereka kegiatan keagamaan belum maksimal berjalan disebabkan aktivitas adat dan belum pahamnya masyarakat terhadap TUPOKSI da'i perbatasan.<sup>44</sup>

Selain di Aceh Tenggara, di Tamiang perbedaan etnis juga menjadi kendala, karena mayoritas di kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruwai Kabupaten Tamiang adalah berbahasa Melayu sedangkan Da'i yang datang berbahasa Aceh, jadi bahasa pengantar dan kulturnya sedikit berbeda. Meskipun demikian perbedaan tersebut tidak terlalu berdampak pada tugas dan peran da'i, bagi saya sebagai perangkat gampong ditengah-tengah tidak memihak.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Ustaz Agus Nurjamil, S.Pd.I, Da'i Kampung Sabilussalam/Kp. Karo, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>45</sup>Wawancara dengan T. Armansyah, Majelis Duduk Setikar (MDSK [Tuha Peut], Kampung Tangsi Lama Kecamatan Seruwai, Kabupaten Tamiang, tanggal 25 Agustus 2015 di Tamiang.

Oleh karena itulah, Drs. Hamidin, M.Pd Kadis DSI Aceh Tenggara mengusulkan hendaknya putra daerah masing-masinglah yang menjadi da'i perbatasan di daerahnya, karena jika ada da'i yang berasal dari luar daerah Aceh Tenggara, mereka sering meninggalkan lokasi karena serin pulang kampung dan masalah ini DSI Provinsi tidak mengetahui, yang tahu hanyalah DSI kabupaten kota.<sup>46</sup> Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Rasyiduddin, Ketua MPU Aceh Singkil. Menurut pendapatnya kebanyakan da'i bukan merupakan putra daerah, kebanyakan da'i berasal dari luar Singkil dan Subulussalam, hal ini terjadi karena pola rekrutment da'ii yang berubah-ubah, dulu kewenangan rekrutment da'i diberikan kepada masing-masing kabupaten meskipun tim dari DSI provinsi juga terlibat dalam penyeleksian, sehingga tim dari kabuptenlah yang lebih berperan dalam menyeleksi putra daerah untuk menjadi calon da'i yang akan ditugaskan di desa-desa, namun sekarang rekrutment da'i itu ada di provinsi.<sup>47</sup>

Di samping jauhnya jarak tempuh yang menjadi kendala bagi da'i dalam melakukan aktivitasnya, masalah bahasa juga menjadi problem tersendiri bagi da'i untuk berkomunikasi dengan warga. Da'i adakalanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi warga ada yang tidak memahami bahasa Indonesia dan sebaliknya, warga menggunakan bahasa daerah dan da'i tidak mengetahui. Jadi dari segi bahasa menjadi kendala bagi da'i di lapangan.<sup>48</sup> Pendapat yang hampir senada juga dikemukakan oleh Nurhasanah, da'i desa Tanjung betik Aceh Singkil, menurut

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Drs. Hamidin, M.Pd, Kadis DSI Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Rasyiduddin, Ketua MPU Aceh Singkil, Tanggal 18 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Muslim Bancin, Ketua Forum Da'i Aceh Singkil, Tanggal 15 Agustus 2015 di Singkil.

pendapatnya tidak menguasai bahasa daerah merupakan satu kendala bagi da'i, karena ada daerah tertentu dimana masyarakatnya tidak bisa bahasa Indonesia sehingga menyulitkan da'i untuk berkomunikasi dengan mereka.<sup>49</sup>

Namun demikian, berkaitan dengan perbedaan etnis dan suku, ada juga sebagian masyarakat berpendapat tidak menjadi persoalan dan kendala bagi da'i dalam menjalankan tugas dan perannya. Mengenai perbedaan suku dan etnis, sama sekali tidak menjadi kendala bagi da'i dalam melaksanakan peran dan fungsinya, hal ini sebagaimana yang terjadi di Aceh Tenggara. Itulah bedanya di Aceh Tenggara dengan Aceh yang lainnya, masyarakat Aceh Tenggara cukup terbuka dan menghargai perbedaan etnis tersebut dengan cara saling menghargai, walaupun da'i itu sendiri bukan dari etnis mereka.

### **c. Kondisi Geografis**

Kendala lain yang dihadapi da'i dalam menjalankan tugas dan perannya adalah persoalan geografis dan demografis dan lokasi wilayah kerja. Di Tamiang misalnya, jarak antara Kuala Simpang dengan Kampung Bengkelang, termasuk terpencil (menurut data UPTD Da'i DSI Provinsi) sekitar 40 kilometer jika memakai sepeda motor jarak tempuh 1.5 jam, jika musim hujan berubah menjadi 2.5 jam disebabkan jalan berlobang dan becek. Kondisi jalan yang lebih banyak tanah dan batu, hanya sedikit aspal. Secara etnis lebih banyak berbahasa Gayo karena lebih dekat dengan Gayo Luwes, namun uniknya sebagian besar dapat berbahasa Melayu Tamiang. Ada dua kampung lagi berbatasan dengan Aceh Timur dan Gayo Luwes. Kebanyakan masyarakat adalah petani Sawit dan ladang,

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Nurhasanah, Da'i Kampung Tanjung Betik Aceh Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.

sebagian karet. Pada musim-musim tertentu seperti Agustus dan September, masyarakat lebih banyak ke ladang untuk menjaga Padi yang sedang berbuah agar tidak dimakan oleh burung dan binatang lainnya. Sehingga mereka ke ladang pada Sabtu Sore dan kembali ke rumah Kamis pagi. Akibatnya kegiatan dimasjid terkait dengan masyarakat praktis hanya dapat dilakukan mulai dari Kamis, Jumat sampai Sabtu.<sup>50</sup>

Masih di Tamiang, pengakuan Robiatul Adawiyah, Da'i Perbatasan di Gampong Kaloy, Tamiang juga cukup memprihatinkan. Lokasi penempatan da'i provinsi betul-betul daerah yang sangat terpencil dan medan yang sangat sulit, kalau hujan jalannya sangat licin dan berlumpur, terkadang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. Bahkan pengakuan Robiatul Adawiyah, sudah 2 kali keguguran karena medan tempatnya bertugas jalannya sangat sulit dan terpencil.<sup>51</sup>

Selain itu, ada juga pandangan dari tokoh masyarakat untuk di Aceh Tenggara, secara umum tidak menjadi kendala bagi da'i dalam menjalankan peran dan fungsinya. Daerahnya pun cukup bisa dijangkau oleh da'i. Begitu juga dengan keberadaan da'i dari luar Aceh tenggara, sama sekali tidak menjadi kendala sama sekali.<sup>52</sup>

#### **d. Fasilitas Da'i**

Kendala lain ada adalah fasilitas pendukung sebagaimana diutarakan oleh Amsal, Tokoh masyarakat Tanjung Betik, yang mengatakan bahwasarana dan

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Abdurrahman bin Manaf, Datok Penghulu (Keuchik), Kampung Bengkelan, Kecamatan Bandar Pusaka, 24 Agustus 2015 di Bengkalang

<sup>51</sup>Wawancara dengan Robiatul Adawiyah, Da'i Perbatasan Gampong Kaloy, Kec. Tamiang Hulu, Tamiang, tanggal 24 Agustus 2015 di Tamiang.

<sup>52</sup>Wawancara dengan Ustaz Supian Husni Salam, M.Ed, Pengurus DDII Aceh Tenggara, Tanggal 20 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

prasarana ibadah yang tidak memadai seperti meunasah saja belum siap sehingga untuk mendirikan shalat berjama'ah lima waktu menjadi kendala. Tidak disediakan tempat tinggal sehingga menyulitkan da'i untuk menjalankan tugasnya<sup>53</sup>

Dari segi sarana dan prasarana pendukung syari'at memang masih dapat dikatakan belum memadai, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana peribadatan maupun sarana dan fasilitas yang diterima langsung oleh da'i sehingga menjadi kendala dalam menjalankan syari'at itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Abdur Rani, (Bidang Sumber Daya Da'i Perbatasan DSI Aceh) yang mengatakan bahwa Adapun, kendala yang dihadapi da'i perbatasan-dari catatan saya adalah awal tahun, karena amprahan honor dirapel sebanyak 3 bulan. Jadi, Januari hingga Maret mereka harus bersabar, jika perlu harus berhutang, baru kemudian diamprah dicairkan pada bulan April. Teknis ini karena bergantung pada pola APBA kita di Aceh, menunggu diketok palu anggaran. Meskipun begitu, hari ini semua da'i telah memiliki fasilitas kendaraan untuk menunjang kerja mereka di perbatasan. Honor da'i memang bervariasi, dahulunya Rp. 2.800.000,- sekarang sudah meningkat menjadi Rp. 3.000.000,-. Khusus untuk da'i terpencil memang sedikit lebih tinggi dari perbatasan, mengingat posisi terpencil medannya lebih berat. Selain itu, kita juga menyediakan per wilayah satu Mess da'i, yang akan digunakan untuk pertemuan dan diskusi akhir tahun da'i. Fungsi Mess, sangat penting dan bermanfaat bagi da'i dalam melakukan pertemuan, sharing dan

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Amsar, Tokoh Masyarakat Tanjung Betik, Singkil, Tanggal 18 Agustus 2015 di Singkil.

melakukan pertemuan-pertemuan sesama mereka. Selain itu, perwilaya da'i juga diangkat seorang koordinator da'i yang menjadi ketua-guna mempermudah komunikasi dengan pihak provinsi, dan menangani beberapa persoalan da'i, seperti menyerahkan laporan yang dikirim secara kolektif.<sup>54</sup>

#### **e. Gerakan Kristenisasi**

Gerakan Kristenisasi secara terstruktur merupakan kendala tersendiri sebagai upaya ini cukup masih dilakukan terutama di Singkil dan Aceh Tenggara. Menurut Nyak Arif Fadhlilisyah, pernah menjadi Da'i selama empat tahun di Singkil, gerakan Kristenisasi sulit dibendung karena mereka mempunyai segelanya, dana yang banyak (gaji kami sekitar 1.500.000 mereka sudah sekitar 4-5 juta), fasilitas komunikasi (telepon) yang saat itu kami belum ada mereka sudah lengkap.<sup>55</sup>

Senada dengan itu gerakan Kristenisasi juga dapat dilihat dari siaran khusus dari radio khusus yang bias menyiarkan materi-materi dakwah. Perlu diketahui ada radio dari daerah Sumatera Utara tepatnya di Sidikalang yang siarannya khusus tentang rohani Kristiani yang bisa ditangkap siarannya di Singkil.<sup>56</sup>

Gerakan Kristenisasi bukanlah isu baru di Aceh sejak beberapa tahun terakhir masalah ini muncul di beberapa daerah seperti di Banda Aceh, Meulaboh,

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Abdul Rani, Staf Bidang Sumber Daya DSI Aceh, Tanggal 19 Agustus 2015 di Banda Aceh.

<sup>55</sup>Hal ini ungkapkan oleh Nyak Arif Fadhlilisyah, Da'i Perbatasan di Singkil sekitar 2003-2006, pada Seminar Hasil Penelitian di Banda Aceh, 23 Oktober 2015.

<sup>56</sup>Wawancara dengan Muslim Bancin, Ketua Forum Da'i Aceh Singkil, Tanggal 15 Agustus 2015 di Singkil.

Pidie dan beberapa tempat lainnya. Untuk di Singkil baru-baru timbul pembakaran gereja illegal. Pembakaran ini terjadi disebabkan gereja yang dibangun tidak memenuhi persyaratan secara hukum dan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Massifnya pembangunan gereja merupakan bukti bahwa gerakan Kristenisasi nyata adanya.

#### **f. Kehadiran Da'i di tempat**

Selain tidak menguasai bahasa daerah menjadi suatu kendala tersendiri bagi para da'i, faktor da'i tidak menetap di lokasi atau di desa tempat ditugaskan juga menjadi kendala besar da'i dalam menjalankan Tupoksinya. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Rasyiduddin, Ketua MPU Aceh Singkil, menurut pendapatnya, karena para da'i tidak menetap di desa tugas menyebabkan mereka jarang datang ke lokasi atau desa, akibatnya kegiatan keagamaan juga menjadi terhambat.<sup>57</sup>

Pendapat yang hampir senada juga disampaikan oleh Efendi, Kadis DSI Aceh Tamiang. Menurut pendapatnya mengenai keberadaan da'i di lapangan memang ada beberapa laporan dan temuan bahwa beberapa da'i tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Untuk di Tamiang tidak terlalu dipaksakan, karena mereka juga ada MESS yang berada di Kabupaten. Namun demikian kami menghimbau agar mereka menetap di gampong. Yang wajib ada harus memenuhi 20 jam kegiatan dalam laporan. Da'i yang bermasalah pada

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Rasyiduddin, Ketua MPU Aceh Singkil, Tanggal 18 Agustus 2015 di Singkil.



umumnya mereka yang tidak menetap di desa kemudian untuk da'ii yang memang bermasalah, ada yang dipindahkan ke daerah lain.<sup>58</sup>

#### **4. Upaya Menghadapi Tantangan dan Kendala**

Setiap persoalan dan kendala yang ada, mestilah diselesaikan dengan bijak dan tidak lari dari problem tersebut. Demikian pula berbagai kendala yang dihadapi da'i dalam menjalankan tupoksinya seyogyanya diselesaikan dengan baik. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala tersebut, tentu saja membutuhkan langkah-langkah dan cara yang tepat.

Adapun cara menghadapi kendala tentang perbedaaan mazhab, dengan tetap menyampaikan apa yang dipahami dengan menunjukkan dalil-dalil yang menguatkannya sehingga segala persoalan perbedaan ada landasan pijak yang membenarkan sebagaimana yang terdapat dalam beberapa kitab fiqih, bukan mengedepankan pendapat pribadi. Dengan cara tersebut kendala ini dapat di atas. Pihak-pihak yang terlibat dalam mengatasi kendala ini adalah Datok Penghulu (Kepala Desa) dan Majelis Duduk Setikar (MDSK) dan pihak pemuda dan masyarakat lainnya.<sup>59</sup>

Selama ini terhadap perbedaan paham yang disebarkan maka solusinya da'i tersebut harus dibina dan diberikan maukan, kalau dia tetap bersikeras maka dipindahkan ke tempat atau desa yang lebih siap menerimanya. Kemudian

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Drs. Efendi, Kadis DSI Aceh Tamiyang, tanggal 25 Agustus 2015 di Tamiang.

<sup>59</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hamdani, Da'i Kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Tamiang 25 Agustus 2015

terhadap kendala tersebut, biasanya melibatkan tokoh masyarakat, kementerian agama, MPU, pihak provinsi juga dilibatkan.<sup>60</sup>

Dalam rangka mengatasi kendala di atas, da'i itu harus melakukan penekatan-penekatan kepada masyarakat, oleh karenanya, da'i itu sendiri perlu diberikan bekal pemahaman yang baik tentang perbandingan mazhab. Dalam mengatasi kendala tersebut mereka bekerjasama dengan koordinator da'i lapangan, dengan Kemenag dan MPU yang mereka saling berbagi ilmu pengetahuan.<sup>61</sup>

Dalam mengatasi kendala di atas, dinas syari'at islam telah memanggil dan membuat pernyataan kepada da'i agar tidak mengulangi perbuatannya itu, apabila melanggar juga maka akan dipindahkan ke kabupaten lain atau mundur dari da'i. Biasanya dalam mengatasi masalah da'i ini melibatkan aparat *gampong*, dan Dinas syari'at kabupaten, belum pernah sampai melibatkan lintassektoral.<sup>62</sup>

Cara menghadapi kendala berupa setiap ada persoalan dan pelanggaran seperti perjudian, minum arak, sabun ayam maka pihak da'i melaporkan ke WH. Artinya untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan yang melanggar ajaran agama, maka da'i selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti aparat *gampong*, WH, DSI kab/kota, MPU, Satpol PP dan juga tokoh-tokoh agama.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan H. Alimuddin, Lc, Sekretariat DSI Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Ustaz Supian Husni Salam, M.Ed, Pengurus DDII Aceh Tenggara, Tanggal 20 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>62</sup>Wawancara dengan Drs. Hamidin, M.Pd. Kadis DSI Aceh Tenggara, tanggal 25-9-2015.

<sup>63</sup>Wawancara dengan Nurhasanah, Da'i Kampung Tanjung Betik Aceh Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.

Setiap kendala yang muncul seperti isu aliran sesat, misionaris, maka pihak yang terlibat dalam penyelesaiannya adalah berbagai unsur dan lembaga seperti MPU, MAA, dan lembaga lain yang difasilitasi oleh FKUB kabupaten kota. Pihak FKUB memanggil semua unsur termasuk juga unsur non muslim untuk memecahkan persoalan yang muncul.<sup>64</sup>

Persoalan perbedaan dan pemahaman dan praktek keagamaan antara da'i dan masyarakat dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dan da'i juga dihimbau untuk tidak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan khilafiyah yang dapat membawa pada perbedaan yang tajam dalam masyarakat.<sup>65</sup>

Mengenai masalah kerukunan beragama dengan non Muslim da'i dibekali pengetahuan tentang perbandingan agama yang disampaikan pada saat rapat koordinasi atau pertemuan da'i. Demikian pula pihak DSI Aceh berkoordinasi dengan FKUB pada level provinsi dengan daerah. Seperti yang terjadi di Tamiang sehingga di daerah ini nyaris tidak pernah ada gejolak.

Untuk masalah keberadaan da'i tempat ini terkait dengan monitoring yang berjalan selama ini juga menjadi salah satu kendala bagi da'i di lapangan. Menurut pendapat Muslim Bancin sebagai ketua forum da'i Aceh Singkil mengatakan bahwa tidak ada monitoring dan evaluasi terkait kinerja da'i secara rutin, tetapi yang selama ini berjalan monitoring dilakukan hanya ketika sudah ada

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Ramlan, Tokoh Masyarakat dan Anggota FKUB Aceh Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Efendi, S.Pd, Kadis DSI Aceh Tamiang, Tanggal 25 Agustus 2015 di Singkil.

laporan dari masyarakat terkait dengan da'i, dan tim monitoring hanya mengunjungi tempat yang bermasalah (diacak), sehingga tidak semua lokasi dilakukan monitoring dan evaluasi.<sup>66</sup>

## **5. Efektivitas dan Dampak Program Da'i Perbatasan**

Dari keterangan dan informasi yang dikumpulkan di lapangan, dengan teknik observasi dan wawancara, dari tingkat provinsi Aceh hingga di kabupaten perbatasan tempat da'i bekerja dan melakukan aktivitas, keberadaan da'i perbatasan dianggap vital dan sangat dibutuhkan oleh banyak elemen, bukan hanya masyarakat penerima manfaat program ini, terutama dalam rangka memperkuat aqidah masyarakat perbatasan, yang dapat mengancam nilai dan keyakinan masyarakat setempat.

Kini, Tahun 2015 jumlah da'i yang telah direkrut sebanyak 170 orang, dan rencananya akan ditambah menjadi 200 orang, untuk menunjang kerja da'i yang lebih efektif dan komprehensif. Semua da'i ditempatkan di 6 (enam) kabupaten/kota yang ada di Aceh (Aceh Tamiang, Simeulu, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Aceh Selatan). Dua wilayah, yaitu Aceh Selatan dan Simeulu, dimasukkan sebagai wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan pembinaan provinsi. Pembinaan yang dilakukan oleh para da'i dipusatkan di salah satu gampong yang telah dipilih berdasar penunjuk Dinas Syari'at Islam kabupaten tempat da'i akan ditempatkan.

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Muslim Bancin, Ketua Forum Da'i Aceh Singkil, Tanggal 15 Agustus 2015 di Singkil.

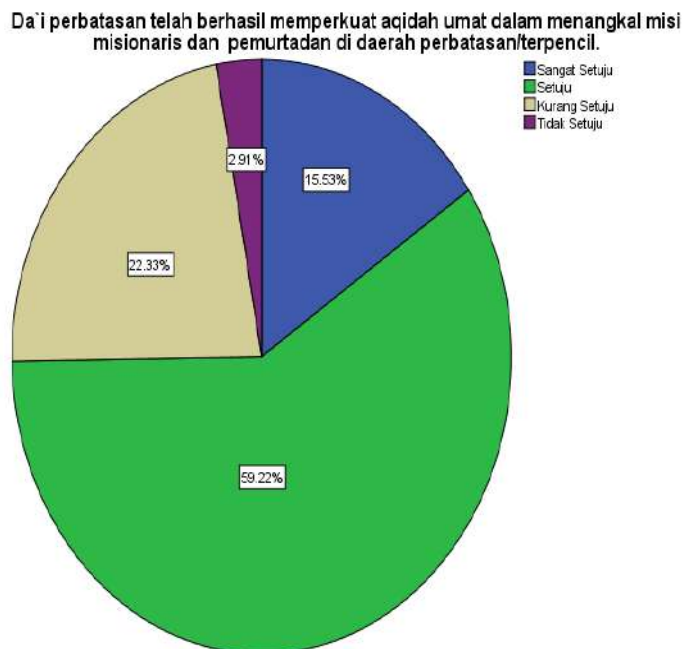
Selanjutnya, berikut ini akan dipaparkan beberapa efektivitas dan dampak yang dihasilkan oleh da'i perbatasan, yaitu:

**a. Penguatan Aqidah Menangkal Kristenisasi dan Aliran Sesat**

Hasil yang efektif yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kehadiran da'i perbatasan adalah penguatan aqidah. Sebagaimana dikemukakan oleh Drs. Maddiyah, M.Pd, Wakil Koordinator Da'i Perbatasan di Tamiang, ia menegaskan bahwa kehadiran da'i cukup banyak dampaknya bagi masyarakat, terutama dalam hal memberikan bimbingan dan pengetahuan dalam bidang agama; tauhid, fiqh dan akhlak. Pembinaan aqidah melalui pengajian, majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya.<sup>67</sup>

Persoalan lain yang dikaji dan dianggap vital adalah terkait penguatan aqidah masyarakat di perbatasan yang selalu terancam oleh misi zending dan misionaris. Da'i perbatasan

telah berhasil memperkuat aqidah umat di perbatasan, dalam upaya menangkal permurtadan dan misionaris oleh pihak Non-Muslim di perbatasan. Angket menunjukkan; 15,53 % sangat setuju, 59,22 %



<sup>67</sup>Wawancara dengan Drs. Maddiyah, M.Pd, Wakil Koordinator dan Kepala Dinas, Efendi, S.Pd, Kabupaten Tamiang Tanggal 25 Agustus 2015 di Tamiang.

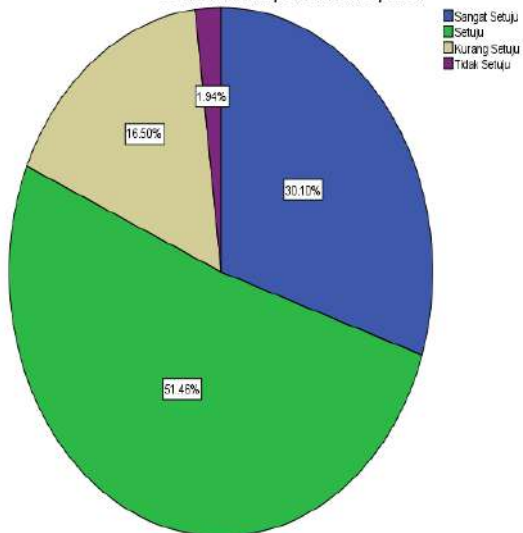
setuju, dan 22,33 % kurang setuju, 2,91 % tidak setuju.

Selain itu, keberadaan da'i juga diharapkan tidak mengganggu aktor, dan elite agama setempat, apalagi merasa dicurigai oleh aktor agama lokal, hingga dirasakan dapat mengancam posisi mereka sebagai elite agama yang selama ini disegani oleh warga sekitar (krisis agensi). Karena itu, da'i harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka ditugaskan, komunikasi dan koordinasi dengan elite harus dibangun dengan rukun.

Pun, dari data angket terkait penangkalan aliran sesat, peran da'i perbatasan juga dinilai efektif, seperti persentase angket berikut : 51.46 % setuju, 30.10 % sangat setuju, dan 16.50 % kurang setuju, 1.94 % tidak setuju. Pemurtadan dan aliran sesat, menjadi isu penting bagi warga perbatasan,

apalagi lingkungan warga sekitar yang langsung berbatasan dengan kabupaten Tapanuli Tengah, di mana sebagian besar warganya adalah Non Muslim. Karena itu, dalam rangka memperkuat aqidah, da'i perbatasan juga dituntut untuk meningkatkan pemahaman agama bagi masyarakat, berikut jawaban persentase terkait kepuasan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman agama warga perbatasan.

Da'i perbatasan telah aktif memperkuat aqidah umat dalam menangkali aliran sesat di daerah perbatasan/terpencil.



Pada sisi lain, ada indikasi keberhasilan da'i dapat dilihat dari banyaknya muallaf, dan Non Muslim seperti di Aceh Singkil yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Datanya, dapat dilihat nanti di kantor DSI Provinsi. Harus diakui, proses Islamisasi sebenarnya juga berlangsung dari program da'i, tapi masuk Islam juga kesadaran mereka sendiri. Efektivitasnya program da'i, sangat tergantung dari kemampuan da'i. Karena itu, kemampuan da'i ditentukan dari proses perekrutan yang jujur, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Nasruddin, selaku Kabid yang menangani program da'i di Dinas Syari'at Islam.

#### **b. Menjaga Kerukunan Antar Agama**

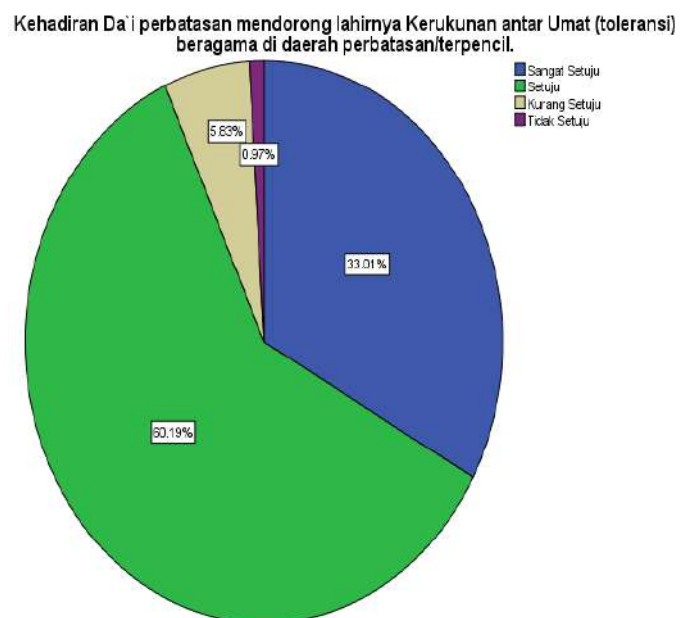
Harus diakui bahwa di beberapa titik, peran da'i sudah sangat baik, seperti yang dijelaskan oleh Makmur Manik, Keuchik di Gunung Meriah, Aceh Singkil. Menurutnya, Da'i perbatasan sangat berperan dalam hal kerukunan umat beragama dan pendangkalan aqidah umat terutama di daerah perbatasan. Berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pendangkalan aqidah, andil dan peran da'i sangat besar. Secara konkrit peran da'i dalam hal ini adalah turut memberikan pemahaman keagamaan secara baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah memahami agama serta menjalankan ajaran agamanya maka dengan sendirinya tumbuh sikap toleransi terhadap orang lain meskipun berbeda agama. Demikian pula keberadaan da'i di daerah perbatasan tidak pernah menyinggung tentang kelompok non-Muslim. Sikap seperti ini semakin memperkuat rasa toleran sesama umat beragama.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Makmur Manik, Keuchik di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Tanggal 18 Agustus 2015, di Singkil.

Peran da'i perbatasan juga dituntut dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama. Mengingat, inti dari ajaran Islam adalah menjaga toleransi antar-manusia. Karena itu, dalam menjalankan aktifitas da'i, individu da'i harus tetap menjunjung toleransi, tidak boleh mengganggu kenyamanan umat agama lainnya. Para da'i yang ditempatkan di wilayah perbatasan dan terpencil, dituntut untuk menjaga kerukunan umat beragama, paling penting tidak melakukan provokasi yang dapat menimbulkan gesekan konflik agama. Selain itu, peran da'i bukan mengajak Non Muslim untuk mengonversi agama menjadi Muslim. Akan tetapi, sekedar memperkuat aqidah para Muslim perbatasan yang diduga masih rawan, dan dangkal dari pemahaman agama. Apalagi, lahir beberapa muallaf yang membutuhkan bimbingan intens dan berkelanjutan guna memantapkan aqidah mereka.

Dari persentasi jawaban angket, terkait keberadaan da'i dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama, sebanyak: 33.01 % responden menjawab sangat setuju, 60.19 % setuju, dan 5.83 % responden kurang setuju,



0.97 % tidak setuju. Tingginya persentase jawaban angket menunjukkan efektivitas da'i menjaga kerukunan umat beragama disadari oleh setiap da'i.



Berbeda dengan itu, Syafrilsyah dari FKUB dan Ikadi menegaskan bahwa baru-baru ini ia mendatangi daerah Subulussalam bersama anggota FKUB. Kebetulan di sana keadaan kerukunan sedang panas-panasnya dan berpotensi menimbulkan konflik umat beragama. Kondisi disharmoni ini dipicu oleh masalah pendirian gereja tanpa izin, sehingga masyarakat yang mayoritasnya umat Islam melakukan tindakan kekerasan. Potensi konflik tersebut bila tidak ditangani oleh pemerintah, maka akan menciptakan masyarakat yang akan berbuat anarkis, sehingga potensi konflik di tempat tersebut akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak kembali. Seharusnya dari semua peristiwa tersebut, para da'i perbatasan dapat dijadikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk meredam konflik, namun demikian, tidak semua da'i perbatasan tersebut mampu untuk melakukannya.<sup>69</sup>

Meskipun demikian menumpahkan semua persoalan kerukunan umat beragama pada pundak da'i perbatasan bukanlah hal yang bijak, sebab kewenangan dan otoritasnya juga terbatas. Apalagi persoalan kerukunan umat bukanlah murni hanya masalah masyarakat multi agama di perbatasan Aceh saja, namun hampir semua daerah yang masyarakatnya heterogen dari sisi agama, misalnya; Ambon, Poso, dan Sampit (Kalimantan). Karena itu disinilah perlu pelibatan dan koordinasi dengan lembaga lain, seperti Kemenag, FKUB dan berbagai institusi lainnya. Apalagi masalah Singkil ada persoalan pelanggaran hukum karena umat Kristen membangun Gereja tanpa izin yang bertentangan dengan aturan yang ada.

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Syafrilsyah, MA, anggota FKUB dan Ikadi, 29 Agustus 2015 di Banda Aceh.

### c. Menambah Pemahaman Keagamaan

Bertambahnya pemahaman agama masyarakat sebagaimana ditegaskan oleh Tgk. Jamaluddin, Da'i Perbatasan di Tamiang. Bahwa dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah bertambahnya pemahaman agama masyarakat, melalui pengajian, Yasinan, wirid dan majelis taklim. Dengan pengajian ini masyarakat mendapatkan ilmu tentang aqidah atau tauhid, fiqih dan pengetahuan Islam lainnya. Bahkan di kalangan ibu-ibu ada yang tidak dapat membaca huruf Melayu (Arab Jawi) sekarang sudah dapat membaca. Demikian pula da'i perbatasan juga mengkader ibu-ibu yang akan mengajar anak-anak mengaji. Suatu saat nanti ketika saya pindah, maka kegiatan pengajian al-Quran tidak putus ada yang melanjutkan. Selain di Bengkelan, malam senin saya mengisi pengajian di gampong Bireun Bayeun Kec. Manyet Panyet. Aceh Timur. Meskipun ini di luar tugas saya sebagai da'i di Bengkelang tetapi ini terkait dengan pembinaan keagamaan di daerah Aceh yang terpencil dan perbatasan.<sup>70</sup>

Kehadiran da'i perbatasan sudah berjalan dengan efektif dilihat baik dari kegiatan keagamaan, pengajian, majelis taklim, dan kegiatan keagamaan lainnya. Sejak da'i ditugaskan di gampong ini, pengajian hampir setiap waktu diadakan;

**Tabel III**  
**Kegiatan Pengajian, Zikir Da'i Perbatasan**

No	Hari	Kegiatan	Keterangan
1	Senin	Malam Senin, Bakda Magrib, Pengajian dan wirid	Diikuti oleh masyarakat umum di masjid
2	Selasa	Pengajian	Diikuti oleh ibu-ibu di Masjid

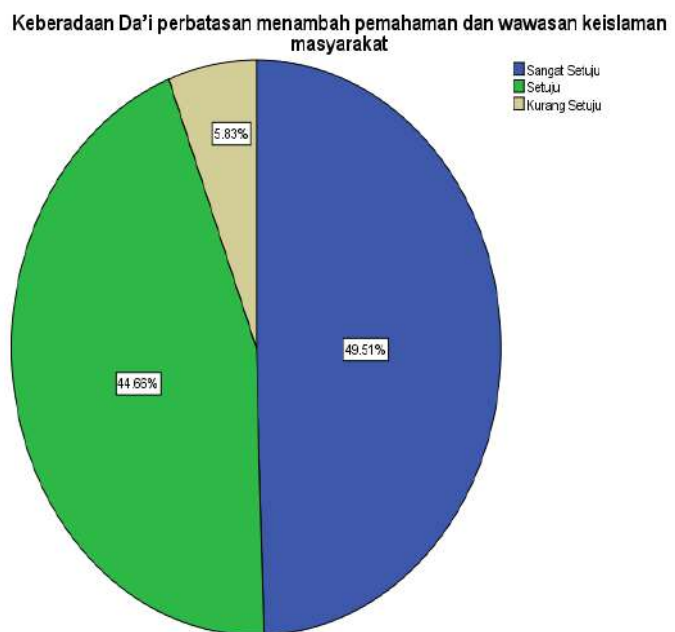
<sup>70</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, Da'i Perbatasan di Gampong Bengkelang, Kec. Bandar Pusaka, Tamiang, Tanggal 24 Agustus 2015 di Tamiang.

3	Rabu	Pengajian membaca kitab, sabilul muhtadin	Diikuti oleh masyarakat umum di masjid
4	Kamis	Malam, wirid dan zikir	Diikuti oleh ibu-ibu di masjid
5	Jumat	Siang, Pengajian disertai wirid	Diikuti masyarakat umum di rumah ke rumah
	Jumat	Malam, pengajian baca kitab, Sairussalikun	Masyarakat umum Di Masjid
6	Sabtu	Pengajian, baca kitab Matan Taqrib	Di salah satu meunasah gampong
7	Ahad	Kegiatan ditiadakan,	Libur

Sumber Data: Wawancara dan Dokumen, 2015.

Karena itu, dalam rangka memperkuat aqidah, da'i perbatasan juga dituntut untuk meningkatkan pemahaman agama bagi masyarakat, berikut jawaban persentase terkait

kepuasan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman agama warga perbatasan. Bahwa, kehadiran da'i perbatasan menambah pemahaman dan wawasan Islam masyarakat dijawab 49,51 % (sangat setuju), 44,66 % (setuju), dan 5,83 % (kurang setuju).



Jadi dapat ditegaskan bahwa dari berbagai wawancara yang dilakukan dan hasil angket menunjukkan bahwa peran dan tugas da'i perbatasan dalam memberikan pemahaman keagamaan pada masyarakat cukup berhasil. Hal dapat

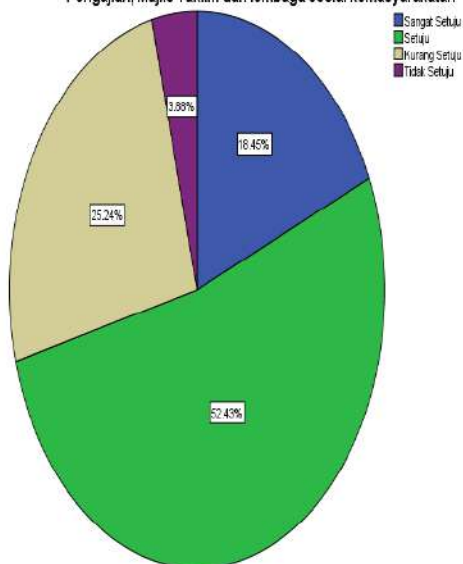
disebabkan berjalannya pengajian, majelis taklim; terkait dengan masalah tauhid, fiqih dan aqidah.

#### d. Membina Majelis Taklim, Remaja Masjid dan TPA

Peran da'i yang komprehensif terhadap masyarakat setempat, mereka merasa sangat terbantu dengan keberadaan da'i perbatasan. Da'i telah menjadi tempat bertanya soal keagamaan, sekaligus menjadi aktor pemberi pencerahan nilai-nilai spritual bagi masyarakat di perbatasan Aceh. Meskipun, ada juga beberapa da'i yang tampak belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Keberadaan da'i, juga telah ikut membantu mendidik anak-anak di kampung, dan memakmurkan mesjid di kampung dengan kegiatan agama, serta shalat jamaah.

Hal tersebut diakui oleh Drs. Maddiyah, M.Pd, Wakil Koordinator Da'i Perbatasan kabupaten Tamiang bahwa Da'i Perbatasan cukup peran dalam Taman

Dai perbatasan berperan aktif dalam membina kegiatan Remaja Masjid, Kelompok Pengajian, Majlis Taklim dan lembaga sosial kemasyarakatan



Pendidikan al-Quran, mendidik anak dalam hal mengaji dan menanamkan nilai-nilai qurani, misalnya partisipasi dalam Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) tingkat kabupaten.<sup>71</sup>

Data angket juga mendukung argumentasi tersebut di atas; 18.45% (sangat setuju), 52.43% (setuju), 25.24% (kurang setuju) dan 3.88%

<sup>71</sup>Wawancara dengan Drs. Maddiyah, M.Pd, Wakil Koordinator dan Kepala Dinas, Efendi, S.Pd, Kabupaten Tamiang Tanggal 25 Agustus 2015 di Tamiang.

(tidak setuju). Keberadaan da'i, juga diapresiasi oleh masyarakat karena dapat membantu menghidupkan lembaga seperti TPA bagi anak-anak di wilayah perbatasan, dapat menjadi imam shalat lima waktu, menjadi khatib, tempat melakukan diskusi dan tanya jawab masalah agama, dan menjadi aktor pembenteng aqidah masyarakat di perbatasan Aceh. Situasi ini, selaras dengan yang pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, bahwa program da'i perbatasan, menjadikan banyak masyarakat perbatasan puas dari kerja da'i. Apalagi, banyak permintaan dari masyarakat sendiri untuk ditambah jumlah kuota da'i perbatasan.

#### **e. Memakmurkan Masjid dan Meunasah**

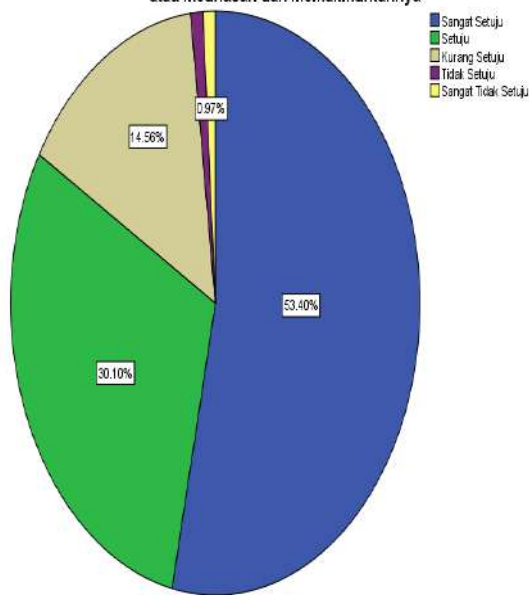
Berhubungan dengan memakmurkan masjid dan meunasah terutama shalat jama'ah Ustaz Indra Anshari, Imam Kampung Karo Aceh Tenggara mengakui bahwa keberadaan da'i sudah berjalan dengan efektif program berjalan dengan baik. Seperti pengajian-pengajian, wirid, ceramah dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan shalat secara berjamaah. Dengan demikian dampak kehadiran da'i di kampung ini adalah wujudnya perubahan dalam kegiatan masyarakat, seperti pengajian dalam usaha memberantas buta huruf al-quran dan shalat berjamaah sudah rutin lima waktu, sedangkan kaum perempuan sudah mulai menutup aurat begitu juga kejahatan narkoba sudah berkurang.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Imam Anshari, Ustaz Indra Anshari, Imam Kampung Karo/Sabilussalim, Kec. Babul Makmur, Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

Untuk mewujudkan da'i yang efektif, menurut sebagian Imam yang diwawancarai, seyogyanya da'i direkrut berasal dari putra daerah setempat, agar memudahkan proses pembauran, interaksi dan komunikasi. Dari penuturan seorang perangkat gampong di Singkil, ia menuturkan bahwa peran da'i sangat penting, kehadiran mereka betul-betul dibutuhkan masyarakat di sini. Kami berharap da'i itu direkrut dan diprioritaskan dari putra daerah untuk memberikan kemudahan bergerak di lapangan. Minta rekomendasi tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat untuk memperkuat figur yang akan dijadikan da'i. Selama ini ada putra-putri setempat yang dianggap mempunyai kemampuan

Da'i perbatasan telah menghidupkan shalat berjama'ah lima waktu di masjid atau meunasah dan memakmurkannya



berkiprah di bidang da'i tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk itu. Ini sangat penting diperhatikan mengingat kita sudah belajar dari pengalaman yang lalu.<sup>73</sup>

Menurut angket, da'i perbatasan telah menghidupkan shalat jam'ah; 53.40% (sangat setuju), 30.10% (setuju), 14.56%

(kurang setuju) dan 0.97% (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Keefektifan da'i juga didukung dari diberinya keluasaan para da'i bekerja, mereka boleh bekerja di kampung lain, jika kampung tempat mereka bekerja membolehkan mereka melakukan pengembangan nilai Islam di luar kampung, dengan catatan kampung

<sup>73</sup>Wawancara dengan Amsar, Tokoh Masyarakat, Gunung Meriah, Aceh Singkil, 18 Agustus 2015 di Singkil.

wilayah kerja telah diselesaikan pekerjaannya dengan baik. Artinya, mereka dibolehkan membina dua kampung jika diperlukan. Pun demikian, dari Kemenag sebenarnya juga ada penyuluh agama hampir di setiap gampong. Karena itu, mereka bisa bersinergi dalam menuntaskan pekerjaan yang sama. Namun, da'i perbatasan dituntut untuk lebih aktif.

#### **f. Menghidupkan Hari-Hari Besar dan Syiar Islam**

Pertanyaan lain yang diajukan untuk mengukur efektivitas da'i adalah kehadiran da'i dapat menghidupkan peringatan Hari Besar Islam, persentase jawaban menunjukkan 50.49 % sangat setuju, 32.04 % setuju, dan 7.77 % kurang setuju dan 8,74 % tidak setuju. Artinya, secara persentase berdasar jawaban dan pengakuan warga sekitar, hari hari besar Islam selalu dihidupkan dan diperingati sejak ada da'i perbatasan, guna bagian syiar dalam menghidupkan nuansa Islami. Pun, dari wawancara dengan beberapa da'i perbatasan di tiga kabupaten yang menjadi sumber data, perayaan hari besar Islam menjadi seremoni penting yang dilakukan da'i, selain merekatkan hubungan da'i dengan masyarakat, juga upaya menghidupkan nilai Islam di tengah masyarakat.

Paradoksnya, masih ada beberapa da'i yang dianggap kurang komprehensif oleh warga (seiring proses diperketatnya perhatian pada da'i oleh DSI), karena ia tak menetap di lokasi tempat bekerja. Jadi, ia hanya pergi bertugas saja ke lokasi penempatan, kemudian menetap dan pulang ke rumah mereka di luar kampung tersebut. menurut warga, sikap seperti ini membuat kegiatan da'i kurang efektif di tempat kerja. Seperti yang dikeluhkan oleh salah seorang Imam Mesjid di Aceh Singkil, "Menurut saya, da'i yang baru ditempatkan ke sini,

dibanding da'i sebelumnya belum memiliki dampak yang cukup luas. Saya melihat bahwa keberadaan da'i sekarang sangat tergantung kepada orangnya, kalau da'i yang seperti dulu cukup baik, tetapi da'i sekarang tidak bertugas, hanya hari Jum'at saja datang ke lokasi."<sup>74</sup>

Partisipasi da'i perbatasan terhadap masyarakat, kadang diukur secara objektif dari beberapa kegiatan oleh masyarakat seperti di Aceh Singkil, misalnya terkait pasifnya kegiatan pendidikan Islam terhadap anak-anak, sehingga orang tua lebih memilih anak-anaknya digiring bekerja bersama orang tua. Situasi ini, dianggap kurang efektif oleh masyarakat terhadap peran da'i. Pun demikian, munculnya komplain dari elite dan masyarakat, menunjukkan tugas da'i masih kurang efektif pada beberapa lokasi penempatan. Artinya, masyarakat mengharapkan peran da'i dapat teraplikasi penuh dan sesuai harapan masyarakat perbatasan. Standar yang dipakai masyarakat, da'i dapat tinggal dan menetap bersama mereka di lingkungan tempat masyarakat tinggal. Jika da'i menetap, maka aktivitas agama, terutama di Mesjid dipastikan dapat berdenyut saban hari, tidak hanya sekali seminggu.

#### **g. Agen Perubahan Sosial Ekonomi**

Harapan terbesar DSI yang akan dilaksanakan guna memfungsikan da'i dari lintas-sektor, da'i juga akan dituntun untuk dapat membantu perubahan sosial ekonomi masyarakat (dakwah bil hal). Jika da'i perbatasan menjadi warga tetap di tempat tugas, selain menjadi tokoh agama, mereka juga diharapkan akan

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Seulamat, Imam Masjid, Gampong Situbuh-Tubuh, Singkil, Tanggal 17 Agustus 2015 di Singkil.



menjadi fasilitator gampong, dalam membangun ekonomi masyarakat, ia berfungsi dengan baik menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dinas terkait, baik dalam membantu permintaan modal, dan sebagainya. Artinya, dakwah saja tanpa kesejahteraan ekonomi yang baik juga akan sia-sia nantinya.

Namun demikian, harus diakui, selama ini kerjasama lintas-sektoral belum cukup maksimal dalam upaya menempatkan da'i sebagai agen atau fasilitator di gampong, terutama terkait pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan yang identik dengan kemiskinan. Apalagi, target da'i perbatasan oleh DSI masih terfokus pada penguatan aqidah dan ibadah, termasuk moral. Namun demikian, DSI memiliki komitmen untuk melakukan dakwah *bil hal*, guna membantu dan menggiring dari menjadi fasilitator sosial. Apalagi, DSI telah pernah melaksanakan pertemuan seminar untuk da'i perbatasan, mengundang pakar di bidang ekonomi dan sosial, lalu memberikan pencerahan terkait pola pengembangan masyarakat berbasis sosial dan ekonomi.

Mengenai masalah perubahan sosial dapat dilihat dari hasil kerja Tgk. Jamaluddin di Bengkelang, Tamiang, sejak da'i hadir tantangan lain adalah masalah narkoba dan kebiasaan masyarakat yang membuat acara pernikahan pada hari Jumat. Acara pernikahan ini diisi dengan acara *Key bord*, acara *Key bord* hanya berhenti pada saat shalat jumat, setelah jumat lanjut lagi. Memang saat ini *Key bord* tidak sampai malam lagi seperti sebelumnya. Demikian pula narkoba, anak muda disini termasuk di Tamiang cukup serius mengenai masalah narkoba. Demikian pula Bahkan sejak da'i perbatasan masuk di Bengkelang, sudah ada 20 orang anak yang melanjutkan ke Pesantren Terpadu baik pada tingkat Aliyah

maupun Tsnawiyah. Hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi gampong, sebab selama ini belum ada anak yang melanjutkan ke pesantren.<sup>75</sup>

Sejalan dengan itu, menurut Kepala DSI, Da'i Perbatasan yang memiliki jiwa *enterprenur*, telah menunjukkan kerja sukses membangun sektor ekonomi di tengah masyarakat. Di Subulussalam misalnya, ada satu orang da'i, ia sudah mampu membangun pesantren terpadu dalam kebun sawit. Apalagi, sekarang ia punya tanah wakaf sebanyak 5 Ha oleh orang lain untuk dikembangkan dalam memajukan pesantren ia. Bahkan, guru-gurunya sekarang didatangkan dari Gontor Ponorogo, gajinya diberikan dari hasil kebun sawit yang diwakafkan, semua itu ia mulai dari nol, dari mendidik anak-anak di kebun sawit hingga membangun balai kecil, dan sekarang menjadi pesantren terpadu. Banyak anak santri datang dari penjuru Singkil dan Subulussalam. Ini menunjukkan da'i yang komit, serius dan memiliki jiwa pengembang, akan menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing. Karena itu, Keberhasilan da'i sangat tergantung dari hasil kerja da'i, kemampuan ia berkomunikasi dengan masyarakat, hingga orang akan datang membantu secara serius pengembangan agama di perbatasan, seperti contoh di Kota Subulussalam sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Kabupaten Dairi Sumatera Utara.

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, Da'i Perbatasan di Gampong Bengkelang, Kec. Bandar Pusaka, Tamiang, Tanggal 24 Agustus 2015 di Tamiang.

## **C. Format Pengembangan Program Da'i Perbatasan ke Depan**

### **1. Sistem Rekrutmen Da'i Perbatasan**

Berhasil tidaknya program da'i perbatasan dan daerah terpencil salah satunya sangat ditentukan oleh proses rekrutmen (penjaringan/seleksi) yang dilakukan dalam menemukan para calon da'i yang akan ditempatkan di lokasi dampingan, baik itu di daerah perbatasan maupun di daerah terpencil, sebagaimana yang menjadi harapan dalam program ini. Jika dalam proses rekrutmen bermasalah, maka akan menghasilkan calon-calon da'i yang kualitasnya jauh dari yang diharapkan sehingga akan memiliki potensi yang besar dalam kemungkinan gagalnya program atau paling tidak jauh dari harapan terhadap program yang dijalankan.

Da'i yang direkrut harus benar-benar orang yang memiliki integritas yang tinggi bukan hanya sekedar mencari pekerjaan sebagai Da'i. Menurut Isnaini (Imam mesjid Gampong Kuta Batu Singkil, bahwa harus dapat dibuktikan pada saat perekrutan calon Da'i, yang juga harus melihat latar belakang dari para calon Da'i tersebut sebelum diterima sebagai Da'i yang akan diterjunkan ke lokasi pengabdianya, baik di daerah perbatasan maupun daerah terpencil.<sup>76</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Drs. Ramlan (Tokoh Masyarakat dan Anggota FKUB, Singkil) bahwa dalam hal rekrutmen yang sangat penting diperhatikan adalah kapasitas dari calon da'i itu sendiri.<sup>77</sup> Yang paling penting diprioritaskan dalam hal rekrutmen kapasitas yang kemudian akan berpengaruh pada semakin baiknya

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan, Isnaini S, Imeum Mesjid At Thayyibah Gampong Kuta Batu, Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>77</sup>Wawancara dengan Drs. Ramlan, Tokoh Masyarakat dan Anggota FKUB, Singkil, 16 Agustus 2015 di Singkil.

kualitas Da'i. Adapun kapasitas yang dimaksudkan di sini adalah berupa ilmunya, integritasnya, akhlak, kinerjanya dan komitmen.

Berkaitan dengan proses rekrutmen yang perlu diperhatikan adalah tahapan-tahapannya berupa pengumuman pembukaan penerimaan calon da'i yang akan ditempatkan di daerah perbatasan dan terpencil kepada khalayak ramai supaya masyarakat mengetahuinya. Tahapan selanjutnya adalah pendaftaran, kemudian Test (uji kelayakan), baik secara tertulis maupun wawancara, dan satu hal yang perlu ditambahkan yaitu adanya surat pernyataan komitmen bersama untuk menjalankan tugas atau pakta integritas.<sup>78</sup> Fakta integritas ini menjadi penting dalam rangka mengurangi atau menekan indisipliner yang dilakukan oleh beberapa Da'i di lapangan, yang beberapa kasusnya adalah tidak tinggal/menetap di lokasi tugas sehingga menyebabkan aktivitas lapangan menjadi terganggu dan kurang efektif dan efisien. Hal yang sama juga sebagaimana dikatakan oleh salah seorang Da'i (perbatasan/terpencil) bahwa format ke depan agar da'i lebih efektif di lapangan adalah setiap da'i yang ditugaskan ke desa, maka wajib tinggal di desa tersebut supaya peran, tugas dan fungsi da'i dapat dijalankan secara maksimal.<sup>79</sup>

Terkait dengan informasi tentang penerimaan tenaga Da'i perbatasan dan daerah terpencil saat ini sudah dapat diakses melalui media internet, hal ini tentu berbeda dengan kondisi sebelumnya yang masih menggunakan informasi secara manual hanya melalui surat yang dikirimkan ke kantor Dinas Syari'at Islam (DSI)

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan, Isnaini S, Imeum Mesjid At Thayyibah Gampong Kuta Batu, Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>79</sup>Wawancara dengan Nurhasanah, Da'i Gampong Batik, Kec. Gunung Meriah, Singkil Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.

Kabupaten/Kota selain di DSI provinsi Aceh. Namun demikian selama ini selain di publikasikan di media online (internet) penerimaan calon da'i perbatasan dan daerah terpencil juga tetap mengirimkan secara resmi surat ke DSI Kabupaten/Kota, sehingga semua daerah mendapatkan informasi yang sama, mengingat tidak semua daerah memiliki akses media onlie (internet) yang baik.<sup>80</sup>

Penerapan poin-poin penting sebagaimana disebutkan di atas maka kekhawatiran bahwa tidak ada standar kualifikasi dan kompetensi dalam perekrutan da'i dapat terjawab dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustaz Supian Husni Salam, M.Ed, Pengurus DDII Aceh Tenggara mengatakan, bahwa sistem perekrutannya dilakukan oleh DSI sudah tepat, tetapi mengenai mekanisme dan sistemnya saya kurang tahu, saya hanya mendengar bahwa sistem perekrutannya seperti itu. Menurutnya sistem perekrutan ke depan, terlebih dahulu menetapkan standar kualifikasi atau kompetensi, seperti menguasai kitab kuning, dasar-dasar keislaman, juga dasar-dasar pengamalan agamanya.<sup>81</sup>

Poin dalam pernyataan di atas juga memiliki semangat agar kualitas dan atau kemampuan da'i nantinya betul-betul baik dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan juga menjadi harapan masyarakat dampingan nantinya. Kewenangan dalam rekrutmen calon da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Aceh, demikian juga kebijakan dan atau dalam proses rekrutmen nya sebagaimana diungkapkan oleh Ustaz Kamaludin, S.Sos.I, (da'i di Desa Tanoh Meghakhe) bahwa cara

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Abdur Rani di Banda Aceh, Staf Sumber Daya Manusia DSI Aceh, Tanggal 19 Agustus 2015 di Banda Aceh.

<sup>81</sup>Wawancara dengan Ustaz Supian Husni Salam, M.Ed, Pengurus DDII Aceh Tenggara, Tanggal 20 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

merekrut itu kebijakan DSI Aceh tapi menurut pengalaman kami dulu sudah memada'i, karena kami harus menghadapi 6 meja yang berkaitan tentang pengetahuan umum agama, kebudayaan, baca al-Qur'an, imlak dan khatib jumat, apalagi sekarang sudah ditambah dengan kemampuan baca kitab kuning. Dengan sendirinya sistem tersebut sudah efektif.<sup>82</sup>

Namun demikian, terkait kewenangan dan proses dalam rekrutmen da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil masih menimbulkan diskusi cukup menarik juga tentang daerah Kabupaten/Kota atau pihak provinsi yang lebih tepat melakukan itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua MPU Aceh Singkil, H. Rasyidudin, S.H bahwa rekrutmen da'i yang berubah-ubah, dulu kewenangan rekrutmen da'i diberikan kepada masing-masing Kabupaten/Kota meskipun tim dari DSI provinsi juga terlibat dalam penyeleksian, sehingga tim dari kabupatenlah yang lebih berperan dalam menyeleksi putra daerah untuk menjadi calon da'i yang akan ditugaskan di desa-desa, namun sekarang rekrutmen da'i itu ada di provinsi".<sup>83</sup>

Kepala DSI Aceh Tenggara, Drs. Hamidin, M.Pddan Sekretaris DSI Aceh Tenggara, H. Alimuddin, Lc juga menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa sistem yang selama ini bukan saja tidak efektif, tetapi juga banyak merugikan kita di Aceh Tenggara, karena banyak calon da'i yang kita usulkan tidak lulus. Seharusnya sistem perekrutannya melibatkan DSI Kab./Kota".Rekrutmen da'i dari segi teorinya sudah bagus tetapi pelaksanaannya yang kurang bagus.

---

<sup>82</sup>Ustaz Kamaludin, S.Sos.I, Da'i Perbatasan, di Tanoh Meghakhe Kecamatan Badar, Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>83</sup>Wawancara dengan H. Rasyidudin, S.H Ketua MPU Aceh Singkil, Tanggal 18 Agustus 2015 di Singkil.

Buktinya bahwa banyak calon da'i yang menurut saya kualitasnya bagus, tetapi kenapa tidak lulus, lebih baik kualitas yang tidak lulus dari yang lulus. Sehingga ada sistem rekrutmen yang harus diperbaiki. Idealnya sistem rekrutmen itu sering dulu di daerah kabupaten masing-masing, diberikan berapa kuotanya, baru yang terbaik dikirim ke provinsi untuk diseleksi.<sup>84</sup>

Senada dengan itu menurut Ketua MPU Aceh Singkil H. Rasyidudin, S.H mengatakan bahwa, lebih baik diutamakan putra daerah, ada sisi positif bila da'i tersebut putra daerah, salah satunya memudahkan mereka dalam beradaptasi terhadap masyarakat setempat baik dari segi bahasa maupun dari segi budaya yang berlaku di desa tersebut.<sup>85</sup> Gambaran ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang terlibat, dalam memaksimalkan fungsi dan peran da'i di daerah atau wilayah yang menjadi dampungannya.

Mengenai masalah materi ujian/tes kemampuan calon da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil sudah semakin baik sebagaimana diakui oleh salah seorang da'i saat beliau ikut seleksi sebagai calon da'i yaitu harus menghadapi 6 meja tim seleksi yang berkaitan dengan;

1. Pengetahuan keislaman (aqidah, fiqih, akhlak)
2. Membaca al-quran dan menulis al-Quran
3. Khatib jumat atau ceramah dan memimpin tahlil, doa
4. Kemampuan baca kitab kuning.
5. Perundang-undangan (qanun dan peraturan Syari'at Islam)

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Drs. Hamidin, M.Pd, Kepala DSI Aceh Tenggara, dan Alimuddin, Lc, Sekretaris DSI Aceh Tenggara, Tanggal, 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>85</sup>Wawancara dengan H. Rasyidudin, S.H Ketua MPU Aceh Singkil, Tanggal 18 Agustus 2015 di Singkil.

6. Tes psikologi.<sup>86</sup>

Kemudian sebelum dikirim ke daerah tujuan pihak DSI Provinsimengadakan pelatihan mengenai masalah-masalah seperti yang diujikan. Reponden juga memberikan sarannya bahwa untuk kedepan perlu juga mempertimbangkan pernah atau tidaknya mengikuti pelatihan dan peningkatan kapasistas bidang lainnya bagi calon da'i.<sup>87</sup>

Berbeda dengan itu, selain materi tes di atas ada usulan dari Ustadz Agus Da'i Perbatasan Sabilussalam/Kampung Karo Aceh Tenggara berdasarkan pengalamannya juga menekankan bahwa ada hal yang paling penting selain dari itu, yaitu ilmu tentang kemasyarakatan. Tanpa ini para da'i akan kesulitan dalam memahami karakter masyarakat, sehingga dia tidak betah tinggal di tempat yang ditugaskan, sehingga berakibat pada terhambatnya program-program yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) da'i perbatasan itu sendiri.<sup>88</sup>

Sedangkan menjadi Tim penguji berasal dari kalangan professional seperti dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dari kalangan akademisi kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (seumpama dari jurusan perbandingan agama) yang dianggap penting mengingat keberagaman agama di daerah tugas nantinya, selain itu juga dari bidang Psikologi UIN Ar-Raniry (Dr. Kusmawati Hatta), terkait dengan uji kemampuan dalam bidang membaca al Qur'an yang

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Ustaz Kamaludin, S.Sos.I, da'i Aceh Tenggara) Tanggal 21 Agustus 2015, dan Tgk. Jamaluddin, S.Pd.I da'i Perbatasan Gampong, Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang, Tanggal 24 Agustus 2015 di Tamiang.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hamdani (Da'i Perbatasan Gampong Tangse Lama Kec. Seruway, Kab. Tamiang).

<sup>88</sup>Wawancara dengan Ustadz Agus Nurjamil, Da'i Perbatasan Sabilussalam/Kp. Karo, Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.



menjadi tim seleksi adalah Qari Internasional (Hamli Yunus) yang melakukan tes baca Al-Qur'an. Ujian ini menentukan juga kualitas da'i yang diluluskan, hasil tes sangat menentukan dan pihak DSI konsisten dengan 'Rekrutkmen oleh Dinas Syari'at yang bersyari'at'. Selain itu, calon da'i pada saat tes juga dilakukan tes psikologi, diundang tim psikologi khusus dari UIN Ar-Raniry pada saat tes, guna menilai sikap menghadapi masyarakat yang tergolong rawan di daerah perbatasan.<sup>89</sup>

## **2. Pola Penempatan Da'i Perbatasan**

Penempatan da'i perbatasan dan daerah terpencil menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memaksimalkan hasil maupun proses pendampingan terhadap masyarakat perbatasan dan terpencil. Beberapa poin penting terkait penempatan da'i perbatasan dan daerah terpencil diantaranya adalah dengan mempertimbangkan masalah jumlah da'i, letak geografis, keadaan sosial dan budaya, asal daerah dan gender. Poin-poin penting ini di lapangan dirasakan cukup member arti bagi sukses dan tidaknya program ini dalam wujud praktik di tengah-tengah masyarakat yang beragam ini.

Adapun terkait dengan persyaratan lokasi/wilayah penempatan da'i merujuk pasal 14 (Pergub Aceh Nomor 54 Tahun 2014) tentang Persyaratan Lokasi/Wilayah Penempatan Da'i sebagai berikut:*pertama* merupakan Wilayah Perbatasan atau Daerah Terpencil;*kedua* merupakan daerah yang rawan terhadap pendangkalan Aqidah Islam;*ketiga* dapat dimonitor oleh Koordinator Lapangan

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan (Kadis DSI Aceh, Prof. Syahrizal Kepala DSI Aceh, 24 Agustus 2015 dan Nasruddin Ibrahim, M.Ag Ka. UPTD PAI dan Da'i DSI Aceh, 25 Agustus 2015 di Banda Aceh.

dan Tim Monitoring dari Provinsi Aceh; dan *keempat* sumber Daya Manusia dalam bidang keagamaan relatif masih sangat rendah, sehingga perlu mendapat bimbingan dan penyuluhan Da'i. Ini tentu menjadi sebuah dasar hukum yang kuat dalam teknis pelaksanaan program da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Menyikapi dinamika yang berkembang terkait dengan proses pemutasian tempat tugas da'i wilayah perbatasan dan daerah tertinggal juga diatur dalam pergub ini yaitu pada Bab V (lima) di pasal 13 yaitu: ayat (1) Pelaksanaan mutasi dilaksanakan setelah menerima Keputusan dari Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, dan ayat (2) Pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya pertimbangan dari Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, bersama Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten/Kota dan Tim Monitoring. Ini menjadi penting jika pelaksanaan mutasi tersebut menjadi yang terbaik bagi masyarakat dan da'i itu sendiri, termasuk dalam kaitannya dengan peremajaan dan penyegaran kembali da'i di wilayah atau daerah tersebut.

Pergub tersebut di atas pada pasal 20 (Bab IX) tidak hanya disebutkan tugas Dinas Syari'at Islam Aceh menempatkan da'i sesuai dengan kebutuhan di lapangan, namun juga terdapat 9 poin penting lainnya yang menjadi tugas Dinas Syari'at Islam Aceh yaitu *pertama* merekrut calon Da'i; *kedua* mengangkat dan memberhentikan Da'i; *ketiga* menyusun panduan kegiatan Da'i di lapangan; *keempat* pembekalan Da'i sebelum ditempatkan di lapangan; *kelima* melakukan pembinaan secara berkala; *keenam* melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Da'i; *ketujuh* mengurus dan menyelesaikan administrasi Da'i; *kedelapan* memfasilitasi sarana Da'i; dan *kesembilan* menyediakan anggaran. Selain DSI

Aceh dan Kabupaten/Kota, secara teknis dalam pergub ini juga mengatur tugas Camat (pasal 23) yaitu ayat (1) melakukan pendataan lokasi penempatan Da'i, Profil dan peta wilayah penempatan Da'i; ayat (2) memberi motivasi kepada Da'i dan masyarakat tentang pelaksanaan Syari'at Islam; dan ayat (3) memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam wilayah tugas Da'i.

Sejalan dengan itu, pelaksanaan dilapangan juga mengacu pada Pergub yang ada sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustaz Kamaludin, S.Sos.I bahwa, masalah penempatan itu sangat tergantung pada DSI Aceh yang meminta ke Pemda Kabupaten/Kota untuk dikoordinasikan oleh DSI Kabupaten/Kota menentukan mana-mana desa yang wilayah berbatas dengan non muslim yang layak, kemudian daerah pedalaman, dan ketentuan dari DSI Provinsi hanya satu desa satu da'i tetapi da'i tersebut juga bisa membantu kegiatan agama di desa lainnya. Namun demikian ada pertimbangan-pertimbangan geografis, jika dilihat wilayah tersebut tidak mungkin karena lokasinya, maka dipindahkan ketempat yang lain. Sementara da'i yang ditugaskan tidak mesti dari suku-suku tertentu tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan da'i itu sendiri.<sup>90</sup>

Masalah penempatan da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil di lapangan terkait mengenai jumlah, dan letak secara geografis secara sekilas nampaknya tidak ada masalah, karena memang sudah dipertimbangkan secara matang oleh dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi. Misalkan bahwa semua yang dipilih adalah daerah perbatasan dan terpencil, kemudian jumlah 1 orang da'i untuk 1 *gampong*. Kemudian mengenai masalah keadaan sosial dan budaya, ini

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Ustaz Kamaludin, S.Sos.I, Da'i Perbatasan, Gampong Tanoh Megakhe, Kec. Badar, Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

yang perlu kajian lebih jauh, karena berdasarkan pengalaman responden saat bertugas di Bengkelang (Tamiang) yang kurang dapat diterima secara cepat karena dari etnis (suku) Aceh sedangkan mereka dari suku Gayo.<sup>91</sup>

Berbeda kedua pengakuan Da'i tersebut di atas, cerita menarik lainnya dari Tgk. Muhammad Hamdani yang sudah dua kali dipindah tugaskan dari satu daerah ke daerah lainnya, ia mengatakan bahwa sebenarnya saya sudah dua kali ditempatkan disini (Tangsi Lama), pada tahun 2013 selama dua bulan, langsung dipindahkan ketempat lain. Kemudian tahun 2015 ini tepatnya bulan Maret saya dikembalikan ke sini. Secara umum respon masyarakat cukup baik terhadap tugas, peran dan fungsinya yang telah dijalankan selama ini. Kecuali ada beberapa aparat gampong yang memberikan respon yang kurang baik. Respon yang dimaksud adalah ada beberapa pendapat da'i yang tidak diterima, namun perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menyebabkan tugas dan peran da'i di lapangan menjadi terhambat.<sup>92</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Tgk. Jamaluddin, S.Pd.I da'i di Tamiang, Kepala DSI Aceh Tenggara juga mengatakan bahwa dalam masalah penempatan da'i itu sudah berjalan baik, karena sistem penempatannya seluruhnya diserahkan kepada DSI Kabupaten/Kota. Namun dari segi jumlah da'i belum dipertimbangkan dengan baik, karena masih banyak desa yang membutuhkan da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil, selama ini da'i nya masih kurang. Masalah letak geografis tidak dipermasalahkan, akan tetapi

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, S.Pd.I Da'i Perbatasan, Gampong Bengkelang, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Tamiang, Tanggal 24 Agustus 2015 di Tamiang.

<sup>92</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hamdani, Da'i Perbatasan Gampong Tangse Lama, Kec. Seruway, Kab. Tamiang, Tanggal 25 Agustus 2015 di Tamiang.

penempatan da'i ini berdasarkan prestasinya, kalau sudah baik di tempat itu maka dia tidak akan dipindahkan ke daerah yang jauh dan sulit dijangkau, akan tetapi jika da'i itu sering meninggalkan tempat dan meninggalkan pengajian (tidak disiplin) maka kita akan menempatkan dia lebih jauh lagi.

Masalah penempatan da'i ini kita tidak mempertimbangkan suku etnis dan sosial budaya, kita lakukan secara random (Kepala DSI Aceh Tenggara). Terkait dengan pertimbangan penempatan jumlah da'i dan masalah sosial budaya Alimuddin, Lc (Sekretaris DSI Aceh Tenggara) menyampaikan bahwa pertimbangan jumlah da'i seharusnya mempertimbangkan jumlah penduduk yang banyak non muslimnya baru disesuaikan dengan jumlah da'inya. Penempatan da'i perbatasan harus juga mempertimbangkan letak geografis walaupun tidak sepenuhnya berdasarkan geografis. Masalah sosial budaya tidak berpengaruh sekali maka tidak terlalu penting untuk dipertimbangkan.<sup>93</sup>

Jika melihat geografi dan lokasi serta jumlah penduduk yang ada, maka semestinya da'i perbatasan di Aceh Tenggara (misalnya) harus menjadi prioritas dan kalau bisa ditambah. Sebagai contoh di Kampung Haji, jumlah penduduknya mencapai 160 KK sedangkan masyarakat yang beragama Islam hanya 40 KK selebihnya agama Kristen, namun di kampung itu tidak ada da'i. Nah, inilah gambaran yang mungkin harus menjadi perhatian pemerintah Aceh.<sup>94</sup>

Terkait dengan penempatan ini, Prof Syahrizal (Kadis DSI Aceh) mengaitkannya dengan tipologi da'i, yaitu bahwa tipologi da'i, perbatasan dan

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan H. Alimuddin, Lc, Sekretaris DSI Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>94</sup>Wawancara dengan Ustaz Agus Nurjamil, Da'i Perbatasan, Sabilussalam/Kp. Karo Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

terpencil. Terpencil merujuk pada wilayah yang aksesnya sulit, kualitas pendidikan rendah, seperti di BulohSeuma Aceh Selatan, dan Seumeulu. Karena itu, penambahan kuota da'i kemarin kita arahkan ke sana. Tipologi da'i juga menjadi alasan beda tipis gaji yang diberikan, mengingat akses dan keberadaan terpencil lebih sulit, maka dilebihkan sedikit upah honorinya.<sup>95</sup>

Penempatan da'i yang belum sesuai antara rasio (jumlah da'i) dan medan atau geografis daerah akan menimbulkan beberapa masalah sebagaimana diungkapkan oleh seorang da'i perempuan bahwa; "*Pertama*, pengiriman da'i perempuan membuat respon masyarakat kurang antusias, karena harapan masyarakat seyogyanya da'i mesti laki-laki. *Kedua*, tidak tinggalnya da'i di desa menjadikan tugas dan peran da'i tidak efektif, dan juga manfaat langsung yang dirasakan masyarakat juga kurang. Yang terjadi selama ini pola penempatan da'i ke wilayah perbatasan tidak pernah mempertimbangkan letak geografis, putra daerah, atau sosial budaya. Seperti di Singkil, banyak da'i yang berasal dari daerah lain yang tidak memahami kultur dan budaya Singkil apalagi bahasa daerah sehingga menjadi problem tersendiri bagi da'i dalam menjalankan tugas, dan tupoksinya. *Ketiga* penempatan da'i selama ini lebih bersifat undian dan menurut kemauan orang DSI provinsi, ke depan diharapkan agar setiap da'i yang akan ditempatkan sebaiknya kalau ada putra daerah lebih diutamakan, karena

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kadis DSI Aceh, Tanggal 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.

mereka mudah dan lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakatnya bila dibandingkan dengan da'i dari wilayah lain.<sup>96</sup>

Pernyataan di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua MPU Aceh Singkil, H. Rasyidudin, S.H bahwa da'i lebih baik diutamakan putra daerah, ada sisi positif bila da'i tersebut putra daerah salah satunya memudahkan mereka dalam beradaptasi terhadap masyarakat setempat baik dari segi bahasa maupun dari segi budaya yang berlaku di desa tersebut. Selanjutnya Nasruddin Ibrahim, M.Ag (Ka. UPTD Da'i pada DSI Aceh) dalam hal ini mengatakan bahwa penempatan da'i seharusnya berdasarkan daerah, namun ada juga yang berbeda dengan daerah asal. Namun disebabkan ada sebagian yang kurang efektif dengan penempatan di daerahnya, karena mereka sering pulang pergi dari rumah ke tempat tugas, maka diambil kebijakan untuk ditugaskan ke daerah lain agar lebih fokus. Yang ada keluarga boleh bawa keluarga, meskipun untuk saat ini masih belum bisa disubsidi oleh pemerintah.<sup>97</sup>

Terdapat problem yang menjadi salah satu temuan dalam riset ini, yaitu adanya da'i yang tidak menetap di lokasi dampingan sehingga kemudian menyebabkan pendampingan menjadi kurang efektif dan efisien, sebagaimana diungkapkan oleh Isnaini S, Imem Mesjid Kuta Batu, Singkil. Kalau tidak menetap sulit sekali mengatur jadwal yang rutin terkait dengan kegiatan keagamaan di gampong, apalagi malam hari, karena kondisi di sini jalannya cukup sulit untuk dilalui malam hari. Jadi tidak mungkin da'i melakukan tugasnya di

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Nurhasanah, Da'i Gunung Meriah, Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>97</sup>Wawancara dengan Nasruddin Ibrahim, M.Ag (Ka. UPTD PAI dan Da'i pada DSI Aceh, Tanggal 25 Agustus 2015 di Banda Aceh.

malam hari kalau ia tidak tinggal di lokasi. Selain itu, kalau jadwal siang sangat sedikit yang mengikuti kegiatan pengajian karena pencaharian masyarakat di sini rata-rata sebagai petani/buruh di kebun sawit, jadi kalau siang mereka akan ke kebun untuk mencari nafkah”.<sup>98</sup>

Kondisi seperti yang telah digambarkan di atas haruslah menjadi perhatian yang serius bagi pengambil kebijakan, baik di level provinsi maupun pada level Kabupaten/Kota serta jajaran di bawahnya. Kepedulian semua pihak secara tulus-ikhlas sangat menentukan program ini akan membuahkan hasil sebagaimana yang diidam-idamkan oleh semua pihak.

### **3. Pola pembayaran dan Fasilitas Pendukung Da’i Perbatasan**

Hak yang diberikan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini melalui DSI Aceh kepada Da’i Perbatasan merupakan salah satu kewajiban pemerintah terhadap abadinya. DSI Aceh tidak hanya sekedar memberikan hak kepada da’i perbatasan, akan tetapi juga memberikan sarana pendukung lainnya kepada mereka demi tercapainya target yang telah ditetapkan sekaligus mengurangi kendala yang mungkin dihadapi oleh para da’i perbatasan dalam menjalankan tugas yang diemban pemerintah kepadanya. Berikut ini diuraikan hasil penelitian tentang hak dan fasilitas pendukung yang telah diberikan oleh pemerintah kepada da’i perbatasan serta melihat manfaatnya dalam menjalankan tugasnya.

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Isnaini S, Imem Mesjid At Thayyibah Gampong Kuta Batu, Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.



## 1. Pola Pembayaran

Pembayaran honor kepada da'i perbatasan adalah dengan cara membayar gaji bulanan setiap bulannya sebesar adalah Rp. 3.000.000,- pada tahun 2015 sedangkan tahun sebelumnya mereka dibayar sebesar Rp. 2.800.000,- perbulannya. Nominal pembayaran perbulan bervariasi disesuaikan daerah dengan pertimbangan daerah terpencil atau bukan, mengingat posisi terpencil medannya lebih berat, maka honor yang diberikan juga lebih besar. Pola pembayaran gaji sifatnya dibayar bulanan hal ini disebabkan oleh persoalan pengesahan APBA, sehingga pada setiap awal tahun tidak dapat dibayar setiap bulannya, namun dirapel hingga tiga bulan, baru pada bulan April honor mereka terima.<sup>99</sup>

Data ini berbeda dengan pengakuan dari Tgk. Muhammad Hamdani (Da'i perbatasan Gampong Tangse Lama Kecamatan Seruway Aceh Tamiang bahwa mereka diberikan honor Rp. 2.700.000,- tahun 2015, sedangkan pada tahun 2014 diberikan honor sebesar Rp. 2.800.000,- setelah dipotong pajak. Berdasarkan pengakuan dari da'i ini penghasilan mereka berkurang dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 100.000,- perbulan. Gaji mereka baru dibayar setelah mereka menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan bulannya.<sup>100</sup> Sedangkan menurut Ketua Forum Da'i Kabupaten Aceh Singkil bahwa honor atau

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan Abdul Rani, Staf Bidang Sumber Daya DSI Aceh, Tanggal 19 Agustus 2015 di Banda Aceh.

<sup>100</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hamdani, Da'i perbatasan Kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Tamiang 25 Agustus 2015 di Tangsi Lama.

insentif mereka sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan untuk desa biasa dan Rp. 2.700.000,- untuk da'i daerah terpencil.<sup>101</sup>

Sementara menurut Ustad Agus pola pemberian insentif sangat bergantung tanggungan (istri dan anak) yang dimiliki oleh setiap petugas da'i perbatasan, kalau saya yang memiliki tanggungan istri dan tiga orang Rp. 2.767.000,- perbulan dengan sistem pencairan ke rekening daerah yang kemudian dikirim ke Dinas Syari'at Islam Kabupaten kemudian di transfer ke rekening.<sup>102</sup> Menurutnyagaji yang diterima setiap bulannya berjumlah Rp. 2.700.000,- itu sudah termasuk uang sewa rumah dan kesehatan. Adapun cara pembayaran gaji kami sering dibayar tidak tepat waktu, tetapi kadang-kadang kami menerima gaji sudah tanggal 14.

## **2. Fasilitas Pendukung Lainnya**

Pemerintah telah memberikan fasilitas kepada da'i berupa kendaraan, menyediakan Mess untuk satu wilayah satu Mess da'i, yang digunakan untuk pertemuan dan diskusi akhir tahun da'i, selain itu, setiap wilayah yang telah diutus da'i juga diangkat seorang koordinator da'i yang menjadi ketua guna mempermudah komunikasi dengan pihak provinsi, dan menangani beberapa persoalan da'i, seperti menyerahkan laporan yang dikirim secara kolektif.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Muslim Bancin, S.Pd.I, Ketua Forum Da'i Aceh Singkil, Tanggal 15 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>102</sup>Hasil Wawancara dengan Ustas Agus Nurjamil, S.Pd.I, Da'i Kampung Karo, Kecamatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>103</sup>Wawancara dengan Abdul Rani, Staf Bidang Sumber Daya Da'i DSI Aceh, Tanggal 19 Agustus 2015 di Banda Aceh.

Fasilitas pendukung yang diberikan kepada da'i, seperti sepeda motor dan bahan bakarnya sebesar Rp. 300.000,- setiap bulannya, jas atau jaket, sepatu, asuransi kesehatan dan uang sewa rumah.<sup>104</sup> Sedangkan honor tersebut di atas da'i perbatasan juga menerima fasilitas lainnya yaitu, seperti kereta, jas (jaket), sepatu, Biaya operasional minyak kereta, tunjangan kesehatan yang berjumlah Rp. 300.000,- termasuk sewa rumah.<sup>105</sup>

Berbeda dengan di Aceh Singkil fasilitas yang diberikan berupa uang sewa rumah Rp. 200.000 perbulan, sepeda motor sekaligus biaya operasional kendaraan sebanyak Rp. 300.000 setiap bulan, uang meugang dan THR, sebanyak Rp. 500.000,- buku-buku penunjang untuk da'i baju seragam dan sepatu setahun 1 set serta Mess sebagai tempat tinggal dan tempat berkumpulnya para da'i se Kabupaten Singkil.<sup>106</sup> Sementara menurut pengakuan da'i perbatasan di Aceh Tenggara mereka mengaku hanya difasilitasi dengan sepeda motor saja.

Di samping menerima honor atau gaji bulanan kepada para da'i juga diberikan dana tambahan fasilitas pendukung yaitu uang *meugang* sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap kali meugang dengan total Rp. 1.500.000,- setahun yaitu untuk tiga kali *meugang*.<sup>107</sup>

Adapun tentang jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan saat ini DSI Aceh belum memberikan dana kesehatan kepada mereka, sementara dana

---

<sup>104</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, S.Pd.I, Da'I Perbatasan Gampong Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang 24 Agustus 2015 di Tamiang.

<sup>105</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hamdani, Da'i perbatasan Kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Tamiang 25 Agustus 2015 di Tamiang.

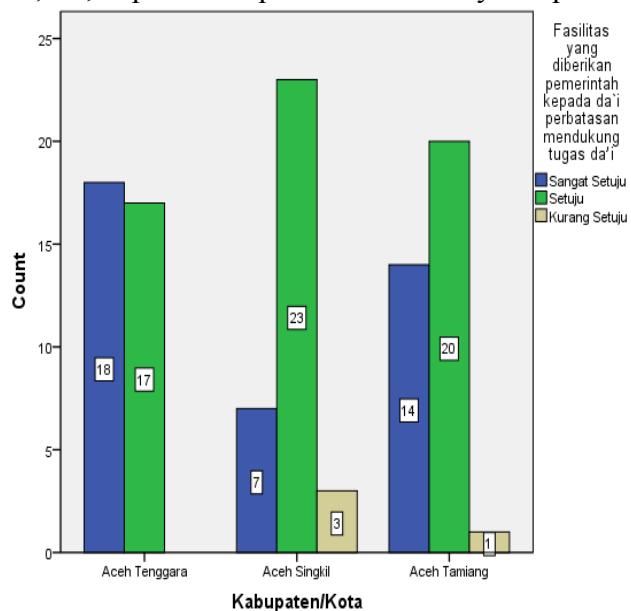
<sup>106</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Muslim Bancin, S.Pd.I, Ketua Forum Da'i Aceh Singkil, Tanggal 15 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>107</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hamdani, Da'i perbatasan Kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Tamiang 25 Agustus 2015 di Tangsi Lama.

kesehatan menurut mereka sangat diperlukan. Akan tetapi hemat kami dana tersebut tidak perlu dialokasikan lagi karena pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana untuk program Kesehatan Masyarakat Aceh melalui Asuransi BPJS.

Di sisi lain berdasarkan hasil penyebaran angket kepada responden tentang pemberian fasilitas pendukung seperti sepeda motor beserta biaya operasional, baju dan sepatu, biaya sewa rumah, dll, kepada da'i perbatasan umunya responden

sepakat bahwa fasilitas pendukung, mendukung da'i dalam menjalankan tugasnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel dan grafik yang menunjukkan bahwa di Aceh Tenggara: 18 (sangat setuju), 17 (setuju) 0 (kurang



setuju), Aceh Singkil: 7 (sangat setuju), 23 (setuju) dan 3 (kurang setuju), Aceh Tamiang; 14 (sangat setuju), 20 (setuju) dan 1 (kurang setuju).

Jadi dengan demikian penyebaran angket menunjukkan bahwa fasilitas pendukung seperti sepeda motor beserta uang operasionalnya, uang sewa rumah dan lain-lain mendukung terhadap tugas da'i dalam menjalankan tugasnya di daerah kerja mereka masing-masing.

#### **4. *Reward* (penghargaan) *punishment* (sanksi/hukuman)**

*Reward* dan *punishment* atau yang lebih dikenal dengan bentuk penghargaan dan ganjaran atau sanksi adalah tindakan yang diberikan baik secara individu atau lembaga terhadap kinerja yang telah dilakukan. Bentuk penghargaan tersebut dapat berupa material ataupun non material. Sedangkan ganjaran atau sanksi yang diberikan pun dapat berbeda-beda sangat tergantung dengan skope dari kinerja yang telah dilakukan atau dicapai. Apabila reward and punishment system dikembangkan dengan tepat dan bijak, maka sebuah institusi atau lembaga harus memiliki individu-individu yang mempunyai kualitas kinerja yang profesional.

Untuk proses pemberian penghargaan atau sanksi yang dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga sangatlah beragam yang mengacu pada mekanisme sistem kinerja itu sendiri. Artinya, reward dan punishment tidaklah muncul dengan sendirinya, namun berdasarkan format kriteria yang telah disepakati dan dikembangkan oleh sebuah lembaga.

Kriteria yang sama tersebut dapat dicermati bagaimana program da'i perbatasan yang telah berjalan sejak tahun 2002 yang lalu di beberapa wilayah yang ada di Aceh berupaya semaksimal mungkin meningkatkan profesionalisme da'i dengan memberikan sarana dan prasarana penunjang untuk optimalisasi kinerja da'i di lapangan. Peningkatan kinerja da'i sendiri selain pengadaan sarana dan prasarana penunjang -kendatipun belum memadai-penghargaan maupun sanksi juga dilakukan secara berkelanjutan dalam meningkatkan eksistensi da'i di tengah masyarakat. Senada dengan apa yang diutarakan kepala Dinas Syariat

Islam Propinsi Aceh, bahwa penghargaan dan sanksi menjadi tolak ukur untuk melihat keberhasilan program yang telah dilakukan da'i di lapangan. Kendatipun memang disebutkan bahwa, sanksi yang diberikan tidak serta merta dilakukan sepihak kepada da'i, namun juga tetap berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota terkait tindakan sanksi yang diberikan kepada da'i bilamana tidak menjalankan amanah sebagaimana tugas pokok da'i perbatasan.

Menurut Nasruddin Ibrahim, M.Ag, Ka UPTD PAI dan Da'i DSI Aceh bahwa ke depan dari hasil kunjungan juga menjadi masukan bagi pihak dinas, misalkan yang memiliki prestasi (mampu mengislamkan masyarakat, adanya peningkatan kehidupan keagamaan; pendidikan Islam maupun praktek ajaran islam) akan mendapat penghargaan seperti diumrahkan gratis oleh pemerintah, tentu akan sangat membahagiakan bagi da'i yang berprestasi tersebut. Semua ini masih berupa upaya dari DSI yang diharapkan akan membuahkan hasil yang baik.<sup>108</sup> Hal ini merupakan bagian dari penghargaan dari pemerintah bagi da'i yang telah bekerja secara maksimal.

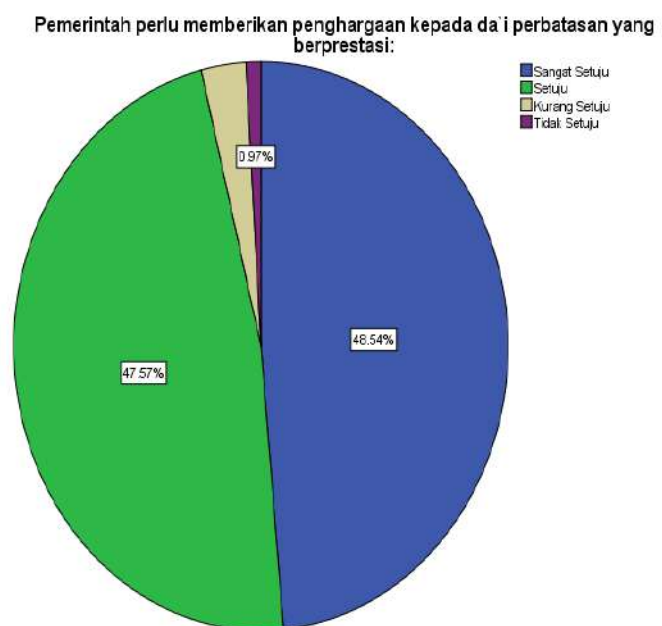
Masih senada dengan pandangan sebelumnya, terkait dengan sarana dan prasarana pendukung yang diberikan bagi da'i yang bertugas "agak" cukup maksimal kendatipun sejak program ini digulirkan penghargaan yang diberikan baik di tingkat Provinsi maupun dinas Kabupaten/kota secara langsung maupun tidak langsung sepertinya belum dilakukan secara komprehensif. Artinya, bentuk penghargaan yang dilakukan oleh DSI Aceh secara lebih khusus belum terealisasi dengan nyata. Ada beberapa item yang dilakukan untuk memperkuat penguatan

---

<sup>108</sup>Wawancara dengan Drs. Nasruddin Ibrahim, M. Ag, Ka. UPTD Da'i Perbatasan DSI Aceh, Tanggal 25 Agustus 2015 di Banda Aceh.

kinerja da'i, namun bentuk penghargaan yang diterima oleh da'i agaknya masih cukup lemah. Berbanding terbalik barangkali bila mencermati fakta di lapangan, aspek sanksi yang diterima para da'i yang tidak melaksanakan tugasnya secara baik cukup beragam, baik sanksi administratif maupun sanksi hukuman. Sanksi administratif biasanya dalam bentuk teguran, atau sampai pada pemindahan lokasi da'i dari wilayah sebelumnya ke wilayah lain.

Senada dengan itu, hasil angket menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada da'i yang berprestasi; 48.54% (sangat setuju), 47.57% (setuju) dan 0.97 (kurang setuju dan tidak setuju).

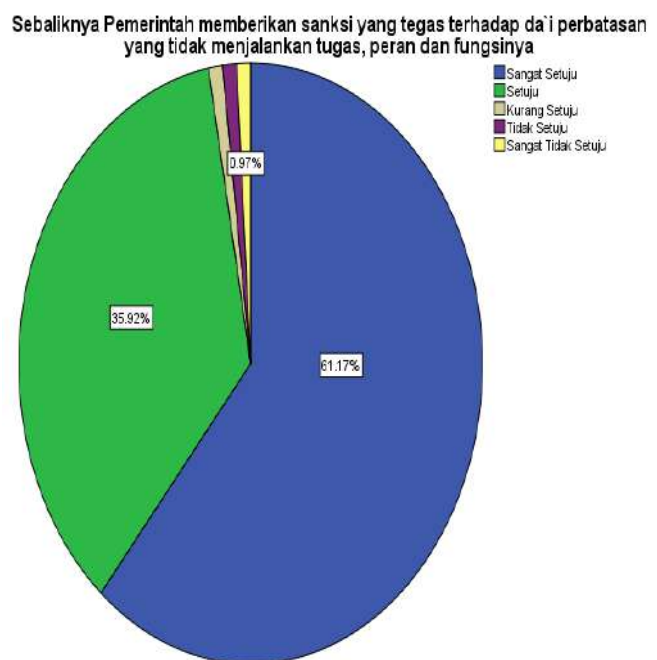


Sedangkan hukuman yang ditegakkan bagi da'i yang secara jelas dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada melanggar ketentuan dan komitmen yang telah ditanda tangani oleh da'i. Pernah ada kasus temuan dari koordinator lapangan, dan DSI kabupaten/kota, dimana teman-teman da'i sendiri terhadap da'i yang tidak bekerja. Informasi digali dari tokoh gampong, geuchik, teungku imum, masyarakat, dan lainnya. Setelah valid, dikeluarkan surat pemberhentian. Jika dia *complain*, akan tunjukkan bukti-bukti tadi. Pernah ada da'i yang *complain* ke Banda Aceh bawa imam dan ketua pemuda palsu ke kantor, lalu kita adakan

pertemuan di sini, setelah dia melakukan protes, kemudian kita tunjukkan bukti bukti kongkrit terkait kesalahan ia, baru ia mengakui, dan merasa malu. Tentunya, juga tidak akan menzalimi orang lain dengan informasi tidak jelas, jadi setiap ada laporan pasti ditindaklanjuti dengan benar.<sup>109</sup>

Bahkan Prof. Dr. Syahrizal Abbas menambahkan bahwa sampai saat ini sudah ada 5 orang yang pecat karena jelas dan terbukti secara sah melanggar ketentuan dan komitmen yang telah ditandatangani. Sebelum dilakukan pemecatan pihak DSI Aceh telah melakukan peringatan, pemanggilan, kemudian dilakukan investigasi tertutup dengan cara observasi langsung ke lapangan. Meminta kesaksian dari Keuchik, tokoh masyarakat, pemuda tentang kinerja da'i. Setelah bukti dan segala sesuatu telah rampung kemudian kami melakukan pemecatan secara terhormat.<sup>110</sup>

Sejalan dengan itu, angket dari masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah sudah tepat jika memberikan sanksi bagi da'i yang tidak melaksanakan tugas dan perannya; 61.17%



<sup>109</sup>Wawancara dengan Drs. Nasruddin Ibrahim, M. Ag, Ka. UPTD Da'i Perbatasan DSI Aceh, 25 Agustus 2015 di Banda Aceh.

<sup>110</sup>Hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kepala DSI Aceh, 23 Oktober 2015 di Banda Aceh.



(sangat setuju), 35.92% (setuju) dan 0.97 (kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju).

Secara terpisah seperti diutarakan para da'i di wilayah Kabupaten Aceh Singkil bahwa sarana dan prasarana penunjang yang diberikan dinas Syari'at Islam Kabupaten/kota sebagai media dalam pelaksanaan harian da'i di lokasi yang telah ditentukan masih belum optimal bila mana melihat kondisi geografis lokasi dari tugas para da'i. Konsekuensi ini sangat wajar bila kemudian memberi dampak terhadap efektifnya dari program yang telah disusun para da'i. Desakan kebutuhan ekonomi, dan setting sosial, serta aspek budaya masih menjadi persoalan penting yang ada saat ini terkait kinerja da'i perbatasan.

Pernyataan ini dapat dicermati dari beberapa persoalan yang masih menggantung terkait program da'i perbatasan tidak lain adalah mekanisasi dan sosialisasi tentang da'i perbatasan di wilayah Aceh, khususnya di wilayah perbatasan Aceh masih belum dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dipahami dari beberapa permasalahan yang muncul dilapangan mengidentifikasi persoalan ganjaran dan sanksi masih belum terlaksana dengan baik.

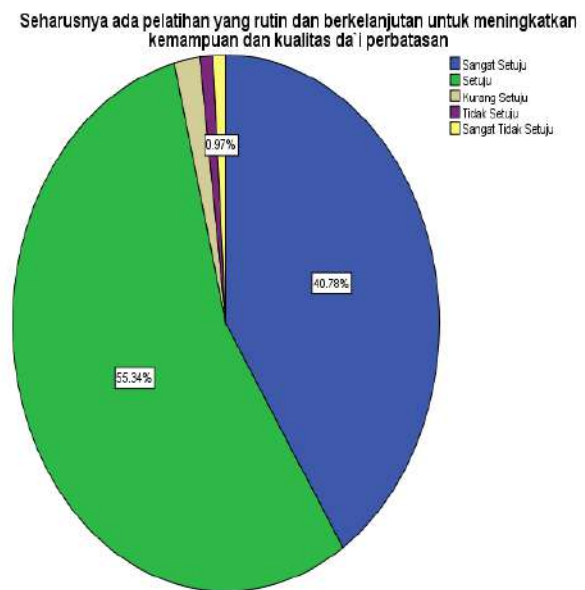
Dengan pola pembinaan yang dikembangkan selama ini dalam meningkatkan kinerja da'i perbatasan, persoalan penghargaan dan ganjaran dari hasil kinerja da'i sepertinya belum terjabarkan secara efektif. Intensitas koordinasi antara pihak dinas Syari'at Islam dengan da'i menjadi instrument penting dalam upaya membenah format pembinaan da'i itu sendiri. Artinya, bentuk reward dan sanksi yang diberikan harus mengacu dari profesionalisme dari kinerja da'i itu sendiri, sehingga sangat wajar bila bentuk penghargaan dan sanksi

ini harus menjadi bentuk prioritas mengefektifkan keterlibatan da'i di wilayah kerjanya.

## 5. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan (SDM)

Mempersiapkan SDM mumpuni di bidangnya merupakan usaha yang terus menerus dilakukan Pemerintah Aceh untuk memperkuat kinerjanya. Salah satu program Pemerintah Aceh dalam memperkuat pelaksanaan syari'at Islam adalah menempatkan para da'i unggul di wilayah-wilayah perbatasan yang dianggap rentan terhadap upaya-upaya pemurtadan dan pendangkalan aqidah masyarakat.

Bersamaan dengan hal tersebut masyarakat juga sangat setuju dengan adanya peningkatan SDM bagi da'i; 40.78% (sangat setuju), 55.34% (setuju) dan 0.97% (kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju). Da'i unggul tentu harus diproses berdasarkan tes rekrutkmen yang kompetitif.



Siapapun memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Dinas Syari'at Islam Aceh berhak menjadi da'i perbatasan. Seleksi dilakukan dengan muatan materi kompetensi untuk seorang da'i yang dianggap mampu melaksanakan tugasnya, serta dilakukan dengan terbuka dan transparansi (jauh dari kesan nepotisme, dan

lainnya).<sup>111</sup> Terlihat ada upaya perbaikan tes dan pola rekrutkmen pada da'i yang diharapkan mampu merepresentasikan keterwakilan pemerintah memberi pencerahan agama kepada para warganya.

Sejak tahun 2014-2015, proses tes calon para da'i sudah lebih ketat dan kompetitif. Kemampuan menguasai agama sangat ditekankan, sehingga peserta yang lulus banyak dari alumni dayah yang dinggap mempunyai kemampuan lebih bidang agama, selain menguasai metode ceramah, mereka juga menguasai cara baca kita klasik (kitab kuning) yang dapat diajarkan pada masyarakat sekitar. Alumni UIN Ar Raniry pada saat itu hanya 5 % yang lulus di program da'i (2-3 orang), selebihnya didominasi oleh alumni dayah. Karena umumnya, mereka semua stagnan pada tes membaca kita kuning tersebut, yang menjadi panduan ajar masyarakat nantinya.<sup>112</sup>

Pada sisi lain kualifikasi ilmu yang dites ini diakui oleh para da'i terpilih, Agus, S. Pd.I,<sup>113</sup> salah seorang da'i menjelaskan bahwa pada saat ia mengikuti seleksi da'i perbatasan, yang pertama diwawancarai adalah terkait pendidikan dan adat istiadat masyarakat Aceh, qanun, fiqih serta tes kemampuan membaca Al-Quran dan ceramah. Tetapi, menurutnya ada hal yang paling penting selain dari itu, yaitu ilmu sosiologi dan kemasyarakatan.<sup>114</sup> Tanpa ini para da'i akan kesulitan

---

<sup>111</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.

<sup>112</sup>Apa yang disampaikan Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, diperkuat pula oleh wawancara dengan Abdul Rani, Staf Bidang Sumber Daya DSI Aceh, 19 Agustus 2015 di Banda Aceh.

<sup>113</sup>Wawancara dengan Agus Nurjamil, S. PdI, Da'i Perbatasan di Kampung Karo, kec. Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>114</sup>Hal ini diperkuat pula oleh penjelasan Tgk. Muhammad, Datok Penghulu (Keuchiek) Gampong Perkebunan Seruwei, Keamatan Seruwei, Aceh Tamiang, 25 Agustus 2015 di Tamiang. Menurutnya, seorang da'i perbatasan bahkan harus menguasai betul "sosiologi masyarakat

dalam memahami karakter masyarakat, sehingga dia tidak betah tinggal di tempat yang ditugaskan yang berakibat pada terhambatnya program-program yang menjadi Tupoksi da'i perbatasan. Ini sangat penting yang harus diperbaiki nantinya.

Pelaku tes nya nanti akan dicari orang-orang dari ekonomi syariah, atau siapaun yang dapat melakukan penilaian dan mengukur orang terhadap komponen-komponen tersebut. Pada tes 20 orang yang diajukan penambahan, DSI Aceh memang belum menggunakan komponen ketiga, yang ditambah dan hanya dilakukan yaitu pada komponen psikologis. Jadi ke depan, komponen interprener harus dimasukkan dalam proses rekrutkmen da'i. Apalagi, DSI Aceh sering menerima surat dari beberapa da'i, mereka minta dipindahkan lokasi penempatannya ke lokasi baru sesuai keinginannya .

Tentunya, hal ini harus diantisipasi, karena itu tes psikologi dan interprener penting untuk menanggulangi keluhan dalam penempatan da'i nantinya. Psikolog tentu paham jiwa kesiapan individu, atau kenapa da'i minta pindah dari lokasi penempatan. Terkait komponen interprener, kita lakukan pembinaan dan pelatihan saja dulu bagi mereka yang sudah bekerja. Karena nantinya, tes interprener akan kita lakukan pada saat rekrutkment jika ada penambahan kuota lagi, ini ideal untuk format rekrutkmen ke depan, agar mereka juga bisa memberdayakan masyarakat.

---

perkebunan” dimana masyarakatnya hidup seperti remot kontrol, perusahaan adalah tuannya. masyarakat harus ikut sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh majikannya. Kegiatan apapun yang dilaksanakan di kawasan komplek perkebunan, jika tidak mendapat dukungan dan restu dari perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Ini penting diketahui supaya para da'i bias menyesuaikan diri nantinya dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, setiap tahun kinerja da'i juga akan di-*upgrade*. Jadi setiap tahun mereka akan diundang ke Banda Aceh, dilakukan pertemuan dan diminta informasi perkembangan di daerah tempat mereka ditugaskan. Apalagi, calon da'i pada saat tes juga dilakukan tes psikologi, kita undang tim psikologi khusus dari UIN Ar-Raniry pada saat tes, guna menilai sikap menghadapi masyarakat yang tergolong rawan di daerah perbatasan.<sup>115</sup> Pengetahuan saja tak cukup, jika mereka tak mampu beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Karena itu, para da'i ditempatkan di tengah masyarakat, dan tak boleh pulang. Mereka difasilitasi dengan gaji (bahkan melampaui UMR), honor sewa rumah, akomodasi hingga diberikan transportasi saat bertugas di lapangan.

Berkaitan dengan pembinaan da'i yang dilakukan setiap tahun, diakui oleh Drs. Nasruddin Ibrahim, M. Ag. Ka. UPTD Da'i Perbatasan DSI Aceh, meskipun tahun ini tidak semuanya dapat giliran ikut pelatihan karena keterbatasan dana yang dianggarkan oleh DPRA. Komitmen dinas dalam berusaha cukup baik, meskipun dalam hasil belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu pembinaan juga dilakukan disaat tim DSI yang dibantu oleh para akademisi (pakar bidang tertentu) terjun ke daerah-daerah atau lokasi da'i, yang berupa pembinaan langsung.<sup>116</sup>

Indikasi kemampuan dan kapasitas para da'i yang terpilih adalah keberhasilan para da'i dalam meyakinkan Islam sebagai agama yang benar. Ini dapat terlihat dari banyaknya muallaf dari Non Muslim seperti di Aceh Singkil

---

<sup>115</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.

<sup>116</sup>Wawancara dengan Drs. Nasruddin Ibrahim, M. Ag. Ka. UPTD Da'i Perbatasan DSI Aceh, 25 Agustus 2015 di Banda Aceh.

yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Datanya, dapat dilihat di kantor Dina Syari'at Islam Provinsi Aceh. Masuk Islam memang kesadaran mereka sendiri, tentunya juga ini diperkuat oleh kinerja da'i perbatasan. Ceramah dan pencerahan yang disampaikan da'i, memberi kesadaran mereka untuk mengakui Islam sebagai agama yang dapat menjawab segala kegelisahan umat manusia akhir-akhir ini. Apalagi, mereka masuk Islam juga dibantu syahadat oleh da'i perbatasan, sebut saja pada masa Gubernur Irwandi/Nazar. Kelemahan kita jarang mengekspose berita penting seperti ini. Kita hanya menerima data dan informasi kepada kita. Kita pun, hanya bisa mengapresiasi kerja-kerja da'i tersebut secara lisan saja.

Para da'i perbatasan mengakui adanya pembekalan terlebih dahulu sebelum mereka diturunkan ke lokasi pengabdian.<sup>117</sup> Selanjutnya untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan para da'i dilaksanakan pelatihan setiap tahun di DSI Provinsi Aceh.<sup>118</sup> Pembekalan itu dirasakan sangat bermanfaat untuk memberi bekal dan modal semangat bekerja sebagai da'i. Apalagi para da'i berkeyakinan bahwa da'i merupakan profesi mulia yang berusaha menjadi elemen penguat aqidah, penghalau kemaksiatan dan pendangkalan aqidah serta menjadi figur yang menebarkan kebaikan di tengah-tengah umat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.

---

<sup>117</sup>Wawancara dengan Muslim Bancin, Ketua Forum Da'i Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>118</sup>Sebagaimana diakui hal ini oleh Samsul Bahri, SH, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Singkil, 18 Agustus 2015 di Singkil. Kadis DSI Singkil ini mengakui seharusnya para da'i ini juga diperkuat keterampilan dan keahliannya di tingkat kabupaten, tetapi sampai sejauh ini, hal ini memang belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Namun demikian, diharapkan para da'i dibekali dan terus ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya secara kontinyu, baik yang dilaksanakan Dinas Syari'at Islam Provinsi maupun Dinas Syari'at Islam Kabupaten/Kota.<sup>119</sup> Selama ini belum pernah ada pelatihan dilakukan di tingkat kabupaten kota. Zainuddin, salah seorang da'i di Kecamatan Simpang Kanan Singkil juga menyebutkan hal yang sama, dimana pelatihan juga dilaksanakan di kabupaten/kota.<sup>120</sup> Pelatihan keterampilan yang mumpuni memang sangat dibutuhkan untuk para da'i mengingat tantangan yang mereka hadapi sangat tinggi, apalagi berada di tengah-tengah komunitas heterogen yang berbeda bukan saja agama tetapi suku dan bahasa. Pelibatan para da'i dalam setiap rapat koordinasi juga dianggap sangat signifikan, paling kurang ada unsur da'i yang diikutsertakan dalam memutuskan kebijakan bidang agama. Sepertinya ini aspek yang dirasakan kurang berjalan dengan baik selama ini.

## **6. Mekanisme Pelaporan**

Terkait laporan kerja para da'i, perbatasan, sebenarnya Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh sudah menyiapkan format pelaporan yang harus diisi dan dilengkapi da'i. DSI menyiapkan format yang berisi kegiatan mereka sehari-hari di lapangan, jadi mereka hanya mengisi format itu, koordinator lapangan

---

<sup>119</sup>Wawancara dengan Drs. Hamidin, M.Pd, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015. Sebenarnya masalah kapasitas dan kemampuan da'i ini belum memada'i atau masih kurang untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, karena pada umumnya mereka tidak mau membaca lagi, sehingga mencukupkan dengan apa yang diketahui selama ini.

<sup>120</sup>Wawancara dengan Zainuddin, Da'i Perbatasan, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.

kemudian meneruskan pada Dinas Syari'at Islam kabupaten/kota untuk selanjutnya diteruskan lagi ke Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh.<sup>121</sup> Dari penjelasan ini, jelas tergambar mekanisme pelaporan da'i yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Pelaporan ini dianggap sangat penting untuk menggambarkan kegiatan dan kinerja yang dilakukan para da'i di lapangan.

Hanya saja, waktu pelaporan ke DSI Aceh itu dalam kurun waktu enam bulan sekali. DSI kabupaten/kota menyiasati hal ini dengan pelaporan bulanan, seperti apa yang dilaksanakan DSI Singkil, ketika para da'i mengambil gajinya di awal bulan, DSI Singkil selalu meminta laporan para da'i secara rutin dan tertulis, kalau tidak ada laporan, maka pembayaran honorinya ditunda. Enam bulan sekali laporan itu dikirimkan ke DSI Aceh.<sup>122</sup>

Menyangkut format laporan, Singkil masih menggunakan format yang ditawarkan oleh DSI Aceh. Muslim dan Zainuddin sebagai da'i yang diwawancarai di Aceh Singkil mengakui bahwa mereka selalu memberikan laporan bulanan kepada DSI Singkil di awal bulan ketika mereka mau menerima honor. Kemudian setiap enam bulan sekali laporan itu juga wajib dibuat dan diberikan kepada DSI Aceh.

Mekanisme pelaporan yang sama juga dibuat oleh da'i Tamiang, mereka membuatnya perbulan, setiap da'i wajib memenuhi 20 (dua puluh) jam kegiatan. Format laporan yang dibuat oleh para da'i perbatasan di Tamiang sedikit berbeda dengan mekanisme pelaporan yang ada di daerah-daerah lain. Bentuk laporan

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.

<sup>122</sup>Wawancara dengan Samsul Bahri, SH, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Singkil, 18 Agustus 2015 di Singkil.



yang dibuat berbeda formatnya dengan yang diwajibkan oleh Dinas Syari'at Islam Provinsi. Perbedaannya karena yang tanda tangan untuk provinsi hanya da'i, keuchik dan koordinator. Sedangkan di Tamiang, selain da'i, keuchik dan koordinator juga wajib ditandatangani oleh imam gampong, karena ia merupakan penanggungjawab bidang agama. Tugas dan peran da'i banyak terkait dengan masalah keagamaan, yang menjadi tugas keseharian imam.<sup>123</sup>

Sekalipun hal ini tidak disenangi oleh sebagian masyarakat Tamiang sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh T. Armansyah.<sup>124</sup> Menurutnya, bentuk laporannya perlu diubah, yaitu imam seharusnya tidak ikut menandatangani laporan da'i perbatasan sebagaimana yang dibuat selama ini. Seperti diketahui di kabupaten/kota lain juga tidak ada. Cukup mengetahui, Datuk Penghulu (Kepala Desa), da'i dan koordinator kabupaten saja. Karena saat ini seolah-olah imam adalah koordinator pada tingkat *gampong*, atau da'i berada dibawah imam. Seharus da'i dan imam setara karena memang tugas dan perannya dalam masyarakat sama. Akibatnya yang terjadi saat ini adalah kecemburuan sosial karena honor dan fasilitas da'i lebih banyak dibandingkan dengan teungku imam.

Satu lagi yang berbeda di Tamiang dalam hal kegiatan ini adalah tidak boleh mencantumkan "menjadi imam shalat lima waktu" karena itu cukup ringan dilakukan, jika lima kali sehari-semalam, maka sudah berapa jam terhitung. Sedangkan di daerah lain menjadi Imam shalat lima waktu dihitung dan dimasukkan dalam laporan bulanan. Laporan yang sudah dipersiapkan da'i ini

---

<sup>123</sup>Wawancara dengan Efendi, S.Pd, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal 25 Agustus 2015 di Tamiang.

<sup>124</sup>Wawancara dengan T. Armansyah, Majelis Duduk Setikar (Tuha Peut), Kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Tamiang, Tanggal 25 Agustus 2015 di Tamiang.

kemudian diserahkan dan diverifikasi oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu, honor dapat dicairkan dan diterima oleh da'i. Jika tidak memenuhi hal tersebut di atas, maka honorinya tidak akan diberikan.<sup>125</sup> Ini sudah menjadi komitmen para da'i yang ditugaskan di Aceh Tamiang.

Tentang pelaporan ini, da'i yang ditempatkan di wilayah Aceh Tenggara juga melakukan hal yang sama. Da'i membuat laporannya sebulan sekali di awal bulan kemudian dikirimkan ke DSI Aceh.<sup>126</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, pada da'i perbatasan berkewajiban melaporkan setiap program yang dilaksanakan setiap hari, minggu dan dijadikan laporan bulanan. Laporan tersebut berisikan tentang seluruh aktivitas da'i setiap hari kemudian ditanda tangani oleh Lurah kemudian disatukan menjadi laporan bulanan. Laporan tersebut akan diberikan ke DSI Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian jika diminta baru dikirim ke Dinas DSI Aceh.<sup>127</sup> Tentunya laporan-laporan itu akan ditindaklanjuti oleh DSI Aceh.

Selain laporan kegiatan rutinitas para da'i, DSI Aceh juga mengakomodir laporan masyarakat terhadap da'i yang bermasalah di lapangan. Pernah beberapa kasus misalnya, DSI Aceh pernah mendapat laporan dari korlap dan DSI kabupaten/kota, teman-teman da'i sendiri terhadap da'i yang tidak bekerja, lalu DSI Aceh menerunkan tim untuk memantau dan melakukan cek kebenaran informasi. Informasi digali dari tokoh gampong, geuchik, teungku imum,

---

<sup>125</sup>Wawancara dengan Drs. Maddiyah, M.Pd, Wakil Koordinator Da'i Perbatasan DSI Aceh Tamiang, Tanggal 25 Agustus 2015 di Tamiang.

<sup>126</sup>Wawancara dengan Drs. Hamidin, M.Pd, Kepala Dinas Syari'at Islam kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>127</sup>Wawancara dengan Ustaz Agus Nurjamil, S. PdI, Da'i Kampung Karo, Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

masyarakat, dan lainnya. Setelah valid, dikeluarkan surat pemberhentian. Jika dia *complain*, DSI Aceh akan tunjukkan bukti-buktinya. Pernah ada da'i yang *complain*, ia ke Banda Aceh bawa imam dan ketua pemuda palsu ke kantor, lalu kita adakan pertemuan di sini, setelah dia melakukan protes, kemudian DSI Aceh menunjukkan bukti bukti kongkrit terkait kesalahannya, baru kemudian ia mengakui, dan merasa malu.<sup>128</sup> Tentunya, DSI Aceh juga tidak akan menzalimi orang lain dengan informasi yang tidak jelas, jadi setiap ada laporan pasti ditindaklanjuti dengan benar. Apalagi, setiap da'i itu diberikan honor, jaket, baju seragam hingga sepatu dan kendaraan, jadi mereka harus bekerja sesuai kesepakatan.

## **7. Pola Koordinasi Lintas Sektoral dengan Lembaga Lain**

Pola koordinasi Lintas Sektoral dengan Lembaga lain merupakan sebuah hal yang sangat urgen dalam menyukseskan program da'i perbatasan. Meskipun secara struktural program da'i perbatasan ini berada di bawah Dinas Syari'at Islam namun upaya koordinasi dengan lembaga lain yang terkait tetap dipandang perlu. Bagaimanapun sebuah program yang dilaksanakan dalam wujud koordinasi yang padu dalam bentuk koordinasi lintas sektoral dengan lembaga lain tetap akan menampakkan hasil yang baik.

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan, memang koordinasi lintas sektoral antar lembaga belum dilakukan secara maksimal. Hal ini sebagaimana diakui oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Kepala DSI Aceh bahwa selama ini

---

<sup>128</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, Tanggal 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.

kerjasama lintas-sektoral belum cukup maksimal dalam upaya menempatkan da'i sebagai agen atau fasilitator di *gampong*, terutama terkait pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan yang identik dengan kemiskinan. Se jauh ini program dan kegiatan da'i perbatasan masih terfokus pada penguatan aqidah, peningkatan ibadah dan pembinaan moral. Lebih lanjut Prof Syahrizal mengatakan bahwa ke depan akan terus dibangun komitmen untuk melakukan dakwah bil hal, dengan mengarahkan dan menggiring da'i menjadi fasilitator sosial.

Selanjutnya Kepala DSI mengatakan bahwa upaya ke arah koordinasi dengan lembaga lain dalam batas tertentu sudah pernah dilakukan. Dimana DSI pernah mengadakan seminar dalam rangka pengembangan kapasitas da'i, dalam kegiatan tersebut diundang undang pakar di bidang ekonomi dan sosial untuk memberikan pencerahan terkait pola pengembangan masyarakat berbasis sosial dan ekonomi. Sejatinya Da'i harus punya jiwa enterprenur. Buktinya, sudah ada beberapa da'i yang justru sukses membangun sektor ekonomi di tengah masyarakat.

Di Subulussalam ada satu orang da'i, ia sudah mampu membangun pesantren terpadu dalam kebun sawit. Da'i dimaksud sekarang ia memiliki seluas 5 Ha yang diwakafkan oleh oleh masyarakat di sana untuk pengembangan dan memajukan pesantren. Bahkan pengajar di pesantren tersebut didatangkan dari Gontor Ponorogo yang gajinya diberikan dari hasil kebun sawit yang diwakafkan. Namun semua ini dilakukan atas dasar inisitif dan kreativitas pribadi da'i yang tentunya mempunyai jiwa *interpreneur* yang kuat.

Kalaupun dalam kenyataannya ada beberapa kerja sama yang telah terbina

antara da'i perbatasan dengan beberapa lembaga lain baik organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi sosial keagamaan namun itu tidak secara kelembagaan melainkan hanya sebatas komunikasi personal. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Roswin Hakim bahwa secara kelembagaan tidak pernah ada koordinasi dengan kami, tetapi da'i secara personal ada yang juga yang berdiskusi dengan kami secara personal.

Dalam nada yang sama Bapak Safrilisyah M.Si juga mengungkapkan bahwa selama ini memang koordinasi lintas sektoral ini juga belum berjalan dengan baik. Lebih lanjut ia mengatakan memang sejatinya memang perlu dibangun pola komunikasi antar lembaga terkait. Dalam perannya sebagai agen yang bertugas mewujudkan dahwah Islam di daerah perbatasan termasuk didalamnya menciptakan hubungan harmonis antar umat beragama dalam kerukunan ada baiknya dilakukan kerjasama atau kordinasi secara kelembagaan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama.<sup>129</sup> Membangun koordinasi ini nyatanya memang belum dilakukan, hal ini mungkiin juga terjadi karena terjadi lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga belum begitu aktif dan eksis di daerah perbatasan.

Ke depan mungkin perlu dilakukan koordinasi atau kesepahaman antara kedua lembaga ini yaitu antara Da'i Perbatasan dibawah Dinas Syari'at Islam dengan FKUB dibawah Kementerian Agama. Koordinasi ini dinilai potensial mengingat sekarang. FKUB memiliki perwakilan di setiap kabupaten/Kota di Aceh yang berada di bawah Kementrian Agama. Selama ini memang pernah ada

---

<sup>129</sup>Wawancara dengan Syafrilisyah, MA, Ikadi dan FKUB, Tanggal 29 Agustus 2015 di Banda Aceh.

hubungan kerjasama hanya sebatas pengisi materi di waktu pembekalan saja, tidak sebagai rekan kerja di lapangan (kemitraan).

*Master plan* atau program yang ideal kedepannya adalah program penyatuan kegiatan FKUB yang beririsan dengan program para da'i perbatasan tersebut, sehingga FKUB dengan da'i perbatasan dapat menjadi sebuah kemitraankerja dalam menjaga kerukunan umat beragama, dan seterusnya terus melakukan kegiatan yang bersifat pendataan rumah ibadah di tempat pembinaan tersebut, sekaligus mendatakan organisasi-organisasi keagamaan yang berada di Aceh, kegiatan yang seperti ini sangat penting bagi Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh dan FKUB-Aceh.

Di sisi lain Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MA, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Aceh, mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada jalur koordinasi resmi antara DSI Aceh terhadap DDII Aceh, karena Lembaga Dewan Dakwah tersebut hanyalah sebuah organisasi masyarakat, dan sangat berbeda dengan DSI yang merupakan bagian dari pemerintahan Aceh secara institusional. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa Dewan Dakwah Wilayah Aceh selalu memberikan kritik dan saran kepada DSI Provinsi Aceh dalam meningkatkan kualitas dakwah islamiyah khusus di wilayah rentan perbatasan.<sup>130</sup> Selama ini DDII memiliki komitmen yang kuat untuk menyesuaikan dakwah ini, dan kini lembaga ini memiliki perwakilan di daerah- daerah perbatasan Sumatera Utara, seperti Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam, dan Seumeleu.

---

<sup>130</sup>Wawancara dengan Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, Ketua DDII Aceh, Tanggal 31 Agustus 2015 di Banda Aceh.

Meskipun dari beberapa responden yang diwawancarai ada yang mengatakan belum ada koordinasi lintas sektoral yang melibatkan pihak lain sebagai mana diungkapkan oleh Kepala DSI Aceh Tenggara. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan koordinasi antara da'i dengan lintas sektoral, yang ada itu adalah koordinasi antara UPTD yang menangani da'i itu melakukan koordinasi lintas sektoral itupun melalui DSI Aceh.

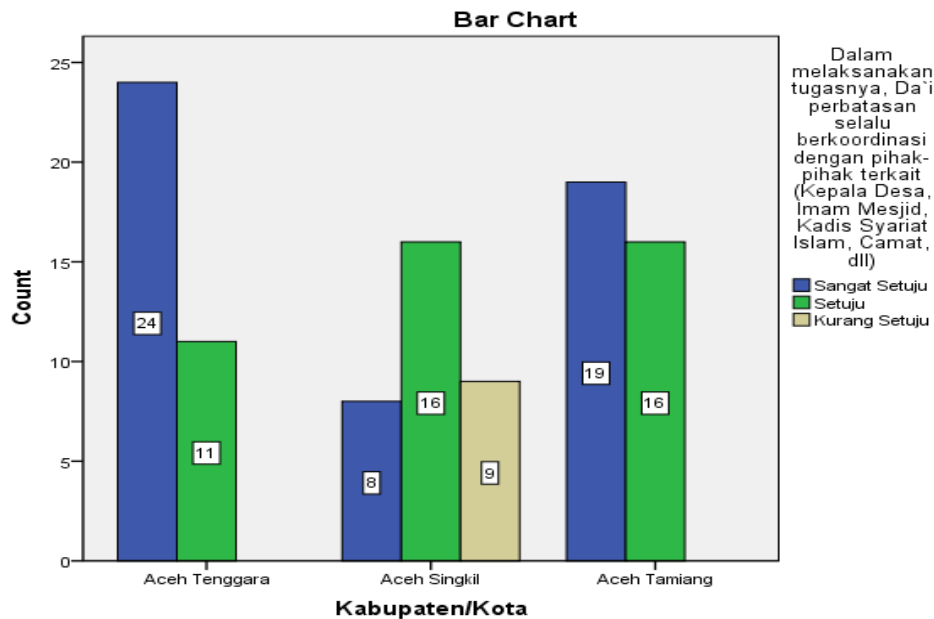
Menurut beberapa data dari informan bahwa sudah dibangun koordinasi oleh da'i dengan aparat gampong (*geuchik, imam gampong, tuha peut*, kepala lorong), kemudian mengenai persoalan keagamaan biasanya ditangani oleh MPU dan dikoordinasikan kepada pemerintah termasuk Bupati. Hal ini juga diakui oleh perangkat gampong bahwa dalam kerjanya da'i sering berkomunikasi baik secara langsung ataupun dengan HP dengan mereka mengenaimasalah-masalah keagamaan, hari besar Islam, kematian (Tahlilalan). Selanjutnya juga ditambahkan koordinasi yang sudah berjalan selama ini adalah dengan Kemenag, MPU dan aparat gampong. Dengan Kemenag dalam hal perayaan hari-hari besar Islam, dengan MPU dalam hal pembinaan masyarakat pencegahan pendangkalan aqidah. Sedangkan dengan aparat gampong adalah sebelum da'i ditempat digampong, maka pihak Dinas Syari'at Islam Kabupaten mengantar sampai ke Kecamatan dan dilakukan serah terima secara formal. Kemudian setelah da'i bertugas koordinator selalu melakukan komunikasi melalui telepon tentang kinerja da'i di lapangan.

Sebaliknya ada pengakuan bahwa koordinasi lintas sektoral selama ini sudah berjalan dengan baik, setiap ada persoalan yang dilaporkan oleh da'i maka

untuk memecahkan persoalan tersebut semua unsur dilibatkan yang difasilitasi oleh FKUB. Selebihnya ada juga yang mengatakan sudah melakukan koordinasi lintas sektoral meskipun terbatas dalam kondisi dan waktu-waktu tertentu, seperti adanya razia maksiat dengan satpol PP, Polisi, MPU sedangkan koordinasi secara khusus tidak ada. Selain itu kordinasi tercipta jika adanya peringatan hari-hari besar Islam, yang pasti kordinasi yang terjadi pada hari ini hanya ada dengan DSI Privinsi sebagai atasan dengan bawahan dengan DSI Kabupaten sebagai tempat jika kami dilibatkan dalam aktivitas keagamaan. Koordinasi da'i lintas sektoral dilakukan kalau ada kegiatan atau program, koordinasi dengan kemenag, MPU, Kepolisian, Ormas dll. Koordinasi yang sering dilakukan dalam masalah *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Selanjutnya dari angket yang disebar terkait dengan pernyataan bahwa dalam melaksanakan tugasnya da'i perbatasan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (kepala desa, imam masjid, kadis syari'at Islam, camat, dll). Di Aceh Tenggara dari total 35 angket yang disebar maka 24 reponden menyatalam sangat setuju, 11 responden menyatakan setuju, dan tidak ada yang kurang setuju. Di Singkil dari total 35 angket yang disebar maka 8 reponden menyatalam sangat setuju, 6 responden menyatakan setuju, dan 9 responden kurang setuju. Sedangkan Di Tamiang dari total 35 angket yang disebar maka 19 reponden menyatalam sangat setuju, 16 responden menyatakan setuju, dan tidak ada yang kurang setuju. Secara keseluruhan dapat digambarkan dalam pie dan chart berikut:





Dari keseluruhan pendapat tentang ada tidaknya koordinasi lintas sektoral terkait dengan program da'i perbatasan, maka dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan belum ada sebuah kebijakan yang secara khusus mengatur tentang pola koordinasi lintas sektoral ini. Untuk ke depan mungkin diperlukan sebuah pola koordinasi lintas sektoral dalam rangka perbaikan kinerja da'i perbatasan. Koordinasi antar lembaga terkait ini sudah harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahapan evaluasi.

Di tahapan perencanaan mungkin perlu dilakukan koodinasi dengan Perguruan Tinggi Islam terutama dalam proses rekrutmen, sehingga da'i yang terpilih memenuhi kriteria keilmuan yang dibutuhkan dilapangan. Kemudian dalam rangka persiapan dan pengembangan kapasitas keilmuan perlu dilakukan pembekalan dalam bentuk seminar atau pelatihan yang melibatkan pihak-pihak lain seperti organisasi sosial kemasyarakatan, organiasi sosial keagamaan dan lembaga-lembaga dakwah dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Pada tahapan pelaksanaan juga perlu dibangun koordinasi tentang penempatan da'i sehingga benar-benar ditempatkan ditempat yang lebih

dibutuhkan. Dalam pelaksanaan dilapangan perlu dilakukan koordinasi dengan lembaga lain baik dalam menjalankan tupoksinya maupun lembaga lembaga yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang kerukunan umat beragama perlu kerjasama dengan FKUB, dalam bidang pengentasan aliran sesat perlu kerjasama dengan pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dalam bidang dakwah perlu menjalin koordinasi dengan lembaga-lembaga dakwah yang eksis di perbatasan. Selanjutnya pada tahapan evaluasi diperlukan kerjasama dengan lembaga survey dan lembaga riset untuk dapat melakukan evaluasi komprehensi sebagai masukan dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

## **8. Sistem Monitoring dan Evaluasi**

Evaluasi merupakan suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah, sehingga kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dilaksanakan untuk menyediakan informasi mengenai baik atau buruknya proses dan hasil kegiatan. Arikunto dan Jabar memandang, evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Penjelasan lain dikemukakan oleh Stutflebeam, beliau mengatakan evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup>Suharsimi Arikunto dan Jabar, Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hal. 46.

Sudjana menjelaskan bahwa evaluasi dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.<sup>132</sup> Untuk mempertegas pengertian tersebut, Arifin mengatakan, “evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi”.<sup>133</sup>

Karena itu, monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, Monitoring dan Evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Karena kegiatan ini menggunakan metode pelatihan (*workshop*) maka bahan ini hanya sebagai pengayaan yang dilengkapi informasi pokok mencakup aspek-aspek penting dari Monitoring dan Evaluasi (MONEV).

Kegiatan monitoring lebih bertumpu (terfokus) pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan

---

<sup>132</sup>Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 27

<sup>133</sup>Zainal Arifin, 2010, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hal. 61

program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Monitoring dapat disebut sebagai “*on going evaluation*,” yang dilakukan sementara kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan “di tengah jalan” bila diperlukan. Sementara Evaluasi dimaksud adalah “*terminate evaluation*,” yang dilakukan pada akhir program untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat kegiatan sesuai tujuannya atau tidak. Lalu, hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan proyek/program berikutnya.

Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Proses dalam melaksanakan monev secara sederhana adalah “menelusuri” proses pekerjaan atau kegiatan sehingga dapat menemukan “apa yang sesungguhnya terjadi di antara pelaksanaan (proses) dengan tujuan yang dirumuskan. Apabila dalam penelusuran atau pemantauan itu ditemukan adanya pesenjangan atau penyimpangan yang direkomendasikan perubahan atau perbaikan sehingga kesenjangan segera teratasi. Atau setidaknya meminimalisir kerugian yang timbul akibat penyimpangan.

Karena manfaat monitoring itu sangat besar dan penting sebagai “alat perencanaan” maka dilakukan dengan metode dan alat yang terstruktur dan sistematis, misalnya dengan menggunakan angket, wawancara dan sebagainya. Prosesnya secara skematik dapat dilihat seperti dibawah ini:



Seperti terlihat pada gambar siklus Monev, fungsi monitoring dan evaluasi merupakan satu diantara tiga komponen penting lainnya dalam system manajemen program, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Tindakan korektif (melalui umpan balik). Sebagai siklus, dia berlangsung secara intens kearah pencapaian target-target antara dan akhirnya tujuan program. Proses tersebut di atas jelas bahwa Monitoring dan Evaluasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Terutama untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan benar-benar “*on the track*” sesuai tujuan dengan program.

Umpan balik dari sebuah program akan dipergunakan dalam perbaikan dan penyesuaian komponen-komponen yang tidak maksimal dalam pelaksanaan program. Bila memungkinkan perubahan *scenario* dan konsolidasi sumberdaya

dapat dilakukan dalam pelaksanaan program sehingga lebih menjamin keberhasilan program.

Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program dapat membuat penyesuaian dengan memanfaatkan umpan balik tersebut. Kesenjangan yang menjadi kebutuhan itu bisa jadi mencakup faktor biaya, waktu, personel, dan alat, dan sebagainya.

Secara umum tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut;

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana;
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi;
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek;
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan;
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;

4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

Berkaitan tentang monitor dan evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan, di Aceh berpedoman pada Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 khususnya pada Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan kemampuan daya saing daerah.

Peraturan Gubernur tersebut, menjelaskan secara terperinci tentang tugas dan fungsi Gubernur dan SKPA dalam hal monitoring dan evaluasi pada Pasal 10, yaitu: Pengendalian oleh Gubernur, Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPA untuk program dan/atau kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mendukung dan memperkuat terlaksananya salah satu kewenangan Dinas Syari'at Islam Aceh, berdasarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh

Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Syari'at Islam pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka dibentuk dua UPTD yaitu :

1. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran, dan
2. UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i.<sup>134</sup>

Dengan demikian jelas bahwa organisasi tata kerja (ortaker) DSI Aceh merupakan lembaga yang tercantum dalam Peraturan Gubernur sebagai regulasi, sehingga secara hukum lembaga ini legal formal dalam menjalankan roda keorganisasian. Sedangkan khusus yang berkaitan dengan da'i perbatasan, Pemerintah Aceh membuat regulasi tersendiri dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil.

Dalam menjalankan tugasnya, DSI Aceh bekerjasama dengan DSI Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pada da'i yang bertugas di wilayah kerjanya masing-masing dengan ketentuan yang tercantum dalam BAB X Monitoring, Evaluasi dan Laporan pada Bagian Kesatu Monitoring Pasal 24 Monitoring dan evaluasi terhadap Da'i dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Aceh dan unsur terkait lainnya.

Pada Pasal 25 Peraturan tersebut dijelaskan tentang tugas Dinas Syari'at Islam Aceh melakukan monitoring dan evaluasi untuk:

- a. Mempersiapkan instrument data Da'i;

---

<sup>134</sup>Rencana Strategis Dinas Syari'at Islam Aceh Tahun 2012-2017, hal.5



- b. Mempersiapkan daftar pembayaran jasa/biaya operasional Da'i setiap bulannya untuk ditanda tangani oleh masing-masing Da'i;
- c. Melakukan perjalanan dalam rangka persiapan administrasi keuangan sebagai bahan kelengkapan pertanggung jawaban administrasi keuangan;
- d. Menyelesaikan berbagai kendala yang menghambat proses pengiriman dana untuk Da'i;
- e. Memonitor dan mengawasi proses pengiriman dana agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran berjalan ;
- f. Kegiatan Da'i di lapangan perlu terus dipantau, diamati, dan dimonitor, secara berkala baik oleh tim koordinasi lapangan yang ada di Kabupaten/kota yang bersangkutan, maupun monitoring yang dilakukan tim Provinsi Dinas Syari'at Islam Aceh;
- g. Meminta masukan dari aparat pemerintah setempat dan masyarakat setiap bulan, untuk kemudian dievaluasi sebagai bahan penentuan kebijakan lebih lanjut;
- h. Mengevaluasi laporan-laporan tertulis baik yang disampaikan masyarakat maupun media massa serta laporan bulanan yang dibuat oleh Da'i.

Demikian juga penjelasan pada Bagian Kedua tentang Evaluasi. Pada Pasal 26 Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun anggaran dengan sasaran:

- a. Aktivitas dan kegiatan Da'i di lapangan;
- b. menginventarisir data lapangan yang berkaitan dengan pemantapan aqidah Islam dan pembinaan ummat; dan
- c. menginventarisir temuan lapangan yang diperkirakan dapat menghambat/ menghalang kelancaran tugas da'i.

Sedangkan yang bertanggungjawab melaksanakan monev adalah UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh. UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional/kegiatan teknis penunjang di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga da'i, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan *muallaf* dan majelis taklim.

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga da'i, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan *muallaf* dan majelis taklim
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam
- d. Pemberdayaan tenaga da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil
- e. Pelaksanaan pencegahan pengamalan aliran-aliran sesat
- f. Pelaksanaan bimbingan *muallaf*
- g. Pelaksanaan pemberdayaan majelis taklim dan

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.<sup>135</sup>

Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, dalam melaksanakan program-programnya berdasarkan Renstra 2012-2017. Oleh karena itu Dinas Syari'at Islam Provinsi memiliki pedoman dan tolok ukur yang jelas untuk mencapai terlaksananya program yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya, khususnya berkaitan dengan monitoring dan evaluasi program da'i perbatasan.

Da'i perbatasan merupakan orang/tenaga (sumber daya manusia) yang melaksanakan tugas dakwah baik lisan maupun tulisan atau perbuatan baik pada suatu Wilayah Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara.<sup>136</sup>

Pada Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam menjalankan tugasnya mereka bertanggung jawab kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i. UPTD inilah yang sebenarnya bertanggung jawab untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi, kemudian hasil monev tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh untuk dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan.

UPTD Pemberdayaan Tenaga Da'i Seksi Pemberdayaan Tenaga Da'i mempunyai tugas melakukan peningkatan peran tenaga da'i di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan daerah-daerah yang rawan masuk dan berkembangnya aliran

---

<sup>135</sup>Lihat Rencana Strategis Dinas Syari'at Islam Aceh Tahun 2012-2017, h. 9

<sup>136</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Bab 1 Ketentuan Umum Point 6-7

sesat.<sup>137</sup> Untuk mencapai maksud tersebut, maka Dinas Syari'at Islam Provinsi melalui UPTD ini melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana petugas da'i perbatasan telah melaksanakan tugasnya di daerah perbatasan.

Monev yang dilakukan oleh DSI juga menggunakan pola monev terpadu yang tidak hanya dilakukan secara internal, tapi juga dilakukan oleh lembaga lain terkait bidang masing-masing (misal monev pembayaran jerih). Pihak DSI menginfokan ke lapangan bahwa akan ada pihak yang akan melakukan monev dan mohon disiapkan segala sesuatunya. Demikian juga jika ada tim DSI yang ke lapangan sangat memungkinkan pihak (dinas/instansi) lainnya untuk meminta bantuan terkait dengan kebutuhan masing-masing dengan juga menggunakan dana sharing, semisalkan SPPD dan lain sebagainya.<sup>138</sup>

Pelaksanaan monev yang dilaksanakan oleh DSI tidak saja berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, minimal tiga kali dalam setahun. Namun hal tersebut bisa dilaksanakan berdasarkan situasi lapangan. Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh mengatakan pernah kita mendapat laporan dari korlap dan DSI kabupaten/kota, teman-teman da'i sendiri terhadap da'i yang tidak bekerja, lalu kita turunkan tim untuk memantau dan melakukan cek kebenaran informasi. Informasi digali dari tokoh gampong, geuchik, teungku imum, masyarakat, dan lainnya,<sup>139</sup> yang jelas pelaksanaan evaluasi dan monitoring dari pihak Dinas

---

<sup>137</sup>Lihat Rencana Strategis Dinas Syari'at Islam Aceh Tahun 2012-2017, h. 10

<sup>138</sup>Wawancara dengan Drs. Nasruddin Ibrahim, M.Ag Ka. UPTD PAI dan Da'i DSI Aceh 25 Agustus 2015 di Banda Aceh.

<sup>139</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kadis Syari'at Islam Aceh, Tanggal, 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.

Syari'at Islam Provinsi dan Kabupaten/kota dilakukan dengan baik begitu juga dengan pola monitoring DSI Kabupaten yang datang ke desa untuk melihat langsung keberadaan da'i di lokasi<sup>140</sup>, dengan menghubungi tokoh masyarakat (keucik, imam meunasah, dan lain-lain) sedangkan cara evaluasi lain juga bisa dimaksimalkan dengan menggunakan fasilitas IT berupa SMS, telpon, email dan lain-lain.<sup>141</sup>

Demikian halnya monitoring dan evaluasi yang selama ini dilaksanakan oleh kabupaten/kota, mereka melakukan monitoring ke lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui HP), dengan mengkonfirmasi ke Datuk penghulu (Keuchik), imum *gampong* dan masyarakat. Sedangkan evaluasi da'i sekali dalam satu bulan dilaksanakan di kantor Dinas syari'at Islam. Kemudian dari Dinas Syari'at Islam Provinsi, dalam 1 tahun sekali turun ke lapangan, tergantung juga masalah yang berkembang di daerah.<sup>142</sup>

Secara tugas, DSI Aceh telah melaksanakan monev sesuai dengan ketentuan yang ada, namun pola monev yang dijalankan belum standart. Monev yang dilaksanakan selama ini ada dilaksanakan tapi perlu diperbaiki, karena tatkala mereka datang hendaknya berpedoman pada SK, karena di SK tersebut dijelaskan tentang tugas da'i perbatasan yaitu hanya membatu setiap kegiatan yang dilaksanakan ditempat tugas, bukan melaksanakan pekerjaan itu mulai dari

---

<sup>140</sup>Wawancara dengan Ustaz Rahimullah, Imam Desa Tanoh Megakhe, Tanggal 20 Agustus 2015, di Aceh Tenggara.

<sup>141</sup>Wawancara dengan Ustaz Agus Nurjamil, S.Pd.I, Da'i Perbatasan, Gampong Karo, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>142</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, S.Pd.I, Da'i Perbatasan, Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang 24 Agustus 2015 di Tamiang.

awal sampai selesai. Tapi tim monitoring yang hadir menanyakan seakan-akan pekerjaan itu merupakan tugas utama da'i dan jika mereka tidak sesuai dengan pertanyaan tim monitoring maka dianggap da'i tidak melaksanakan tugas, sementara mereka tidak menjadikan SK sebagai alat monitoring.<sup>143</sup>

Oleh sebab itu, sistem monitoring dan evaluasi ke depan harus ada perubahan dan format yang lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Mekanisme yang ideal dan bagus menurut saya, pihak DSI melakukan monitoring secara benar-benar, mereka betul-betul turun ke lokasi bersama dengan DSI Kabupaten dibantu Ketua Da'i setempat dan ada anggota masyarakat yang dilibatkan. Buat berita acara dan tandatangan bersama bahwa mereka ke lokasi dan wilayah yang dituju. Hal seperti ini penting dilakukan, selama ini ada kesan kurang baik yang terjadi di lapangan.<sup>144</sup>

Dalam melakukan monev ini biasanya saya langsung turun ke lapangan dengan melibatkan koordinator da'i dan juga melibatkan ketua forum da'i. Berkaitan dengan monev yang dilakukan oleh DSI Provinsi biasanya dilakukan langsung ke lapangan tanpa melibatkan dinas syari'at kabupaten/kota, mereka cenderung merahasiakan kedatangannya ke lapangan. Sehingga mereka hanya mendengarkan isu-isu yang negatif dari masyarakat, sehingga kami yang lebih tau tentang da'i tidak dilibatkan. Idealnya, hendaknya mereka datang secara diam-diam memonev boleh saja, tetapi Kepada Dinas Syari'at Islam tetap diberi tahu.

---

<sup>143</sup>Wawancara dengan Ustaz Kamaludin, S.Pd.I, Da'i Perbatasan di Gampong Tanoh Meghakhe Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>144</sup>Wawancara dengan Zainuddin, Da'i Simpang Kanan, Desa Situbuh-Tubuh Kecamatan Danau Paris Kab. Singkil 16 Agustus 2015 di Singkil.

Seharusnya ketika mereka (tim monev) melakukan kunjungan ke lokasi memberitahukan terlebih dahulu kepada da'i supaya informasi yang diterima oleh tim monev objektif, jika diterima informasi dari masyarakat bisa jadi nanti ada masyarakat yang tidak senang dengan da'i memberikan informasi yang tidak sesuai fakta.<sup>145</sup> Drs. Hamidin, M.Pd Kadis Aceh Tenggara menilai bahwamengenai hasil monitoring dan evaluasi selama ini sudah cukup baik.<sup>146</sup>

Berdasarkan pendapat dan pandangan dari berbagai pihak tentang pelaksanaan monev pada para da'i perbatasan, maka perlu dipaparkan bagaimana sebenarnya pola monev yang dilaksanakan DSI Aceh. Program monev semestinya sudah berjalan sejak beberapa tahun program da'i perbatasan dilaksanakan, namun sampai hari ini monev yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Ini memang wewenangnya provinsi, tetapi kami selalu membantu memfasilitasinya ke lapangan. Ke depan saya pikir perlu keterlibatan unsur kecamatan sebagai tuan rumah yang disupervisi,<sup>147</sup> dan melakukan monev langsung ke lapangan sebulan sekali dengan memantau dandilengkapi dengan bukti sebenarnya yaitu fakta yang didapati, inilah yang selama ini dilakukan. Namun yang selama ini berlangsung ialah berdasarkan adanya laporan kemudian diserahkan kepada koordinator da'i yang dipercayai untuk memata-matai walaupun kebenaran faktanya itu masih diragukan. Monev

---

<sup>145</sup>Wawancara dengan Da'i Perbatasan; Robiatul Adawiyah (Gampong Kaloy), Drs. Mukhtaruddin Tripa, Amri, SE (Gampong Semadam), H. Marwan Ismail, Lc., MA (Gampong Sidodadi), Tanggal 24 Agustus 2015 di Tamiang.

<sup>146</sup>Wawancara dengan Drs. Hamidin, M.Pd, Kadis Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>147</sup>Wawancara dengan Samsul Bahri, S.H, Kadis DSI Singkil, Tanggal 18 Agustus 2015 di Singkil.

itu seharusnya dilakukan sebulan sekali.<sup>148</sup> artinya, perlu adanya monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap kinerja da'i agar bila ada da'i yang bermasalah dapat langsung dievaluasi dan diambil tindakan.<sup>149</sup> jangan datang ketika ada laporan dari masyarakat terkait masalah dengan da'i.<sup>150</sup>

Di Kabupaten Tamiang, monev dilaksanakan dalam dua bentuk, formal dan informal; secara formal setiap bulan koordinator melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja da'i. Sistemnya mereka akan membacakan kegiatan yang dicantumkan di laporan, yang dipertanyakan dan didiskusikan oleh para peserta yang hadir. Kemudian untuk turun ke lapangan tidak tentu jadwalnya, tetapi pernah kami lakukan. Karena tidak ada dananya, ini biasa dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Provinsi. Sedangkan secara informal koordinator selalu melakukan komunikasi melalui telepon dengan Datok Penghulu (Keuchik), Majelis Duduk Setikar (*Tuha Peut*) dan Imam Gampong terkait dengan kinerja dan peran Da'i di lapangan.<sup>151</sup>

Sudah ada monitoring dari DSI Provinsi Aceh, barangkali sistem monitoring dan evaluasi ke depan harus ada format yang lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Mekanisme yang bagus, Pihak DSI melakukan monitoring secara benar-benar, mereka betul-betul turun ke lokasi bersama dengan DSI Kabupaten dibantu Ketua Da'i setempat. Buat berita acara dan

---

<sup>148</sup>Wawancara dengan H. Alimuddin Lc, Sekretariat DSI Aceh Tenggara, Tanggal 21 Agustus 2015 di Aceh Tenggara.

<sup>149</sup>Wawancara dengan Muslim Bancin, S.Pd.I Ketua Forum Da'i Kabupaten Aceh Singkil 15 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>150</sup>Wawancara dengan H. Rasyidudin, S.H, Ketua MPU Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 18 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>151</sup>Wawancara dengan Drs. Maddiyah, M.Pd, Wakil Koordinator dan Kepala Dinas, Efendi, S.Pd, Kabupaten Tamiang Tanggal 25 Agustus 2015 di Tamiang.



tandatanganinya bersama bahwa mereka ke lokasi dan wilayah yang dimonev. Selama ini ada kesan kurang baik yang terjadi di lapangan.<sup>152</sup>

Demikianlah hasil penelitian berkaitan dengan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DSI Provinsi Aceh terhadap kinerja da'i perbatasan di Aceh selama ini yang menemukan beberapa kemajuan dan permasalahan.

## **9. Format Ideal Peran dan Fungsi Da'i Perbatasan ke Depan**

Program da'i perbatasan yang sudah dijalankan sejak 2002 yang lalu sudah selanjutnya memiliki format yang ideal sampai beberapa tahun ke depan. Karena itu, beberapa yang dapat disebutkan mengenai masalah format misalnya dari segi rekrutmen dan kompetensi da'i.

### **1. Pola Rekrutmen**

Pola perekrutan para da'i merupakan tahap awal dan sangat menentukan seorang dai akan dijadikan sebagai dai atau ditolak. Pada tahap ini pula diketahui seorang dai memiliki kemampuan dan intelektualitas yang mumpuni. Jadi, untuk merekrut para da'i yang memiliki integritas dan kapabilitas, keterlibatan Dinas Syari'at Islam untuk menjaring dai yang memiliki kualifikasi sangat dibutuhkan. Standar yang digunakan untuk mengukur kemampuan harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Sistem perekrutan dai harus dilibatkan berbagai komponen yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Misalnya dari kalangan DSI, akademisi, ahli sosiologi, psikologi, ekonomi, dan intelektual Muslim yang

---

<sup>152</sup>Wawancara dengan Amin Angkat, Imam Gampong, Kecamatan Danau Paris, Kab. Singkil, Tanggal 17 Agustus 2015 di Singkil.

dianggap memiliki kemampuan untuk menilai layak atau tidaknya dai yang akan diutus. Semua komponen tersebut perlu memberikan penilaian yang objektif, tanpa membeda-bedakan status sosial dan hubungan keluarganya. Seorang dai yang akan diutus harus didasarkan pada kemampuan keilmuan dan pengetahuan, bukan karena adanya hubungan garis kekeluargaan dan kedaerahan.

## 2. Kompetensi Da'i

Kompetensi da'i yang diharapkan sebagainya yang telah disebutkan dalam Pergub dan SK DSI. Di samping itu, karena segala persoalan yang terjadi dalam masyarakat akan ditanyakan langsung kepada dai-dai yang hadir di tengah-tengahnya. Sangatlah mustahil seorang dai tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat yang menuntut penjelasan dan jawaban dari dai. Da'i juga diharapkan menguasai masalah-masalah masyarakat secara komperhensif seperti pembuatan proposal kegiatan, usaha ekonomi dan sebagainya.

Selain itu, usulan dari Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kadis SI Aceh, bahwa ke depan da'i perbatasan, akan tes yang memiliki mental *interprenership* (kewirausahaan) dan yang memiliki latar belakang ekonomi Syariah. Seperti halnya keberhasilan Rasyid Bancin, S.Pd.I, Da'i Perbatasan Gampong Sepadan Kec. Rundang, Subulussalam telah membangun Pesantren Darurrahman. Lahannya sudah 5 Hektar yang merupakan waqaf dari masyarakat.<sup>153</sup> Hal ini cukup beralasan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan benefit (keuntungan)

---

<sup>153</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kadis Syari'at Islam Aceh, Tanggal 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.

secara keagamaan tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Kadis SI Aceh ini mencontohkan adanya da'i perbatasan sudah berhasil membangun pesantren berbasis agroekonomi di Subulussalam. Ada sekitar 5 hektar kebun sawit hasil wakaf warga untuk membiayai pesantren. Untuk itu pihak sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Aceh untuk melakukan pembinaan dan pemberian modal usaha bagi mereka yang memiliki skill dan potensi untuk pengembangan ekonomi.

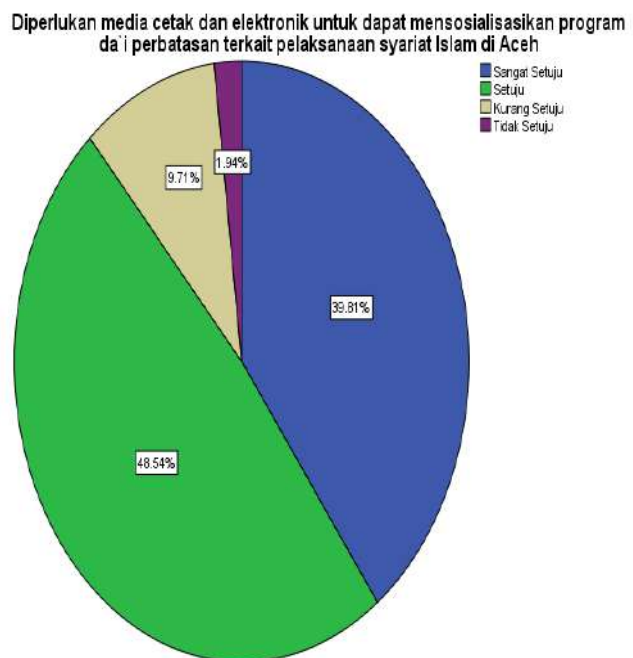
Patut dicatat bahwa disamping kompetensi yang paling penting adalah komitmen da'i untuk melaksanakan tugas dan perannya. Hal ini menjadi sesuatu yang substansial sebab, keberhasilan dan kegagalan sebuah misi dakwah biasanya disebabkan oleh komitmen. Komitmen akan nampak dari awal ketika wawancara saat rekrutmen. Mana da'i yang serius dan mana dakwah yang hanya "mencari hidup" atau menjadi batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih "layak". Oleh karena itu, istilah lain da'i yang betul-betul akan berhasil jika ia menganggap bahwa pekerjaan da'i adalah panggilan jiwa.

### **3. Pelibatan Media**

Untuk itu, ada masukan dari da'i terkait penulisan biografi da'i, itu juga penting, dan ini ke depan dalam APBA ini, akan kita masukkan dan laksanakan kegiatan tersebut. Pun, masukan untuk rubrik khusus mengenai cerita da'i perbatasan di media lokal, juga akan dicoba koordinasi/kerjasama nantinya, agar peran da'i ini lebih dirasakan oleh publik Aceh. Namun, terkait informasi yang bersifat insidental sering serambi mengulas keberadaan da'i. Pun, nanti di rubrik pariwisata DSI kita akan tampilkan informasi mengenai da'i. Selain itu, dalam

konteks menulis, da'i kita juga mengalami keterbatasan, sehingga dakwah bil lisan, seperti buletin da'i belum pernah kita lahirkan. Ini juga menjadi tantangan ke depan. Karena itu, sebagai wahana komunikasi itu penting. Terkait laporan kerja da'i, kita sudah siapkan form, kegiatan sehari-hari mereka di lapangan, jadi mereka hanya mengisi form itu, kemudian nanti korlap yang akan meneruskan pada DSI laporan tersebut.<sup>154</sup>

Sejalan dengan itu hasil angket menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki pihak DSI atau da'i sendiri mensosialisasikan peran dan kontribusinya dalam membina umat di daerah perbatasan. Masyarakat menjawab, 39.81% (sangat setuju), 48.54% (setuju), 9.71% (kurang setuju) dan 1.94% (tidak setuju).



#### 4. Pola Koordinasi

Mengenai masalah pola koordinasi ini juga masih harus ditingkatkan formatnya karena da'i perbatasan dalam melaksanakan peran dan tugasnya tidak berdiri sendiri. Ia harus melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk

<sup>154</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kadis SI Aceh, Tanggal 24 Agustus 2015 di Banda Aceh.

mencapai tujuan dengan baik. Karena itu peran DSI Provinsi Aceh menjadi penting sebagai mediator dan katalisator membangun jaringan kerjasama antar lembaga. Sebagaimana diakui oleh Drs. Nasruddin Ibrahim, M.Ag bahwa pihak DSI akan melibatkan lembaga memiliki visi dan misi yang sama untuk pengembangan daerah perbatasan. Yang kelola adalah DSI, secara teknis misalnya dengan penyuluh agama dari kemenag (secara kelembagaan) belum ada kerjasama. Untuk CSR belum ada yang melembaga, hanya pemanggilan dalam artian pelibatan secara personal da'i yang ada di lapangan, safari ramadhan dan PHBI di lapangan. Sudah ada upaya (penjajakan) komunikasi dengan beberapa dinas oleh kadis DSI Prof. Dr. Syahrizal untuk membantu tenaga da'i di lapangan dalam memfasilitasi masyarakat melalui da'i, misalnya dengan Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan. Proposal yang ada diverifikasi dan direkomendasi oleh Dinas sebelum dibantu.<sup>155</sup>

Selain pelibatan media beberapa da'i dari Tamiang juga mengusulkan format peran da'i perbatasan ke depan yaitu;

1. Perlu ada keterpaduan semua pihak; camat, Keuchik dan perangkat gampong lainnya. Misalnya pihak kecamatan menginstruksikan kepada semua perangkat gampong wajib mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh da'i perbatasan.
2. Pihak pemerintah mengintervensi kepada perangkat desa wajib belajar, setelah perangkat gampong baru masyarakatnya. Mulai dari Provinsi

---

<sup>155</sup>Wawancara dengan Nasruddin Ibrahim, M.Ag (Ka. UPTD PAI dan Da'i pada DSI Aceh, Tanggal 25 Agustus 2015 di Banda Aceh.

Gubernur ke Bupati ke Camat ke Kepala Desa kemudian kepada masyarakat).

3. Perlu penambahan da'i karena gampongnya sangat luas, apalagi kalau da'i-nya perempuan
4. Jika ada program bantuan ke *gampong* bisa mengikutsertakan da'i perbatasan, tujuannya da'i mendapat simpatik dari masyarakat.<sup>156</sup>

## 5. Fasilitas Da'i

Selain itu, T. Armansyah, MDSK (Tuha Peut) Gampong Tangse Lama, Kec. Seruway Kab. Tamiang mengatakan bahwa ke depan format ideal yang lebih baik adalah fasilitas da'i perbatasan perlu ditambah terutama tempat tinggal. Rumah tempat tinggal ini sangat penting untuk mendukung peran dan fungsi da'i perbatasan dan terpencil, mungkin yang lajang atau yang belum berkeluarga tidak terlalu banyak masalah, namun yang sudah berkeluarga akan mengganggu tugas-tugasnya di lapangan.<sup>157</sup>

Fasilitas tersebut cukup penting dalam mendukung peran dan tugas da'i di lapangan. Karena tidak mungkin semua pihak termasuk DSI Provinsi dan Kabupaten berharap banyak terhadap kinerja da'i di lapangan sedangkan fasilitasnya tidak dipenuhi. Apalagi dalam Peraturan Gubernur dan SK DSI Aceh da'i diwajibkan untuk tinggal di tempat membina masyarakat dan menghidupkan masjid dan syi'ar Islam.

---

<sup>156</sup>Wawancara dengan Robiah Adawiyah, Da'i Perbatasan, Gampong Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, dan Marwan ismail, Lc., MA, Gampong Sidodadi, Mukhtaruddin Tripa, Amri, SE Gampong Semadam, Kab. Tamiang, Tanggal 24 Agustus 2015 di Tamiang.

<sup>157</sup>Wawancara dengan T. Armansyah, MDSK (Tuha Peut) Gampong Tangse Lama, Kec. Seruway Kab. Tamiang, 24 Agustus 2015 di Tamiang.

## 6. Kehadiran Da'i di tempat dan Sistem Monev

Selanjutnya mengenai masalah kehadiran da'i ditempat ini menjadi masalah utama, di beberapa gampong yang diobservasi ada da'i yang terbukti tidak menetap di tempat.<sup>158</sup> Seperti yang dikatakan oleh Isnaini, Imam di Singkil da'i tidak menetap di gampong, sehingga segala tanggung jawab dai dilakukan sendiri oleh imuem gampung, seperti azan menjadi imam pada saat shalat jamaah, bulan puasapun imam juga yang menjadi imam teraweh dan shalawat, karena da'i tidak datang.<sup>159</sup> Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap peran, tugas dan fungsi sebagai yang disebutkan dalam aturan yang menjadi dasar yuridisnya. Apalagi pada kenyataan sudah ada beberapa da'i yang dipecat disebabkan lali dari melaksanakan tugas, termasuk tidak menetap untuk beberapa lama.

Terkait dengan itu, beberapa pandangan seperti Samsul Bahri, SH, Kadis SI Singkil format ke depan, ia mengharapkan beberapa hal yaitu; memprioritaskan rekrutmen putra setempat, karena ini akan sangat membantu di lapangan sekalipun tidak ada jaminan efektif. Demikian juga dibutuhkan komitmen yang tinggi dari para da'i untuk bertugas secara penuh tanggung jawab. Selanjutnya dipastikan secara tegas tentang komitmen untuk menetap di daerah.<sup>160</sup>

Oleh karena itu, persoalan menetapnya da'i di lapangan sebenarnya adalah persoalan monitoring dan evaluasi yang serius dilakukan oleh pihak DSI Aceh dan Kabupaten. Jika monev tersebut berjalan dengan baik, maka yakin dan

---

<sup>158</sup>Hasil observasi di beberapa *gampong*, di tiga Kabupaten; Singkil, Tamiang dan Aceh Tenggara.

<sup>159</sup>Wawancara dengan, Isnaini S, Imuem Mesjid At Thayyibah Gampong Kuta Batu, Singkil, Tanggal 16 Agustus 2015 di Singkil.

<sup>160</sup>Wawancara dengan Samsul Bahri, SH, Kadis SI Singkil, 18 Agustus 2015 di Singkil.

percara da'i akan menetap di tempat. Hal ini dapat dilihat di beberapa *gampong* di Tamiang. Tingkat menetap da'i di Taming cukup tinggi dan peran Koordinatornya cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas. Dalam memonitor dan mengevaluasi para da'i di lapangan, baik secara formal maupun informal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penguatan umat di wilayah perbatasan merupakan salah satu program yang cukup strategis dan penting dilihat dari beberapa aspek, yaitu: *pertama*, daerah perbatasan sering termarginalkan dalam proses pembangunan termasuk pembangunan bidang keagamaan, baik aspek jarak dari pusat pemerintah maupun kebijakan pemerintah yang tidak mengacu pada peningkatan kemampuan masyarakat perbatasan. *Kedua*, sumber daya manusia di daerah perbatasan, khususnya tentang pengetahuan agama dianggap masih rendah. *Ketiga*, kabupaten perbatasan Aceh merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran dan para misionaris.
2. Tujuan utama program da'i perbatasan yaitu mencegah upaya pendangkalan akidah. Da'i perbatasan juga bertugas untuk mengadakan pengajian, baik terkait dengan al-Quran maupun ilmu-ilmu keislaman lainnya; fiqih, tauhid, membina masyarakat, menghidupkan masjid dan *meunasah*.
3. Posisi da'i bukan sebagai ulama besar, dalam khazanah Aceh mereka serupa sebagai Teungku Meunasah, yang kualifikasinya standarnya mampu memberikan pencerahan kepada umat di wilayah perbatasan. Kemampuan Teungku Meunasah seperti kita ketahui adalah kemampuan baca dan mengajarkan al-Quran, praktik

moral, kemampuan memimpin kegiatan-kegiatan umum keagamaan, seperti shalat, khutbah, samadiyah, tahlil dan lainnya.

4. Mengenai masalah tantangan dan kendala da'i perbatasan yaitu; perbedaan pemahaman keagamaan; perbedaan etnis dan budaya; kondisi geografis; fasilitas da'i; gerakan Kristenisasi; kehadiran da'i di tempat;
5. Mengenai masalah kehadiran da'i ditempat menjadi masalah di Singkil dan Aceh Tenggara, yang harus dilakukan adalah memaksimalkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh DSI Aceh dan Kabupaten untuk memastikan da'i perbatasan untuk hadir dan melaksanakan peran dan tugasnya.
6. Efektivitas dan dampak yang dirasakan masyarakat yaitu; penguatan aqidah dalam mengkal Kristenisasi dan aliran sesat; menjaga kerukunan antar umat beragama; menambah pemahaman keagamaan, membina Majelis Taklim, remaja Masjid dan TPA, memakmurkan masjid dan meunasah, menghidupkan hari-hari besar Islam dan Syi'ar Islam serta agen perubahan sosial ekonomi.

## **B. Rekomendasi**

1. Berdasarkan kondisi keagamaan masyarakat perbatasan yang sangat mengkhawatirkan ditambah lagi dengan sumber daya keagamaan lokal yang cukup minim, serta kondisi geografis wilayah yang cukup sulit perlu adanya penambahan jumlah da'i agar sesuai dengan kebutuhan. Da'i yang berjumlah sekarang 170 orang belum sesuai dengan kondisi riil kebutuhan da'i dilapangan

pada 6 kabupaten yaitu Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tamiang, Simeulue dan Aceh Selatan.

2. Kepada pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat ikut terlibat dengan menyediakan anggaran khusus untuk penambahan da'i dalam rangka mendukung kebutuhan da'i pada masing-masing kabupaten/kota.
3. Sistem perekrutan da'i harus melibatkan berbagai komponen yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Misalnya dari kalangan DSI, akademisi, ahli sosiologi, psikologi, ekonomi, dan intelektual Muslim yang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai layak atau tidaknya da'i yang akan diutuskan. Semua komponen tersebut perlu memberikan penilaian yang objektif, tanpa membedakan status sosial, asal daerah dan hubungan keluarganya.
4. Para da'i harus mampu berinteraksi dengan komunitas masyarakat dengan cara mengetahui tingkat kemampuan, karakteristik adat budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemampuan beradaptasi dengan baik menjadi nilai plus yang dapat dinilai oleh masyarakat.
5. Para da'i selain memiliki kemampuan di bidang kajian ilmu keagamaan harus pula didukung dengan daya komunikasi yang aktif yang bisa memberikan pemahaman dengan ringan yang mudah dicerna oleh masyarakat.
6. Mengenai masalah tantangan dan kendala da'i perbatasan yaitu perbedaan pemahaman keagamaan. Pihak DSI perlu memberikan pemahaman dan

pembekalan kepada para da'i untuk tidak menyinggung masalah khilafiyah dan memberikan pencerahan misalnya perbandingan mazhab fiqih dalam Islam. Selain untuk gerakan Kristenisasi dan kerukunan umat beragama juga dibutuhkan pencerahan bagi para da'I untuk itu peta dakwah menjadi sesuatu yang cukup penting.

7. Peningkatan kapasitas SDM Da'i perbatasan juga merupakan hal yang cukup penting dilakukan, sebab kemampuan da'i harus ditingkatkan, baik dai segi kapasitas dan kompetensi keilmuan, maupun skill dan keterampilan.
8. Pola Koordinasi Lintas Sektor dan Lembaga Keagamaan hendak perlu segera dibangun agar masalah keagamaan dapat diselesaikan dengan efektif: Da'i dan Penyuluh PAI (Kemenag) tufoksinya sama karena dapat bersinerjis. Begitu juga yang lain seperti MPU, Ormas Islam dan Aparat Gampong. Pola ini dapat dicontoh pada kasus *isbath nikah* yang melibatkan, DSI Aceh, Mahkamah Syar'iyah, Kemenag dan Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh.
9. Pola Monitoring dan Evaluasi Program Dai masih perlu ditingkatkan agar peran dan tugasnya berjalan secara baik dengan melibatkan berbagai unsur. Terutama yang dilakukan oleh DSI Aceh terlebih Kabupaten atau Koordinator Kabupaten, sebab mereka yang menyaksikan dan bersama dengan para da'I di lapangan.
10. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh perlu menjadikan program da'i perbatasan ini sebagai salah satu program prioritas dalam rangka implementasi syari'at Islam

di Aceh dengan menambah anggaran yang lebih maksimal. Karena program da'i perbatasan memiliki dampak yang baik dalam penguatan akidah umat serta peningkatan pemahaman keagamaan diwilayah perbatasan. Karen itu, Pemerintah Aceh dan DPRA perlu menjadikan Da'i Perbatasan sebagai Program Unggulan dan Proritas pada masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Kamus dan Tesis**

- Abdullah, *Wawasan Dakwah: Kajian Epistemologi, Konsepsi, dan Aplikasi Dakwah*, (Medan: IAIN Press, 2002).
- Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: PLP2M, 1983),
- Abdurani, “Problema Da’i Perbatasan Aceh dalam Pembinaan Masyarakat” *Tesis* (Banda Aceh: Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013)
- Abidin Nurdin, *Syariat Islam dan Isu-isu Kontemporer*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
- Al Yasa’ Abubakar, *Sekilas Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008, hal. 4.
- Al Yasa’ Abubakar, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008, hal. 43-45.
- AZ.B. Marvati, *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. (Thousand Oaks.Sage Publ. Inc. 2004).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologi Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2003).
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 27
- Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).

- Jasafat dkk., *Dakwah Media Aktuliasasi Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011).
- John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia 2003).
- Lexy Moleong 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1997).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- M. Jakfar Puteh dan Saifullah (ed), *Dakwah Tekstual dan Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Matthew. B Miles, & Huberman, A.Michael. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI Press. 1992).
- N K. Denzin & Lincoln, Yvonna S. *Handbook of Qualitative Research (secondedition)*, (ThousandOaks, Sage Publication, Inc. 2000).
- Riduwan, 2004. *Metodologi Riset dan Data*, (Bandung: Alumni, 2004),
- Salihin Mizal, "Dakwah Di Perbatasan Singkil-Sumut (Studi Terhadap Proses Kristenisasi Di Kabupaten Singkil)", *Tesis* (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2014).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suharsimi Arikunto dan Jabar, Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IX, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).

- Suyadi Prawirosentono, *Model Pembangunan Sumber Daya Manusia Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta: BPFE, 1995).
- Syahrizal Abbas (ed). *Kontekstualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda: Ar-Raniry Press, 2003).
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Jakarta: Logos, 2003).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997).
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).
- Zainal Arifin, 2010, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010,
- Zaki Fuad Khalil dkk, *Melihat Syariat Islam dari Berbagai Dimensi*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007).

#### **UU, SK Dinas, Surat Kabar dan Media On Line**

- Da'i Perbatasan Harus Cegah Pendangkalan Akidah, (*Serambi Indonesia*, 30 Nopember 2014).
- Dinas Syariat Islam Tingkatkan Kualitas 150 Da'i Perbatasan Aceh, (*Serambi Indonesia*, 13 Agustus 2014).
- Dinas Syariat Islam, Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2012-2017  
<http://samanui.wordpress.com/perbatasan-dan-pengaruhnya-terhadap-masyarakat-di-aceh/> diakses, 20/12/2014.



<http://www.fimadani.com/menyelamatkan-islam-di-perbatasan-aceh-sumatera-utara>  
diakses, 20/12/2014.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan  
Kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil

Sumut-Aceh Bina Dakwah Diperbatasan, (Waspada, 4 Nopember 2011).

Zulhairi, Cerita Da'i Perbatasan di Pelosok Aceh Singkil, Prospek Dakwah Sangat  
Cerah dalam [www.kemenag.aceh.go.id](http://www.kemenag.aceh.go.id).